



PEMERINTAH PROPINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU

NOMOR : 4 TAHUN 2002

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PROVINSI RIAU
TAHUN 2001-2003**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah, dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah, Gubernur, Bupati dan walikota bertanggung jawab DPRD;
- c. bahwa berdasarkan Pasal (1) dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor : 108 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Akhir Tahun Anggaran dan Pertanggung Jawaban akhir Tahun Anggaran masa Jabatan Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolak ukur Renstra;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c disusun Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Riau Tahun 2001-2003;
- e. bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, perlu menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Riau Tahun 2001-2003 dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Nomor : IV/MPR/1999, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 ;
2. Undang-undang Nomor : 61 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor : 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 1646) ;
3. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1983, tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor : 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3260) ;

4. Undang-undang Nomor : 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor : 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3501) ;
5. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1999, tentang Susunan dan Kedudukan MPR-DPR dan DPRD ;
6. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4849) ;
7. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3848) ;
8. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2000, tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 206 ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 108 Tahun 2000, tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 209 ;
11. Keputusan Presiden Nomor : 27 Tahun 1980, tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
12. Keputusan Presiden Nomor : 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 36 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor : 40 Tahun 2001) ;
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : ... Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor : ... Tahun 2001) ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG STRATEGIS
(RENSTRA) PROVINSI RIAU TAHUN 2001-2003.**

Pasal 1

Rencana Strategis Provinsi Riau Tahun 2001-2003 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Riau, yang berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD menggambarkan permasalahan

Pembangunan Daerah serta indikasi program dan kegiatan yang dianggap prioritas dan strategis yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap setiap tahunnya.

Pasal 2

Subtansi dan muatan Rencana Strategis Provinsi Riau Tahun 2001-2003 merupakan perencanaan taktis strategis program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan melalui sumber pembiayaan APBD Provinsi Riau, secara bertahap setiap tahunnya, yang mengacu kepada pola dasar pembangunan daerah Provinsi Riau 2001-2005 dan program pembangunan daerah (Propeda) Provinsi Riau 2001-2003.

Pasal 3

Rencana Strategis Provinsi Riau Tahun 2001-2003 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan.
BAB II	Proyeksi Pertumbuhan dan Kendala yang dihadapi.
BAB III	Visi, Misi dan Kebijakan Pembangunan.
BAB IV	Program Prioritas Tiga Tahunan.
BAB V	Pengukuran dan Evaluasi Kinerja.
BAB VI	Matrik Daftar Indikasi Program dan Kegiatan Daerah.
BAB VII	Penutup.

Pasal 4

Isi beserta uraian terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini terdapat dalam Naskah Rencana Strategis Provinsi Riau Tahun 2001-2003 yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Pembiayaan pelaksanaan Rencana Strategis Provinsi Riau Tahun 2001-2003 yang dijabarkan melalui Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) untuk setiap tahunnya diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

- (1) Program Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2001-2003, ditetapkan oleh Gubernur Riau bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
- (2) Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Pasal 7

- (1) Rencana Startegis Provinsi Riau Tahun 2001-2003, ditetapkan oleh Gubernur Riau bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.

- (2) Rencana Strategis Provinsi Riau Tahun 2001-2003, dapat dilakukan perubahan sesuai dengan tuntutan dinamika masyarakat dan pelaksanaan APBD Provinsi Riau.
- (3) Peraturan Daerah ini berlaku sejak ditetapkannya Tahun Anggaran 2001, tanggal 31 Maret 2001.
- (4) Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan : Pekanbaru
Pada Tanggal : 6 Maret 2002

GUBERNUR RIAU

H. SALEH DJASIT, SH

Diundangkan : di Pekanbaru
Pada Tanggal : 8 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

H. ARSYAD RAHIM
Pembina Utama Madya
NIP. 010049979

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2002 NOMOR : 6

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : 4 TAHUN 2002

N A S K A H

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PROVINSI RIAU
TAHUN 2001-2003

PEMERINTAH PROPINSI RIAU

2002

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Umum

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan publik (*public Service*), dan memajukan perekonomian daerah. Otonomi daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat (*public Participation*), pemerataan dan keadilan (*equity and equality*), serta memperhatikan potensi dan keaneka ragaman daerah. Dengan demikian maka terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (*public*) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah sesuai dengan misi di atas, diharapkan pemerintah memiliki keleluasan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang harus melibatkan peran DPRD dan meningkatkan partisipasi rakyat. Karena dalam era demokrasi yang semakin menyeluruh sekarang ini, rakyat melalui wakil-wakilnya di DPRD, akan mengikut dari dekat sejauh mana pemerintah daerah mampu mewujudkan harapan-harapan rakyat yang memilihnya. Pada saat yang sama, keputusan politik untuk memperluas untuk itu dalam rangkai mewujudkan otonomi daerah, dibutuhkan partisipasi aktif tiga unsur yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Masyarakat dewasa ini semakin kritis kepada pemerintah daerah, oleh karna itu pemerintah daerah diharapkan lebih responsiv dan bijaksana terhadap berbagai tuntutan masyarakat. Untuk merespon tuntutan masyarakat yang semakin beragam tersebut, pemerintah daerah harus memiliki system manajemen pemerintah yang handal. Hal tersebut sangat penting, karena permasalahan umum yang terjadi selama ini adalah kurang efektifnya fungsi-fungsi manajemen pemerintahan yang melibatkan rendahnya kualitas pelayanan publik yang dihasilkan, anggaran publik yang tidak efisien dan efektif, dan kinerja sektor publik yang mengecewakan. Untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik, pemerintah daerah harus mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme serta pelayanan publik yang prima.

Melalui perencanaan pembangunan yang tepat, sangat diharapkan pemerintah daerah Propinsi Riau mampu mengembangkan ekonomi daerah, meningkatkan daya saing daerah, mengatasi masalah-masalah pasar yang menghambat proses pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di daerah, mempercepat pemulihan krisis serta pertumbuhan dunia usaha di daerah. Untuk itu maka rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, dalam rangka pemanfaatan sumber daya secara tepat dan bijaksana di Propinsi Riau, merupakan suatu hal yang sangat esensial. Pembangunan di era reformasi menuntut kesiapan dari perangkat pembangunan untuk menyusun suatu kerangka, kebijaksanaan dan strategi pembangunan yang lebih berkualitas untuk pembangunan berikutnya. Strategi pembangunan yang dilaksanakan harus berpedoman pada prinsip-prinsip kesemestaan, kelestarian ekologi, pemerataan, partisipasi rakyat, skala prioritas, keseimbangan, kontinuitas, pendekatan kesisteman, mengandalkan kekuatan sendiri, dan kejelasan strategi dasar.

Dalam era globalisasi, Propinsi Riau tampaknya harus mempersiapkan diri sebaik mungkin menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan daerah/propinsi lain. Propinsi Riau menghadapinya dengan persiapan-persiapan yang selaras dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya manusia, manajemen dan sistem kelembagaan, yang diarahkan pada peningkatan daya saing perekonomian.

Dalam melangkah kedepan semua pihak perlu memiliki visi, misi dan strategi pembangunan tersebut tidak saja memiliki muatan dalam pembangunan masa depan, tetapi juga

memiliki cakupan konseptual dalam merakit rencana-rencana pembangunan daerah, yang lebih melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, Riau harus memanfaatkan dan mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki. Semua potensi daerah yang dapat mendukung pembangunan harus secara cermat dikembangkan dan dioptimalkan pemanfaatannya, dikaji kekuatan pendorong dan kelemahannya, peluang-peluang yang ditimbulkan dan segala tantangan yang dihadapi. Potensi yang bersifat ekonomi, terutama diharapkan untuk pengembangan ekonomi kerakyatan, sedangkan potensi lain dikembangkan dalam rangkai mendukung arah pembangunan secara keseluruhan.

1.2. Tujuan dan Sasaran

1.2.1. Tujuan

1. Menjabarkan visi dan misi pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Riau Tahun 2001 – 2005 kedalam bentuk program-program dan kegiatan pembangunan yang relevan dengan situasi, kondisi, permasalahan dan potensi yang ada selama tiga tahun (2001 -2003).
2. Sebagai acuan dalam menyusun rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada).
3. Sebagai acuan utama bagi seluruh Dinas/Instansi dan masyarakat Propinsi Riau dalam menyusun program-program dan kegiatan pembangunan selama tahun anggaran 2001 – 2003 akan disusun kedalam APBD Propinsi Riau.
4. Sebagai dasar bagi Gubernur Propinsi Riau untuk membuat laporan Pertanggungjawaban pada setiap tahun anggaran maupun pada akhir masa jabatan yakni pada tahun 2003 mendatang.

1.2.2. Sasaran

1. Tersusunnya rencana Pemerintah Daerah Propinsi Riau yang bersifat strategis untuk mewujudkan visi dan misi Propinsi Riau melalui berbagai kegiatan pembangunan daerah.
2. Terselenggaranya pemerintahan Daerah Propinsi Riau yang demokratis, transparansi, akuntabilitas, profesional dan pelayanan publik yang prima serta pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan perencanaan komprehensif yang terpadu, diseluruh Propinsi Riau.

1.3. Landasan penyusunan

1. Pancasila sebagai landasan Idiil
2. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan Konstitusional.
3. Garis-Garis Besar Haluan Negara, Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999, dan Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Riau, serta Program Pembangunan Daerah propinsi Riau sebagai landasan Operasional.

BAB II

PROYEKSI PERTUMBUHAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI

2.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB

Perkiraan pertumbuhan ekonomi Propinsi Riau untuk tahun 2001 sampai dengan tahun 2005, didasarkan kepada beberapa landasan, antara lain perkiraan tingkat inflasi selama kurun waktu tersebut sebesar 7,50 persen rata-rata setiap tahun jumlah investasi diperkirakan akan mencapai 21,58 persen dari jumlah PDRB atas dasar harga berlaku selama lima tahun, dan angka *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)* diperkirakan akan mencapai 3,75 persen yang berarti untuk meningkatkan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp 1,00 miliar diperlukan investasi sebanyak 3,75 miliar. Angka ICOR ini diperkirakan lebih rendah dari tahun yang lalu sebesar 3,78 persen.

Selain itu perkiraan laju pertumbuhan ekonomi selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 rata-rata 5,76 persen setahun, dengan perkiraan besarnya PDRB atas dasar harga konstan tahun 1993 akan mengalami kenaikan dari sebesar Rp 10.324,63 miliar pada tahun 2001 naik menjadi Rp 12.423,35 miliar pada tahun 2005. Perkiraan pertumbuhan ekonomi tersebut cukup memadai apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 3,79 persen sertahun.

Sektor-sektor yang mendukung terwujudnya laju pertumbuhan ekonomi tersebut adalah sektor industri yang tumbuh rata-rata sekitar 7,33 persen pertahun, dan sektor pertambangan dan galian tumbuh sekitar 7,96 persen rata-rata pertahun, sektor bangunan diharapkan akan tumbuh rata-rata 7,80 persen.

Table 2.1. : Perkiraan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 1993 Propinsi riau tahun 2001 – 2005 (Milyar Rupiah)

No	Sektor	2001	2002	2003	2004	2005
1	Pertanian	1.618,59	1.667,79	1.716,99	1.766,19	1.815,39
2	Pertambangan	303,26	321,36	339,46	357,56	375,66
3	Industri	3.223,55	3.421,87	3.620,19	3.818,51	4.016,83
4	Listrik	103,05	108,95	114,85	120,75	126,65
5	Bangunan	668,93	689,19	727,45	756,71	785,97
6	Perdagangan	1.873,81	1.965,23	2.056,65	2.148,07	2.239,49
7	Pengangkutan	745,47	788,65	831,63	875,01	918,19
8	Keuangan	1.083,14	1.144,54	1.205,94	1.267,34	1.328,74
9	jasa	704,83	732,08	760,63	788,53	816,43
	Jumlah	10.324,63	10.848,66	11.373,79	11.898,67	12.423,35

Sumber: Pusat penelitian sosial Ekonomi Universitas Riau

Sedangkan sektor yang pertumbuhannya dibawa laju pertumbuhan ekonomi adalah sektor pertanian yang hanya tumbuh sekitar 2,51 persen rata-rata pertahun. Hal ini disebabkan oleh karena kebijaksanaan pada sektor ini lebih mengutamakan pemberdayaan pertanian rakyat dengan skalah kecil tetapi jumlah yang cukup banyak sehingga mengakibatkan kontribusinya terhadap PDRB akan mengalami penurunan dari 18,18 persen pada tahun 2001 menjadi 14,62 persen pada tahun 2005 . Sektor lainnya yang mengalami pertumbuhan yang relative rendah adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh rata-rata sebesar 5,34 persen pertahun .

Pada tahun 2001 – 2005 jumlah infestasi yang diperlukan untuk seluruh kabupaten/kota adalah Rp 51.590.92 miliar, termasuk Propinsi Riau sebesar Rp 24.854,92 miliar. Besarnya

infestasi setiap kabupaten dan kota yang paling besar adalah kota Batam Rp 4.458, 57 milyar dan yang terkecil adalah kabupaten Indragiri Hulu sebesar Rp 842,72 milyar.

Tabel 2.2 : Perkiraan Distribusi Persentase PDRB atas dasar Harga Konstan 1993 Propinsi Riau dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 1998 - 2005

No	Sektor	1998	Pertumbuhan	2005
1	Pertanian	18,18	2,51	14,61
2	Pertambangan	2,62	7,96	3,02
3	Industri	29,17	7,33	32,33
4	Listrik	1,07	5,02	1,02
5	Bangunan	5,53	7,80	6,33
6	Perdagangan	18,54	5,34	18,03
7	Pengangkutan	7,19	6,17	7,39
8	Keuangan	10,28	6,36	10,70
9	Jasa	7,42	3,93	6,57
Jumlah		100,00	5,76	100,00

Sumber : BPS Propinsi Riau

Dengan jumlah investasi sekitar RP 24.854,92 milyar, diupayakan untuh dapat mencapai laju pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5,76 persen diperlukan jumlah ini ditetapkan dengan mempertimbangkan angkah ICOR, dan tingkat inflasi.

Tabel 2.3. : Perkiraan Investasi Menurut Sektor Propinsi Riau (Rp Milyar)

No	Sektor	Investasi	Persentase
1	Pertanian	2.448,02	9,85
2	Pertambangan	1.321,58	5,32
3	Industri	9.661,05	38,86
4	Bangunan	2.409,75	9,70
5	Perdagangan	3.748,73	15,08
6	Pengangkutan	1.746,10	7,03
7	Jasa	1.180,56	4,75
8	Sektor lainnya	2.339,13	9,4
Jumlah		24.854,92	100,00

Sumber : PPSE UNRI

Adapun sumber infestasi besar Rp 24.854, 92 milyar diharapkan dari pemerintah, dalam hal ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta sebagian lagi dari masyarakat. Perbandingan jumlah infestasi pemerintah dan jumlah infestasi masyarakat adalah berbanding antara 28,70 persen dengan 71,30 persen, sehingga investasi pemerintah sebesar Rp 7.133,49 milyar atau rata-rata Rp 1.426,69 milyar setahun. Sedangkan jumlah investasi masyarakat sebesar Rp 17.721,42 milyar.

2.2. Pemulihan Ekonomi Daerah.

2.2.1. Kondisi Perekonomian Riau.

Krisis ekonomi yang berlangsung secara nasional sejak pertengahan Agustus 1997 dan telah berkembang menjadi krisis yang bersifat multi dimensional, sampai saat sekarang masih belum menunjukkan tanda-tanda untuk pulih kembali seperti sediakala. Pada awal terjadinya krisis berbagai aktifitas ekonomi terutama dalam skala besar mengalami gangguan yang cukup berarti sehingga mengakibatkan kemerosostan ekonomi secara makro yang mana hal tersebut

telah membawa implikasi yang sangat signifikan terhadap kondisi perekonomian daerah, sehingga mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah pengangguran, rendahnya daya beli masyarakat, yang pada akhirnya menambah jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan.

Sekalipun berbagai upaya langkah-langkah kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah, namun secara umum bangsa Indonesia belum mampu untuk keluar dari suasana krisis ekonomi. Hal tersebut mengingat bahwa upaya pengendalian stabilitas dan pemulihan ekonomi sangat terkait dengan aspek-aspek lainnya terutama dari sisi politik dan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sebelum terjadinya krisis ekonomi, kondisi perekonomian Propinsi Riau relatif yang terbaik di Indonesia oleh karena mampu memacu laju pertumbuhan ekonominya diatas rata-rata laju pertumbuhan ekonomi secara nasional. Seperti yang dapat dilihat pada priode Pembangunan Jangka Panjang Pertama (PJP.I) dimana terlihat adanya peningkatan pendapatan perkapita, dari sebesar US \$ 57,50 pada tahun 1978 naik menjadi sebesar US \$ 852,49 pada tahun 1993 dan pada tahun 1996 mampu ditingkatkan lagi menjadi sebesar US \$ 1.122,26.

Demikian pula halnya perkembangan dari beberapa sektor yang cukup strategis, yaitu sector pertanian khususnya dari sub sektor perkebunan yang mengalami perkembangan yang cukup besar untuk sejumlah komoditi seperti kelapa, karet, dan beberapa komoditi lainnya. Namun lain halnya dengan komoditi kelapa sawit peningkatan sangat luar biasa, dimana sejak mulai dikembangkan pada tahun 1984 sampai tahun 1999 luas tanahnya telah mencapai 1.002.401 hektar dengan jumlah produksi 6.783.841 ton.

Kondisi yang serupa juga dialami oleh sektor industri, dimana sebelum terjadinya krisis ekonomi perkembangannya dengan sangat pesat dan cukup prospektif. Hal ini disebabkan oleh karena sektor ini memang merupakan salah satu mesin pemacu pertumbuhan yang cukup strategis oleh karena mampu membuka lapangan kerja yang cukup besar dan meningkatkan penerimaan devisa Negara, pada periode tahun 1993 – 1996 saja telah mencapai pertumbuhan sekitar 14,45 persen sehingga peranan sektor industri terhadap PDRB Propinsi Riau meningkat sebesar 28,56 persen.

Pola distribusi pendapatan yang dilihat bahwa tingkat kemiskinan absolut terdapat penurunan yang cukup besar, yaitu dari sekitar 47 persen dari jumlah penduduk Riau masih berada dibawah garis kemiskinan pada tahun 1975, maka pada tahun 1996 tinggal 9,6 persen dari jumlah penduduk. Sedangkan untuk ukuran kemiskinan relative juga telah menunjukkan kemajuan, dimana dari 40 persen penduduk yang berpenghasilan rendah hingga tahun 1999 telah mampu menikmati 12,12 persen dari total pendapatan nasional. Angka ini diperkuat dengan menurunnya angka Indeks Gini dari 0,3321 menjadi 0,5400 (semakin merata).

1.2.2. Kondisi Perekonomian Daerah Riau Pada Masa Krisis Ekonomi.

Secara umum kondisi perekonomian Propinsi Riau sejak terjadinya krisis ekonomi tidaklah separah yang dialami oleh daerah-daerah lainnya terutama daerah-daerah yang tidak atau kurang memiliki sumber daya alam yang memadai, atau daerah-daerah yang memiliki industri dengan sumber bahan bakunya berasal dari barang impor.

Relatif lebih baiknya kondisi perekonomian Propinsi Riau pada masa krisis disebabkan oleh karena industri-industri yang ada pada umumnya sebahagian besar menggunakan bahan baku lokal yang berasal dari kekayaan alam Riau, seperti hasil hutan dan minyak bumi. Namun demikian sebagai akibat adanya reaksi yang bersifat psikologis secara nasional, kondisi perekonomian Propinsi Riau pada awal krisis (tahun 1997-1998) sempat tumbuh sangat rendah hanya sekitar 3,39 persen, padahal periode sebelumnya (1993 – 1996) tumbuh sekitar 9,19 persen rata-rata pertahunnya.

Sekalipun penurunan laju pertumbuhan ekonomi hanya 6,20 persen, namun inflikasinya cukup kuat terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari jumlah penduduk miskin yang naik drastis menjadi 43,85 persen, pada hal sebelumnya hanya tinggal sekitar 9,6 persen (tahun 1996), demikian pula terhadap distribusi pendapatan secara relative turun dari 17,07 persen dari total pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk pada tahun 1997 yang berpendapatan rendah turun menjadi 12,22 persen pada tahun 2000 yang lalu.

Kesulitan ekonomi lainnya yang dihadapi oleh masyarakat Propinsi riau pada masa awal krisis lalu dan hingga sekarang adalah kesulitan dalam memperoleh barang-barang kebutuhan pokok, jika pada awal krisis (tahun 1997 – 1998) kesulitan dalam memperoleh beras, gula dan minyak goreng, maka pada tahun 2000 – 2001 ini adalah kesulitan dalam memperoleh bahan bakar minyak khususnya minyak tanah untuk keperluan rumah tangga, serta harga-harga sejumlah barang kebutuhan sehari-hari yang belum stabil.

1.2.3. Pemesanan pokok dalam Pemulihan Ekonomi Daerah.

1) In – efisiensi dalam pelaksanaan pembangunan

Menyangkut dengan efisiensi dan efektifitas yang kurang memadai dalam pelaksanaan investasi modal, hal ini terbukti dari nisbah tambahan investasi terhadap hasil yang diperoleh dengan investasi yang bersangkutan. Nisbah tersebut dikenal dengan *Incremental capital Output Ration (ICOR)*. Selama waktu 10 tahun terakhir yang mencakup Pelitaa III dan pelita V, angka ICOR bekisar antara 4,5 sampai dengan 5,0. Tingginya angka ICOR di daerah riau, disebabkan oleh berbagai faktor teknis ekonomis dan non ekonomis yaitu kurangnya infranstruktural serta kurangnya efisiensi dalam pengeluaran.

2) Ketidak seimbangan antara jumlah investasi masyarakat dengan investasi pemerintah

Investasi masyarakat telah mencapai 86 persen dari total investasi pembangunan selama periode pembangunan yang lalu, sedangkan investasi pemerintah hanya mencapai 16 persen. Kondisi ini melibatkan orientasi pembangunan yang lebih banyak dilakukan oleh masyarakat (swasta) lebih ditunjukkan pada upaya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya (*prifit motive*) terutama dalam rangka mengeksploitasi sumber daya alam. Sedangkan investasi yang dilakukan oleh pemerintah mempunyai tujuan ganda yaitu untuk stabilisasi dan mewujudkan pemerataan, sehingga mengakibatkan kesenjangan sosial.

3) Disparitas laju pertumbuhan sector pertanian dengan sector industri

Laju pertumbuhan sektor pertanian hanya sebesar 2,47 persen, sedangkan sektor industri tumbuh sebesar 14,45 persen kondisi ini telah menyebabkan peranannya terhadap PDRB untuk sektor pertanian semakin menurun sedangkan untuk sektor industri semakin meningkat. Pengalaman menunjukkan bahwa orientasi sektor industri di propinsi Riau adalah industri dengan menggunakan teknologi sehingga mengurangi kesempatan dan peluang bagi tenaga kerja lokal untuk masuk kepasar tenaga kerja sektor industri oleh karena kualitasnya masih relatif rendah, akhirnya pertumbuhan sektor industri yang tinggi tersebut kurang dapat dinikmati oleh penduduk tempatan dan nilai tambah bagi daerah tidak terlalu besar diterima

Disamping itu pula industri yang berkembang adalah industri-industri yang kurang menggunakan bahan baku bukan dari hasil pertanian rakyat, tetapi dari hasil pertanian yang telah dikelola secara padat modal, yakni milik perusahaan perkebunan besar swasta (PBS), hasil hutan (kayu), dan minyak bumi.

4) Kesejahteraan pembangunan antar daerah kabupaten/kota

Ketidak seimbangan ini lebih disebabkan oleh perbedaan kondisi geografis dan potensi sumberdaya alam yang terdapat di kabupaten/kota, khususnya di kabupaten /kota pemakaran. Ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang ada, belum mampu

mendorong proses pelaksanaan pembangunan pada masing-masing daerah kabupaten/kota pemekaran.

Sebagai akibat dari perbedaan tersebut, menyebabkan aktifitas ekonomi pada setiap Kabupaten/Kota menjadi tidak sama satu dengan yang lainnya dan setiap daerah memiliki karakteristik sendiri-sendiri, seperti antara Kabupaten Kepulauan Riau dengan Kabupaten Natuna dengan Kabupaten Karimun, sekalipun ketiganya adalah sama-sama merupakan kabupaten kepulauan, namun karakteristik sangat berbeda terutama orientasi ekonominya. Demikian pula antara Kabupaten Bengkalis dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Indra Giri Hilir yang sama-sama merupakan Kabupaten yang terletak di daerah pesisir pulau Sumatra. Serta beberapa wilayah Kabupaten/Kota lainnya.

Salah satu implikasi yang ditimbulkan dari perbedaan tersebut terhadap aspek keuangan daerahnya, terutama dalam hal penggalian sumber-sumber potensi pendapatan asli daerah, dimana pada masing-masing daerah tidak sama kemampuannya yang dapat dilihat dari proporsinya dibandingkan dengan total penerimaan daerahnya pada tahun anggaran 1998/1999. Kabupaten Indragiri Hulu hanya mampu mem1,64 persen dari jumlah penerimaan daerah, Kabupaten Kampar dapat mencapai 2,86 persen, Kabupaten Bengkalis mencapai 5,33 persen, Kabupaten Kepulauan Riau mencapai sebesar 6,14 persen, dan Kota Pekanbaru adalah yang paling besar mampu mencapai PAD nya sebesar 14,10 persen dan jumlah penerimaan daerahnya.

2.2.4. Penanggulangan Krisis dan Prospek ke Depan

Krisis moneter yang berkepanjangan sejak pertengahan tahun 1997 telah mengakibatkan krisis yang bersifat multi dimensi, sehingga bukan saja telah merusak sendi-sendi perekonomian, tetapi juga telah tatanan ekonomi, sosial dan politik baik pada skala nasional, regional maupun lokal.

Berbagai kesulitan dihadapi baik oleh negara, pemerintah maupun masyarakat pada masa krisis ini, di antaranya adalah negara sedang dihadapkan pada kesulitan untuk menutup defisit anggaran sebagai akibat semakin menurunnya penerimaan negara terutama yang berasal dari ekspor, sementara impor masih belum mampu dibatasi oleh karena memang dalam beberapa hal Indonesia masih tergantung pada impor, terutama untuk mendukung pengadaan barang kebutuhan pokok dan aktifitas disektor produksi. Sementara itu masyarakat dihadapkan pada kesulitan untuk memperoleh sejumlah barang-barang kebutuhan pokoknya karena jumlah yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan riilnya disamping adanya kebocoran-kebocoran dalam supply barang kebutuhan pokok tersebut (terutama BBM) keluar negeri dan adanya aksi spekulasi yang dilakukan oleh para pedagang. Kesulitan dalam memikul beban hidup oleh karena biaya hidup yang semakin meningkat sebagai akibat kenaikan harga-harga umum yang kurang dapat dikendalikan sementara penerimaan menjadi berkurang sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh sejumlah industri oleh karena adanya kebijaksanaan rasionalisasi pekerja /pegawai.

Untuk menghadapi berbagai hal tersebut di atas, maka berbagai langkah kebijaksanaan telah diambil oleh pemerintah pusat dengan menggulirkan Strategi dengan istilah Jaringan Pengaman Sosial (JPS) dengan empat program yang diliputi; Program Ketahanan Pangan (food security) yang diarahkan untuk menjamin ketersediaan bahan makanan dan terjangkau oleh masyarakat; Program Padat Karya dan menciptakan lapangan kerja produktif (employment creation) yang diarahkan untuk mempertahankan akses masyarakat pada fasilitas pelayanan sosial yang meliputi pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan; dan program pemberdayaan Ekonomi Rakyat melalui pengembangan industri kecil- menengah (support for small and medium enterprises) yang upayanya dilakukan melalui berbagai pelatihan, penyuluhan, bimbingan, bantuan promosi, kemitraan, dan bantuan permodalan.

Dari keempat program tersebut, maka sebagai implementasinya pemerintah telah melakukan berbagai kegiatan diantaranya adalah operasi pasar (OP), bantuan kesehatan (JPS-BK), bantuan pendidikan (JPS-BP), pemberdayaan daerah dalam mengatasi dampak krisis ekonomi (PDM-DKE), dan program pemberian makan tambahan anak sekolah (PMT-AS),

Aktivitas yang dilakukan oleh setiap program kegiatan tersebut juga relative banyak, seperti yang dilakukan oleh JPS-Bantuan Pendidikan, adalah disamping memberikan bea siswa kepada pelajar juga memberikan bantuan operasional pendidikan pada sekolah-sekolah. Demikian pula untuk program PDM-DKE, dimana di samping adanya kegiatan padat karya untuk mengatasi pengangguran sebagai akibat PHK, juga memberikan bantuan dana bergulir untuk kegiatan usaha masyarakat secara berkelompok.

Di Propinsi Riau adanya program JPS tersebut telah mampu mengatasi sebagian kesulitan yang dihadapi masyarakat, bahkan dalam beberapa hal Pemerintah Daerah baik pada tataran Propinsi maupun Kabupaten/Kota ikut memberikan dukungan melalui APBDnya walaupun dalam jumlah yang masih sangat terbatas.

Upaya mengatasi krisis ekonomi yang sampai saat ini masih berlanjut, sejalan dengan langkah-langkah strategi yang telah diambil oleh pemerintah adalah dengan melakukan 4 tahapan, yaitu: Tahap Penyelamatan (Rescue) yang diperkirakan memakan waktu satu sampai dua tahun; Tahap Pemulihan (recovery), yang sifatnya overlap dengan tahapan sebelumnya dan membutuhkan waktu satu sampai dua tahun juga; Tahap Pemantapan (stabilization) yang membutuhkan waktu sampai dua tahun; dan Tahap Pembangunan (development) yang dapat dimulai kembali apabila seluruh krisis telah dapat ditanggulangi dengan baik.

Apabila dicermati dari keempat tahap tersebut, maka pada saat sekarang upaya penanggulangan krisis ekonomi di Propinsi Riau telah memasuki tahap kedua, yakni dimana tahap dilakukannya upaya pemulihan (recovery). Dalam hal tersebut tampak dari berbagai implementasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah maupun pemerintah daerah dengan berupaya untuk melakukan menjaga stabilitas ekonomi melalui upaya menekan inflasi, mengendalikan kurs mata uang asing, menggagalkan investasi terutama yang bersal dari luar negeri dengan telah mulai melakukan promosi investasi (road show), mengatasi berbagai macam bentuk distorsi dalam distribusi barang, dan sebagainya. Kondisi tersebut adalah merupakan cerminan dan prospektif dari kondisi perekonomian yang secara perlahan telah menuju keupaya pemulihan, sekalipun kondisinya belum seperti pada saat sebelum krisis moneter terjadi.

2.2.5. Upaya Pemulihan Ekonomi

Krisis ekonomi yang melanda kehidupan masyarakat saat ini berawal dari hilangnya rasa kepercayaan terhadap kemampuan perekonomian. Hal itu dapat dilihat dari jatuhnya nilai mata uang rupiah yang mengakibatkan terhambatnya roda usaha dan perbankan sebagai urat nadi perekonomian daerah.

Kondisi yang tak menentu tersebut, mendorong pemerintah daerah untuk mencari solusi guna keluar dari krisis yang ada. Komitmen dan kepedulian pemerintah daerah terhadap pemulihan ekonomi daerah adalah kebijakan pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Kebijakan tersebut diarahkan dalam upaya mengatasi krisis ekonomi sekaligus pemulihan ekonomi daerah.

2.3. Kemiskinan dan pengangguran

2.3.1. Kondisi Umum

Berdasarkan ukuran ketimpangan relative adalah ketimpangan diantara berbagai golongan masyarakat yaitu antara 40 persen masyarakat yang berpenghasilan sedang, 20 persen masyarakat yang berpenghasilan tinggi, serta diperkuat dengan angka Indeks Gini.

Ketimpangan relatif untuk tahun 1997 dengan tahun 2000 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4 : Ketimpangan Relatif Pendapatan Penduduk Propinsi Riau Tahun 1997 dan Tahun 2000.

Tahun	Golongan	Prosentase pendapatan	Kreteria
1997	40% penduduk berpenghasilan rendah menerima	17,07	<i>Moderat inequity</i>
	40% penduduk berpenghasilan sedang menerima	42,09	
	20% penduduk berpenghasilan tinggi menerima	40,84	
2000	40 penduduk berpenghasilan rendah menerima	12,22	<i>Hight inequity</i>
	40% penduduk berpenghasilan sedang menerima	35,65	
	20% penduduk berpenghasilan tinggi menerima	52,13	

Sumber : Diolah

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa antara tahun 1997 dengan tahun 2000 telah terjadi distribusi pendapatan yang semakin tidak merata, dimana 40 persen penduduk yang berpenghasilan rendah menerima bagian yang semakin berkurang dari 17,07 % turun menjadi 12,22 % dari jumlah pendapatan nasional. Sebaliknya bagi 20 persen penduduk yang berpenghasilan tinggi telah menerima bagian yang semakin besar, yakni dari 40,84 % naik menjadi 52,13 % dari jumlah pendapatan nasional.

Sementara itu jika dilihat dari aspek pendapatan perkapita, maka untuk penduduk yang berada pada kelompok yang berpendapatan rendah pada tahun 1997 pendapatannya sebesar Rp 1.302.385,06 dan pada tahun 2000 turun menjadi Rp. 1.163.200,83 untuk penduduk yang berpenghasilan sedang pendapatan perkapita pada tahun 1997 adalah Rp 2.868.123,14 dan pada tahun 2000 meningkat menjadi Rp 3.799.511,19. demikian juga 20 persen penduduk yang berpenghasilan tinggi juga pendapatannya mengalami kenaikan hampir dua kali lipat yaitu dari sebesar Rp 5.565.912,64 pada tahun 1997 naik menjadi Rp 11.111.844,79 pada tahun 2000

Kondisi ini menggambarkan bahwa selama terjadinya krisis ekonomi telah terjadi kesenjangan yang semakin lebar antara mereka yang berpendapatan rendah dengan yang berpendapatan tinggi karena kenaikannya yang tidak propesional, dimana mereka yang berada pada kelompok berpendapatan tinggi mengalami kenaikan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang berada di kelompok berpendapatan rendah.

Sementara itu penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan pada tahun 1990 sebanyak 40,6 persen dari jumlah penduduk. Angka ini telah mengalami penurunan yang diperkirakan mencapai sebesar 9,6 persen pada tahun 1997 (sebelum terjadinya krisis). Namun setelah terjadinya krisis, yakni pada tahun 1998 jumlah kemiskinan absolut naik secara draktis menjadi 45,5 persen.

Sejalan dengan semakin bertambah tingginya ketimpangan distribusi pendapatan diantara golongan masyarakat serta semakin meningkatnya jumlah kemiskinan absolut, maka

seiring dengan itu terjadi pula peningkatan pengangguran ditengah masyarakat. Berdasarkan hasil SUSENAS tahun 2000, jumlah tenaga kerja telah mencapai 2.921.368 orang dari jumlah tersebut 1.751.910 oran atau 59,97 persen diantaranya adalah merupakan angkata kerja. Namun yang telah bekerja lebih dari 35 jam perminggu hanya sebanyak 538.208 orang atau 32,76 persen telah bekerja namun masih dibawah kapasitasnya yaitu kurang dari35 jam perminggu, kondisi ini mengisyaratkan adanya pengangguran tersembunya (*disguised unemployment*).

Selain dari itu masih terdapat sekitar 102.821 orang yang belum bekerja atau menganggur. Dengan demikian jumlah angkatan kerja yang bekerja dibawah kapasitasnya adalah 67,24 persen ditambah dengan yang menganggur 6,26 persen adalah 72,50 persen.

2.3.2. Permasalahan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran

Memperhatikan perkembangan yang terjadi selama ini di dalam perekonomian daerah, disamping dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, menghadapi sejumlah permasalahan dan tantangan yang dapat menghambat usaha pengentasan tersebut. Permasalahan yang utama terletak pada adanya ketimpangan struktur perekonomian daerah Riau yan mencakup:

1. Kesenjangan antara kabupaten/kota di Propinsi Riau
2. Kesenjangan antar sektor khususnya antar sektor industri dan sektor pertanian
3. Kesenjangan antara golongan baik dalam bentuk pendapatan perorangan maupun antar pelaku ekonomi khususnya antar dunia usaha, yang ditunjukkan oleh komposisi kepemilikan/penguasaan aset produksi oleh sebagian kecil kelompok usaha besar.
4. Adanya kemiskinan absolut yang semangkin meningkat sejak terjadinya krisis ekonomi
5. Rendahnya kualitas tenaga kerja yang menunjukkan bahwa 59,02 persen tenaga kerja berpendidikan sekolah Dasar atau lebih rendah, dan hanya sekitar 3,21 persen yang berpendidikan akademi atau perguruan tinggi.
6. Terbatasnya lapangan kerja yang dapat dilihat pada besarnya jumlah pengangguran.

2.3.3. Peluang Bagi Upaya Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran

Upaya pengentasan kemiskinan dan mengatasi pengangguran yang semagkin meningkat pada pasca terjadinya krisis ekonomi, harus dilakukan secara konseptual strategis agar tidak membawa inplikasi negatif yang akan semangkin memperparah kondisi. Untuk itu, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah memberdayakan ekonomi masyarakat yang berskala kecil – menengah secara berkelanjutan dengan memberikan peluang yang semangkin besar untuk dapat dengan mudah akses ke pasar, informasi, dan permodalan.

Pemberdayaan ekonomi rakyat disamping dapat memperluas dan mengembangkan usaha untuk meningkatkan produksi, juga akan membuka kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang akan berpengaruh terhadap kurangnya tingkat pngangguran dan akhirnya akan mengurangi jumlah kemiskinan relatif maupun kemiskinan absolut.

Dalam upaya memperbaiki tatanan stuktural perekonomian daerah, pemerintah telah membuka peluang yang sebesar-besarnya bagi pemerdayaan ekonomi rakyat. Hal ini secara tegas diamatkan dalam ketetapan MPR nomor XVI tahun 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka Demokrasi ekonomi yang juga memberikan arahan yang lebih tegas, tentang pemberian prioritas dan bantuan penganmbangan ekonomi rakyat.

Disamping ketetapan MPR trsebut, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang memberikan otonomi bagi daerah untuk melaksanakan berbagai bentuk kebijakan baik bersifat makro maupun spasial.

2.3.4. Strategi Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran

Memperhatikan kondisi, perkembangan serta berbagai permasalahan, tantangan, dan kendala yang dihadapi, maka upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran harus diarahkan untuk mendorong terjadinya perubahan secara struktural dalam perekonomian daerah Riau. Perubahan struktural tersebut meliputi proses perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi tangguh, dari ekonomi sub system ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke mandirian, dan dari ekonomi konglomeratasi menuju keekonomi rakyat.

Perubahan struktural ini mengisyaratka perlunya diambil langkah-langkah yang mendasar dan strategi dalam pengalokasian sumber dana, penguatan kelembagaan, penguasaan teknologi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Langkah-langkah strategis tersebut adalah berupa:

1. Mengupayakan terbukanya peluang dan akses yang lebih besar bagi pemilikan asset produksi oleh usaha skala kecil – menengah.
2. Memperkuat posisi tawar menawar (*bargaining position*) bagi usaha ekonomi rakyat sebagai prosedur dan penjual.
3. Mengembangkan kemitraan atas dasar saling menguntungkan, saling membutuhkan, dan saling mendukung antara usaha kecil - menengah dengan usaha besar.
4. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
5. Melaksanakan kebijakan pembangunan industri yang lebih diarahkan pada penguatan industri kecil dan rumah tangga.
6. Melaksanakan kebijakan ketenaga kerjaan yang mendorong tumbuhnya tenaga kerja mandiri dan cikal bakal lapisan wira usaha baru.
7. Meningkatkan upaya pemerataan pembangunan antar kabupaten/ kota mengingat kegiatan ekonomi rakyat tersebar diseluruh wilayah Riau.

2.3.5. Sasaran Penuntasan Kemiskinan dan Pengangguran

Berdasarkan distribusi pendapatan pada tahun 2000 dan target yang hendak dicapai pada tahun 2005 mendatang, maka dapat diketahui akan terjadi perbaikan pola distribusi pendapatan di dalam masyarakat dimana pada tahun 2005, 40 persen penduduk yang berpenghasilan rendah ditarget akan dapat menerima 20,12 persen dari total pendapatan atau naik 7,65 persen dari tahun 2000 dengan kenaikan pendapatan perkapita diperkirakan mencapai sebesar Rp.2.668.755,51 yang sebelumnya hanya sebesar Rp 1.163.200.83

Tabel 2.5 : Distribusi Pendapatan Menurut Golongan Tahun 2000 – 2005 (dalam Persen)

Golongan	2000	2005
- 40% Penduduk berpenghasilan Rendah menerima	12,22	20,17
- 40 % Penduduk berpenghasilan sedang menerima	35,65	46,35
- 20% Penduduk berpenghasilan tinggi menerima	52,13	33,53
- Indek Gini Ratio	0,5400	0,3510

Sumber: Diolah

Menyangkut dengan kesempatan kerja yang erat kaitanya dengan laju pertumbuhan ekonomi yang direncanakan sebesar 5,76 persen. Dengan elastisitas kesempatan kesempatan kerja sebesar 0,77 maka kesempatan kerja diperkirakan akan tumbuh rata-rata sekitar 4,45 persen setahun.

Dengan demikian jumlah kesempatan kerja akan naik dari sebanyak 1.649.089 orang pada tahun 2000 akan naik menjadi 2.050.153 orang pada tahun 2005 atau bertambah sekitar 401.064 orang.

2.4. Konflik Sosial dan Kerusuhan Massa

Krisis ekonomi yang berkepanjangan telah membawa dampak yang negatif bagi kehidupan masyarakat. Salah satu dari dampak negatif tersebut adalah tingginya tingkat pengangguran karena pemutusan hubungan kerja sebagai akibat memburuknya kondisi ekonomi.

Selain itu, yang kalah penting adalah konflik sosial yang terjadi di setiap daerah kabupaten/kota yang ada di Riau. Konflik biasanya melibatkan pertentangan kedua belah pihak atau lebih mengenai distribusi ekonomi, politik dan sumber daya alam maupun identitas (SARA).

Tiga jenis konflik di atas sangat rentan bahkan sering terjadi di daerah Propinsi Riau. Hal itu dapat dilihat pada peristiwa penyerobotan tanah rakyat oleh perusahaan tanpa ganti rugi, penyakit masyarakat (judi, prostitusi dan narkoba) yang tak kunjung selesai, terjadinya kesenjangan sosial ekonomi antara masyarakat tempatan dengan pendatang yang memicu munculnya konflik SARA, termaksud konflik politik yang memicu terjadinya tindakan kekerasan, teror, amuk massa dan anarkis.

2.5. Lemahnya Penegakan Hukum

Supermasi hukum dan pemerintahan yang baik dan bersih merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu pelaksanaan tugas pelayanan umum dan pembangunan bagi masyarakat dan daerah Propinsi Riau. Akan tetapi, dalam perkembangannya, proses penegakan hukum di daerah ini belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Terjadinya mafia peradilan dalam kasus-kasus public, adalah bukti nyata dari lemahnya penegakan hukum, merupakan konsekuensi dari gambaran ketidak-sungguhan dan rendahnya sikap disiplin, komitmen serta tanggung jawab moral aparat penegak hukum dalam menjalankan hukum.

Berbagai kasus-kasus publik yang menuntut perhatian aparat penegak hukum belum sepenuhnya dijalankan dengan maksimal. Hal itu dapat dilihat pada kasus kriminalitas, perjudian, prostitusi, dan narkoba, sehingga mengganggu rasa keamanan dan ketertiban masyarakat.

Permasalahan pokok yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1. hukum sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh mencakup segenap bidang pembangunan, sehingga untuk melaksanakan fungsinya secara efisien dan produktif perlu pembunaaan hukum dikaitkan secara langsung dengan berbagai kebijaksanaan disegenap bidang pembangunan, agar kerangka hukumnya dapat dimantapkan sebagai pemberian pedoman dan arah bagi pembangunan ekonomi dan perkembangan social budaya lebih lanjut.
2. Hukum sebagai alat penegak ketertiban perlu lebih ditingkatkan karna tanpa ketertiban dan kepastian, kehidupan masyarakat yang teratur tidak mungkin terselenggara.
3. Hukum sebagai pemberi keadilan memerlukan pembinaan keadilan yang tetap dan untuk menyelenggarakan hal tersebut, semata-mata untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pencari keadilan dalam negara hukum.
4. Khusus dalam menetapkan keputusan pidana, aparat penegak hukum harus berpegang teguh kepada norma-norma hukum dan peraturan yang berlaku serta memperhatikan system permasyarakatan yang bersifat mendidik dan manusiawi.
5. Permasalahan dalam penyelenggaraan administrasi urusan hukum guna kepentingan umum terletak pada bidang perizinan dan pengawasan yang proses pelaksanaannya akan memerlukan penyempurnaan dan penyederhanaan. Dalam usaha ini perlu sekaligus dihilangkan hambatan sehingga setiap warga negara berhak mendapatkan kedudukan dalam hukum.

Permasalahan tersebut di atas secara kenyataan bersifat nasional dan hal ini harus segera dilakukan perbaikan disegala bidang untuk melakukan dan menciptakan ketertiban masyarakat dan proses penegakkan hukum.

2.6. Lemahnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah

Hikmah yang dapat dipetik dari gerakan Reformasi dan implementasi otonomi daerah adalah terjadinya pergeseran paradigma model dan struktur pemerintah yang sebelumnya sangat sentralistik, represif dan non partisipatif menjadi desentralistik, transparan dan demokratis.

Memang, selama ini kita sadari bahwa kinerja aparatur pemerintah daerah jauh dari optimal. Rendahnya sikap disiplin, rendahnya produktivitas, lemahnya kualitas SDM (aparatur birokrasi), kurang profesional, dan masih kuat institusi pelayanan public yang berorientasi keatas (pusat) dari pada ke bawah (daerah), adalah bukti nyata bahwa institusi tersebut (birokrasi) belum mampu menunjukkan diri sebagai institusi netral dalam pelayanan public.

Oleh karena itu, kelemahan kelembagaan (birokrasi) dan aparatur pemerintah adalah pelayanan public adalah agenda utama yang harus diatasi demi memenuhi prasyarat terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good governance) yang didalamnya mengandung prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, demokratis dan penegakan supremasi hukum.

BAB III

Visi, Misi, serta arah kebijakan, Dan Prioritas Daerah

3.1. Misi pembangunan daerah

Berdasarkan potensi dan kondisi yang terdapat dalam masyarakat Propinsi Riau, maka misi pembangunan daerah adalah “Terwujudnya Propinsi Riau Sebagai Pusat Perekonomian dan kebudayaan melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejatera lahir dan batuin, di Asia tenggara tahun 2020”.

3.2. Misi pembangunan daerah.

Guna mewujudkan dan merealisasikan visi pembangunan daerah propinsi riau, maka ditetapkan misi pembangunan daerah sebagai berikut:

Mewujudkan masyarakat riau yang beriman dan bertaqwa, berkualitas, sehat, cerdas, terampil dan sejatera serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Meningkatkan peran lembaga pendidikan sekolah maupun luar sekolah guna membentuk karakter, moral dan etika masyarakat yang agamis.

Meningkatkan pelaksanaan penegakan supremasi hukum dan hak azasi manusia serta kehidupan demokratis, Guna terciptanya masyarakat yang memadai.

Mewujudkan dan meningkatkan pembangunan imfrastruktur ekonomi, social, polotik dan budaya agar tercipta dan terlaksan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, peningkatan kelembagaan masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah.

Meningkatkan pembinaan industri perdagangan dan jasa yang maju didukung oleh agro industri dan agro bisnis.

Mengoktimalkan mengelolah sumner daya alam kesejateraan rakyat melalui pembangunan daerah yang berkelanjutan dan kerwawasan lingkungan.

Meningkatkan hubungan kerja sama antar daerah propinsi, antar kabupaten dan kota dalm propinsi Riau serta luar negri dalam segala bidang.

Membina dan mengembangkan budaya melayu yang mampu mengikuti perkembangan jaman dengan tidak menghilangkan jati diri, sehingga tercipta masyarakat Melayu yang maju, mandiri dan mampu bersaing.

Mewujudkan dan meningkatkan fungsi manajemen pemerintahan daerah, pembentukan sikap kemandirian masyarakat yang memiliki jiwa wira – usaha sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, baik dan berwibawa (Clean Government and good Governmance).

3.3. Arah kebijakan

Pembangunan daerah diselenggarakan secara bertahap dalam jangka pajang dan menengah 5 tahunan, dalam pelaksanaannya mendaya gunakan seluruh sumber daya daerah untuk mewujudkan pembangunan daerah terutama diperhatikan adalah azas kemandirian, yaitu bahwa pembangunan daerah berlandaskan kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri serta bersendikan keberibadian bangsa. Azas manfaat menghendaki bahwa segala usaha dan kegiatan pembanguna daerah memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejateraan masyarakat, pengembangan pribadi warga Negara, yang mengutamakan kelestarian nilai-nilai budaya daerah dan pelestarian fungsi daerah lingkungan hidup dalam rangkah pembangunan berkesinambungan dan berkelanjutan.

Sejalan dengan proses reformasi, demokrasi, termaksud tuntutan otonomi daerah yang luas, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemampuan dalam menangani permasalahan sebagai berikut:

1. Kesenian antar daerah, antar kota dan desa, antara golongan masyarakat dalam hal pendapatan
2. Kesenjangan antar pusat dan daerah dalam hal pembagian pendapatan.
3. Isu-isu internasional seperti globalisasi, kerja sama ekonomi sub regional, perdagangan bebas, lingkungan dan sebagainya
4. Kesenjangan pembangunan antar sektor
5. Kesenjangan pembangunan fisik dan non fisik
6. Permasalahan pemerintah daerah yang semakin kompleks baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan harus dapat ditangani secara spesifik oleh pemerintah daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan meliputi upaya-upaya sebagai berikut:

1. Mewujudkan manajemen pemerintahan daerah yang baik, yang arahnya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah yang profesional, produktif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik lokal, maupun internasional. Hal ini sesuai dengan tuntutan public local maupun internasional terhadap pemerintah daerah maupun mengedepankan prinsip *clean government and good governance*
2. Membangun landasan ketahanan budaya Melayu, dimana disamping merupakan tujuan sekaligus juga merupakan sarana untuk membangun kesejahteraan rakyat yang dilandasi iman dan taqwa.
3. Membangun kesejahteraan dan ketahanan ekonomi daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan, upaya ini dimaksudkan untuk membangun ketahanan ekonomi kerakyatan yang dapat menunjang komoditas unggulan daerah Riau di sub sektor perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, tanaman pangan, hortikultura, dan pengembangan industri rumah tangga maupun program *one village one product*, di samping pembinaan dan pengembangan koperasi, pengusaha kecil dan menengah.
4. Memberdayakan masyarakat, melalui peningkatan kemampuan masyarakat dan menciptakan iklim yang kondusif, guna mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dalam memasuki era globalisasi.

Dalam kaitannya dengan pembangunan bidang keuangan daerah, diarahkan pada kemampuan dan profesionalisme keseluruhan dari tatanan perangkat, kelembagaan dan kebijakan keuangan dalam menunjang kesustainability pembangunan dan peningkatan kemandirian daerah melalui tuntutan pembangunan, penciptaan suasana yang mendorong timbulnya inisiatif dan kreativitas masyarakat, serta meluasnya peran serta masyarakat, serta meluasnya peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui upaya kerja untuk terus meningkatkan tabungan pemerintah daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Kebijakan dalam bidang keuangan daerah, tetap didasarkan pada prinsip anggaran berimbang dan dinamis dengan memungkinkan dibentuknya dana cadangan yaitu penerimaan melebihi pengeluaran. Penerimaan terus diupayakan peningkatannya dengan penggali sumber-sumber penerimaan baru yang berasal dari pajak dan sumber lainnya, dengan tetap memperhatikan kemampuan daerah diusahakan secara cermat berdasarkan prioritas untuk memberikan dampak yang sebesar-besarnya bagi pembangunan.

3.4. Strategi Kebijakan

3.4.1. Strategi jangkang panjang

Strategi pembangunan daerah Riau, sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Menumbuhkan semangat pematapan keimanan dan ketaqwaan serta memperkokoh toleransi antar umat beragama.
2. Mengembangkan mutu pendidikan sebagai upaya peningkatan kemampuan penguasa dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Meningkatkan mutu dan etos kerja sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam persaingan global.
4. Melakukan penggalan, pengkajian dan mutakhirkan nilai-nilai kebudayaan Melayu secara terpadu dan berkesinambungan yang mendukung kemajuan pemberdayaan rakyat.
5. Meningkatkan kesadaran berbudaya melayu dalam upaya menangkal budaya luar (Asing) yang negative dalam rangka mewujudkan jati diri daerah dan bangsa,
6. Melaksanakan pembangunan ekonomi kerakyatan dengan penekanan sektor unggulan secara terpadu dan sinergi antar sektor maupun antar wilayah.
7. Memantapkan otonomi daerah nyata dinamis dan bertanggung jawab yang di dukung oleh aparat pemerintah yang handal, profesional, transparan dan akuntabel.
8. Membangun instruktur untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
9. Menegakan hukum dan hak azasi manusia untuk menciptakan demokratisasi dan keadilan.
10. Mewujudkan dan meningkatkan penyelesaian tata batas wilayah propinsi, kabupaten/kota hingga tidak menimbulkan kerawanan sosial.

3.4.2. Strategi Jangka Pendek

Strategi jangka pendek pembangunan tahun 2001-2003 Propinsi Riau adalah pengembangan 5 (lima) pilar pembangunan, yang substansinya sebagai berikut:

- Pembangunan dalam rangka meningkatkan iman dan taqwa.
- Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia
- Pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan
- Pembangunan kesehatan dan olahraga
- Pembinaan dan pengembangan kebudayaan.

Selain strategi tersebut diatas, untuk dapat memberikan hasil yang optimal dalam mencapai pembangunan, maka pengembangan pada 5 (lima) pilar tersebut dituangkan dalam program-program penunjang sebagai berikut :

1. pembinaan dan pengendalian penataan ruang, pertanahan, kependudukan dan lingkungan hidup.
2. pembinaan dan pengembangan supervisi hukum, aparat politik keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. pembinaan dan pengembangan komunikasi, informasi media massa.

3.5. Prioritas Daerah

3.5.1. Memperkuat Institusi Pasar

Langkah ini dimaksudkan agar mekanisme pasar mencakup pasar barang, pasar modal, tenaga kerja, uang dan informasi, dapat berjalan semakin baik. Dengan demikian sumber daya pembangunan yang terbatas dapat teralokasi secara optimal. Oleh karena itu, perlu diambil langkah-langkah seperti penghapusan seluruh hambatan yang mengganggu terwujudnya mekanisme pasar yang sehat, peraturan kelembagaan yang mengatasi pemusatan kekuatan ekonomi, kekuatan kelembagaan pelaku ekonomi.

3.5.2. Pemberdayaan Pengusaha Kecil Menengah Dan Koperasi

Terutama menciptakan iklim perusahaan yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya bagi usaha kecil menengah dan koperasi. Bantuan terhadap UKM dan koperasi

diberikan secara selektif yang sesuai dengan mekanisme pasar terutama dalam bentuk penyediaan pendidikan, permodalan dan pelatihan, informasi bisnis, teknologi, akses permodalan dan lokasi usaha, serta mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan saling menguntungkan.

3.5.3. Mengembangkan Sistem Ketahanan Pangan

Disamping meningkatkan produksi pangan, langkah yang diambil mencakup penganekaragaman pangan. Langkah yang dilakukan tidak terbatas pada peningkatan konsumsi pangan dengan gizi yang seimbang namun diperluas kendala perencanaan produksi dan pemasaran dengan menyempurnakan aspek kelembagaan pangan dalam arti luas dan meningkatkan kapasitas para pelaku.

3.5.4. Mengembangkan Tenaga Kerja

Langkah pokok yang diambil dalam meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta meningkatkan perlindungan pembelaan dan kelembagaan tenaga kerja dalam meningkatkan kompetisi dan kemandirian serta kesejahteraan tenaga kerja dan memperbanyak serta memperkuat kesempatan kerja, khususnya bagi tenaga kerja tempatan.

3.5.5. Mengentaskan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan diberbagai bidang yang ditandai dengan tingkat pengangguran yang tinggi, keterbelakangan, dan keterpurukan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatasnya akses kegiatan sosial ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lain yang mempunyai potensi yang lebih tinggi. Kemiskinan menghambat tercapainya demokrasi, keadilan dan persatuan. Oleh karena itu, pengentasan kemiskianan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Karena itu, langkah-langkah yang diambil adalah penyediaan kebutuhan pokok untuk keluarga miskin, pengembangan budaya usaha masyarakat miskin, pengembangan keswadayaan masyarakat miskin.

Selain langkah-langkah sebagai mana yang telah diterapkan diatas diperlukan langkah-langkah penunangan yang peranannya sangat besar dalam rangkai percepatan pembangunan.

3.5.6. Penyusunan Master Plan Riau 2020

Master plan Riau 2020 di maksud akan menjadi pedoman operasional utama perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Propinsi Riau ke depan sampai tahun 2020, dengan sekuen waktu 5 (lima) tahunan. Dalam kajian tersebut akan di analisa dan dirumuskan Kebijakan Operasional Pokok jangka panjang secara menyeluruh, yang meliputi aspek- aspek ; tata ruang, sumber daya ekonomi dan penguatan ekonomi daerah, sumber daya manusia, budaya melayu, infrastruktur, teknologi informasi, sarana dan prasarana dasar, energi, pemerintahan yang baik dan kehidupan demokrasi, penegakan hukum dan hak azazi manusia, lingkungan hidup dan konvensi, kependudukan serta aspek lingkungan strategis dalam konteks kerjasama antar daerah, kerjasama antar propinsi Se- Sumatra, Indonesia dan luar negeri.

3.5.7. Program pembangunan Sarana dan Organisasi Pusat Promosi Sumatra di Batam atau Sumatra Promotion Centre (dikoordinir Propinsi Riau)

3.5.8. Pembangunan Sistem Jalan Kereta Api Sumatra atau Sumatra Rail Ways (dikoordinir Propinsi Lampung)

3.5.9. Pengembangan Intekoneksi Listrik dan Pembangkit Tenaga Listrik se-Sumatra Electric and Power Interconnections (dikoordinir Propinsi Sumatra Barat).

3.5.10. Program lainnya seperti penanganan permasalahan wilayah perbatasan, hibah saham BUMN di daerah, pengembalian dana reboisasi dan penghijauan untuk pengawasan dan konservasi dan sistem pengamanan laut dan pantai (dikoordinir secara bersama oleh beberapa propinsi).

Sejalan dengan Agenda Sumatra dan Rencana Strategis Sumatra 2001-2005 tersebut, akan didukung oleh kegiatan program-program daerah secara tepat melalui:

- a. Perencanaan Pengembangan **Riau online, Kabupaten/kota online.**
- b. Perencanaan pengembangan **Riau Airline, Riau Shipping Lines, Riau Railways, Riau Feeder Road.**
- c. Perencanaan interkoneksi listrik propinsi dan kabupaten/ kota, dalam antisipasi **Sumatra Elektrik and power interkoneksi.**
- d. Penggunaan Senior Official Advisor.
Untuk memberikan masukan dan membantu Pemerintah Propinsi dalam bidang perencanaan dan pengembangan perekonomian dalam daerah serta berperan sebagai pelobi, dalam program kerjasama luar negeri, maka ditetapkan tenaga *International Senior Advisor.*
- e. Pembentukan Badan Usaha Daerah
Untuk mendukung pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan, perlu di bentuk badan usaha yang relevan daengan pelaksanaan ekonomi yang berbasis kerakyatan.

Tabel 3.1 : Rencana Anggaran Pembangunan Propinsi Riau Tahun 2001-2005 (Jutaan Rupiah)

No	Program Pembangunan	Jumlah
1	Pembangunan Dalam rangka meningkatkan Iman dan Taqwa	249.524,26
2	Pembinaan Pengembangan SDM	1.626.771,20
	a. Pendidikan	1.294.245,60
	b. Tenaga Kerja	152.059,93
	c. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	86.223,57
	d. Pemberdayaan Perempuan, anak dan remaja	59.732,10
	e. Pemuda	34.500,00
3	Pembangunan Ekonomi Berbasis Kerakyatan	2.523.267,01
	a. Industri	31.051,28
	b. Pertanian, Kelautan dan Kehutanan	689.227,76
	c. Perdagangan, Pengembangan UKM/Koperasi	193.801,36
	d. Pertambangan, Energi dan Kelistrikan	19.949,55
	e. Kepariwisata dan Telekomunikasi	10.373,58
	f. Transportasi, Perumahan dan Permukiman	1.578.863,42
4	Pembangunan Kesehatan dan Olahraga	781.415,20
	a. kesehatan	623.561,40
	b. Olahraga	157.853,80
5	Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan	431.415,20
6	Penunjang	1.520.497,45
	a. Pembinaan dan Pengendalian Penataan Ruang, Pertahanan Kependudukan & Lingkungan Hidup	479.682,33
	b. Kesejahteraan Sosial	85.500,00
	c. Pembinaan dan Pengembangan Supermasi, Hukum Aparatur, Politik, Keamanan dan Ketertiban	641.903,45
	d. Pembinaan dan Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa	313.411,67
Jumlah Anggaran Pemerintah		7.133.490,32
Investasi Masyarakat		17.721.429,68
Jumlah		24.854.920,00

BAB IV

Program dan Kegiatan Prioritas Tiga Tahunan Daerah

4.1. Pembangunan Dalam Rangka Meningkatkan Iman dan Taqwa

1. Umum

Pembangunan dalam rangka peningkatan iman dan taqwa pada dasarnya adalah sebagai salah satu bentuk upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan akan keyakinan sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pembangunan dalam aspek ini sangat terkait dengan nilai-nilai keagamaan yang di anut oleh setiap manusia.

Untuk itu agama seharusnya menjadi landasan bagi pemeluk-pemeluknya dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun fenomena yang muncul, agama hanya sebagai di jadikan landasan beribadah untuk menuju ke kehidupan yang kekal diakhirat, dan hal itu belum memperlihatkan tingginya keimanan dan ketaqwaan masyarakat, sebab agama belum secara optimal digunakan untuk menata kehidupan manusia dalam berbagai aspek, sehingga berbagai penyakit masyarakat seperti korupsi, kriminalitas, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, dan perilaku menyimpang yang melanggar moralitas, etika, dan kepatuhan, masih sering terjadi. Hal ini merupakan gambaran terjadinya kesenjangan antara perilaku formal keagamaan dengan perilaku kehidupan keseharian dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Arah Kebijakan

Pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki iman dan taqwa dilakukan dengan :

- a. Meningkatkan pendidikan agama melalui sekolah, keluarga, dan masyarakat.
- b. Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, semarak, dan mendalam dalam masyarakat.
- c. Meningkatkan bantuan penyediaan sarana dan prasarana kehidupan beragama, baik melalui dukungan pemerintah maupun masyarakat.
- d. Meningkatkan kerukunan umat beragama, dengan cara pengembangan iklim dan suasana yang kondusif bagi terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Meningkatkan kesadaran umat beragama guna membentuk akhlak dalam rangka pemberantasan penyakit masyarakat meliputi kriminalitas, prostitusi, narkoba dan judi.
- f. Peningkatan penghayatan dan pelaksanaan syiar agama.

3. Program Pembangunan

Untuk melaksanakan pembangunan keagamaan di Propinsi Riau, perlu di perhatikan program-program sebagai berikut :

- a. Program peningkatan sarana kehidupan beragama dengan kegiatan :
 1. Menunjang pembangunan rumah ibadah
 2. Pembangunan/Renovasi mesjid sebagai pusat pengembangan Islam (*Islamic centre*)
 3. Pengembangan Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Madrasah
 4. peningkatan bantuan sarana dan prasarana ibadah haji.
- b. Program bimbingan, penyuluhan dan pendalaman, dengan kegiatan :
 1. Pelatihan Da'i motivator pembangunan
 2. Penyuluhan terpadu dalam memberantas maksiat
 3. Pelaksanaan MTQ
- c. Program pembinaan kerukunan umat beragama, dengan kegiatan :
 1. Temu tokoh antar agama

2. Dialog antar umat beragama
3. Pembinaan dan pengembangan seni budaya keagamaan.
- d. Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama, dengan kegiatan :
 1. Peningkatan pelayanan ibadah haji
 2. Pemantapan pelayanan ibadah haji TPHD dan TKHD
 3. Peningkatan pelayanan kesehatan di embarkasi haji
 4. Pembinaan dan Pengembangan lembaga/badan zakat, infaq, wakaf dan sedekah (BAZIS)
 5. Pembinaan dan peningkatan lembaga/badan pelayanan keagamaan.
- e. Program Peningkatan kualitas pendidikan agama, dengan kegiatan :
 1. Pembangunan pesantren Teknologi
 2. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan
 3. Pengadaan buku pelajaran pokok siswa, pegangan guru, buku bacaan muatan lokal, dan perpustakaan lokal, dan perpustakaan alat bantu pelajaran Pondok Pesantren, MDA, MDW, MDU, dan TPA.

4.2. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

4.2.1. Pendidikan

1. Umum

Untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, maka aspek pendidikan adalah merupakan yang sangat penting dan merupakan yang sangat penting dan bersifat strategis. Aspek pendidikan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah seluruh bentuk pendidikan baik melalui jalur sekolah maupun jalur luar sekolah pada semua jenjang dan tingkatan mulai dari pra sekolah hingga pendidikan tinggi.

Perkembangan pendidikan sampai tahun ajaran 2000/2001 dapat dilihat bahwa jumlah murid SD +MI negeri dan swasta adalah 731.420 orang dengan jumlah guru sebanyak 28.066 orang. Jika dilakukan perbandingan, maka diketahui bahwa perbandingan adalah 1 : 26, angka ini menunjukkan bahwa satu orang guru menangani 26 orang murid, rasio ini masih tergolong baik.

Pada jenjang SLTP/ Mts, jumlah murid kedua mencapai 253.680 orang yang ditampung pada 499 sekolah dengan kapasitas 4.886 ruang belajar dengan jumlah gurunya sebanyak 12.917 orang.

Pada jenjang pendidikan SLTA/SMK/MA, jumlah siswa SMU lebih besar dibandingkan dengan jumlah murid SMK, yaitu 3 : 1 atau 122.621 : 37.225 murid. Perbandingan ini bermakna bahwa masih rendah minat siswa-siswa untuk memasuki SMK.

2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan pendidikan adalah :

- a. Mengupayakan pembinaan dan pengembangan lembaga pendidikan usia dini dengan melaksanakan wajib belajar sembilan tahun.
- b. Meningkatkan kemampuan akademik dan professional serta kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan.
- c. Melakukan pembaruan pengembangan sistem pendidikan, termasuk kurikulum muatan lokal, yang lebih menekankan pada pendidikan *science* yang bernuansa religius.
- d. Memberdayakan lembaga pendidikan dalam dan luar sekolah sebagai pusat kegiatan belajar.
- e. Melakukan pemantapan pembinaan pendidikan berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi, keilmuan dan manajemen.

- f. Meningkatkan kuantitas dan kualitas lembaga pendidikan.
- g. Meningkatkan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Science dan technology*) yang sesuai dengan nilai agama dan kebudayaan Melayu.
- h. Meningkatkan dan membantu pendidikan tinggi.
- i. Meningkatkan hubungan dengan usaha dan dunia industri serta menggalakkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

3. Program Pembangunan

Program pendidikan dan kegiatan daerah Propinsi Riau disusun sebagai berikut :

- a. Program pendidikan Dasar, Sekolah Luar Biasa, dan Prasekolah, dengan kegiatan:
 - 1. Revitalisasi dan rehabilitasi pembangunan gedung SD/MI.
 - 2. Pembangunan sarana SLTP kecil dan revitalisasi serta SLTP reguler.
 - 3. Peningkatan manajemen skill training bagi kepala sekolah dan calon kepala sekolah.
 - 4. Penerapan pola pembelajaran kooperatif
 - 5. Bantuan kesejahteraan guru MDA dan MTs
 - 6. Pelatihan penyeteraan dan pengadaan modul untuk D-II GPAI, SD/MI
 - 7. Pengadaan buku pelajaran pokok siswa, pegangan guru, bacaan muatan lokal dan perpustakaan, alat bantu pelajaran pada MDA, SD/MI, SLTP/MTs.
 - 8. Pemberian bea siswa bagi anak SD/MI, SLTP/MTs yang kurang mampu, akan tetapi memiliki bakat, minat dan prestasi.
 - 9. Pengadaan prasarana penunjang dan alat peraga IPA dan IPS SD/MI, SLTP/MTs.
 - 10. Peningkatan prasarana dan sarana fisik pendidikan dasar, sekolah luar biasa dan prasekolah.
 - 11. Meningkatkan kualitas guru dalam proses PBM melalui guru TOT mata pelajaran umum dan agama serta penyelenggaraan pendidikan guru pendidikan dasar.
- b. Program pendidikan menengah dan kejuruan, dengan kegiatan :
 - 1. Pembangunan sarana dan prasarana SMU, UGB SMK serta pengadaan meubeler dan perlatan UGB.
 - 2. Bantuan beasiswa pendidikan bagi siswa SMU/MA dan SMK kurang mampu, akan tetapi memiliki bakat, minat dan prestasi.
 - 3. Peningkatan prasarana fisik pendidikan menengah dan kejuruan
 - 4. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan guna meningkatkan mutu sekolah dan kejuruan.
 - 5. Peningkatan mutu guru kependidikan menengah dan kejuruan.
 - 6. Peningkatan lomba Iuptek dan Ilmu terapan tingkat DMU/MA , SMK.
 - 7. Pembangunan dan pengembangan Sekolah Unggulan, Plus, Model, dan Binaan.
- c. Program Pembinaan dan Pengembangan pendidikan tinggi, dengan kegiatan :
 - 1. Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur.
 - 2. Bantuan dan pengembangan pendidikan tinggi negeri/swasta.
 - 3. Peningkatan kualitas tenaga pengajar/dosen.
- d. Program Pembinaan Pendidikan non formal dan Luar sekolah, perpustakaan dan pengembangan IPTEK, dengan kegiatan:
 - 1. Pengadaan buku pelajaran pokok siswa, pegangan guru, bacaan muatan lokal, perpustakaan, alat bantu pelajaran/ alat peraga.
 - 2. Peningkatan jangkauan pelayanan warga belajar paket A dan B.
 - 3. Pengadaan buku bacaan, kelengkapan dan pengembangan perpustakaan.

4. Pembinaan IMTAQ guna pemberantasan penyakit masyarakat, termasuk pelajar dan mahasiswa.
 5. Pengembangan sarana dan prasarana balai teknologi dan pelatihan pendidikan.
 6. Peningkatan lomba ilmu pengetahuan dan teknologi, serta ilmu terapan tingkat Pondok Pesantren.
- e. Pembaharuan dan Pengembangan kurikulum muatan lokal, dengan kegiatan :
 1. Pengkajian materi muatan lokal.
 2. Workshop pembuatan desain kurikulum lokal.
 - f. Program perencanaan dan pengawasan jaringan kerjasama pendidikan dan pengembangan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, dengan kegiatan :
 1. Menyusun database dan program pendidikan.
 2. Pengawasan mutu pendidikan.
 3. Peningkatan kerjasama bidang pendidikan baik dalam maupun luar negeri.
 4. Pengembangan dan pembinaan partisipasi masyarakat/dunia usaha di bidang pendidikan.
 - g. Program pengadaan tenaga dan peningkatan kualitas guru, dengan kegiatan :
 1. Inventarisasi dan kebutuhan riil guru SD, SLTP dan SMU.
 2. Penyetaraan Mutu dan kualitas guru.
 3. Tugas belajar dan ikatan dinas.
 4. Latihan manajemen sekolah.

4.2.2. Tenaga Kerja

1. Umum

Masalah tenaga kerja di Riau merupakan masalah yang rumit dan belum dapat terpecahkan secara baik. Banyak perusahaan industri besar yang berdiri di Riau belum menjamin teratasinya masalah pengangguran sehingga sampai saat sekarang di Riau masih terdapat pengangguran sebanyak 12,46 %.

Sejalan dengan pertumbuhan industri di Riau, banyak migrasi tenaga kerja yang datang ke Riau. Kondisi ini secara tidak langsung telah merebut peluang kerja bagi penduduk lokal, oleh karena sejumlah “stigma” melekat pada tenaga kerja lokal diantaranya etos kerja yang rendah, malas, dan sebagainya.

Persaingan terjadi tidak saja dengan pekerja yang berasal dari dalam negeri. Tetapi juga dengan yang berasal dari luar negeri. Hal ini terjadi karena Riau berbatasan dengan negara tetangga, seperti Singapura Malaysia. Kondisi seperti di atas dapat menyebabkan kecemburuan sosial yang mengarah kepada konflik horizontal antara penduduk lokal dan pendatang. Masalah lain yang juga selalu muncul adalah hak-hak normatif pekerja yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi tenaga kerja.

2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pelaksanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan adalah :

- a. Penyusunan rencana tenaga kerja tingkat Propinsi dan Kabupaten
- b. Penyusunan dan pengembangan sistem informasi pasar kerja, serta pengembangan bursa kerja swasta melalui on line system.
- c. Perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja lokal.
- d. Pempaerdayaan dan Optimalisasi sumber daya pelatihan.
- e. Pelatihan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.
- f. Penempatan dan perlindungan tenaga kerja ke luar negeri.
- g. Implementasi hubungan industrial dan kebebasan berserikat.
- h. Perlindungan dan pengawasan norma ketenagakerjaan.
- i. Penyempurnaan sistem pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja.

- j. Mengembangkan kerjasama antar instansi pemerintah dan swasta dalam rangka pengembangan tenaga kerja.

3. Program Pembangunan

- a. Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, dengan kegiatan :
 1. Peningkatan keterampilan tenaga kerja institusional dan permagangan.
 2. Pengembangan Balai Latihan Ketenagakerjaan.
- b. Program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja, dengan kegiatan :
 1. Peningkatan kesempatan dan perluasan lapangan kerja ke luar negeri.
 2. Perencanaan tenaga kerja dan pengembangan informasi tenaga kerja.
 3. Pendayagunaan tenaga kerja dan pengembangan informasi tenaga kerja.
- c. Program perlindungan dan pengembangan tenaga kerja, dengan kegiatan :
 1. Pengembangan hubungan industri.
 2. Pengembangan perlindungan tenaga kerja.
 3. Peningkatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

4.2.2. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

1. Umum

Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan tumpuan untuk mencapai kemajuan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Ini berarti ilmu pengetahuan dan teknologi mempercepat lajunya pembangunan daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik melalui pendidikan dan pelatihan, akan meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas pembangunan.

Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan untuk kemajuan tingkat kecerdasan masyarakat, mengembangkan kemampuan bangsa serta ikut serta mendorong proses pembaharuan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Persaingan antar bangsa yang semakin ketat, serta dampak arus globalisasi yang semakin luas. Menurut pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih tepat. Cepat dan cermat serta bertanggung jawab agar mampu memacu pembangunan menuju terwujudnya masyarakat yang mandiri, maju dan sejahtera.

2. Arah Pembangunan.

- a. Mengoptimalkan pengembangan sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan daerah secara cepat, tepat, dan akurat.
- b. Pemuktahiran dan pemanfaatan data dan statistik bagi perencanaan pembangunan daerah.
- c. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, dan menengah serta koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis lokal.

3. Program Pembangunan

Program penelitian dan pengembangan (*Research and Development*) ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan kegiatan :

- a. Bidang ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bidang lainnya sebagai dasar pembuatan kebijakan dan perencanaan pembangunan.
- b. Pengembangan sistem jaringan dan Teknologi Manajemen IPTEK dalam berbagai aspek guna peningkatan kualitas dalam pembuatan kebijakan dan perencanaan pembangunan.

4.2.3. Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja

1. Umum

Pengembangan sumber daya manusia mencakup pada pengembangan sumber daya insan wanita, anak dan remaja sebagai sumber daya sekaligus subjek pembangunan. Peningkatan kualitas sumber daya wanita, anak dan remaja sangat berpengaruh terhadap upaya pembinaan unsur masyarakat terkecil yaitu keluarga.

Berbagai upaya pembangunan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan telah dilakukan, namun masih dijumpai berbagai ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam hal peluang dan akses terhadap sumber daya pembangunan, kontrol atas pembangunan, serta memperoleh manfaat atas hasil-hasil pembangunan. Ketimpangan ini merupakan masalah struktural yang sudah lama ada dan berkembang dalam masyarakat, dan terutama disebabkan oleh nilai-nilai sosial budaya.

Beberapa permasalahan dan ketimpangan tersebut antara lain adalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam pendidikan, yang memberikan dampak pada kesulitan bersaing dalam pasar kerja. Selain itu, kesehatan dan masalah gizi juga masih memprihatinkan dengan adanya krisis yang berkepanjangan, yang disebabkan oleh adanya kondisi krisis yang berkepanjangan, yang disebabkan oleh adanya nilai-nilai sosial budaya dalam masyarakat yang kurang kondusif terhadap pola hidup sehat, kesadaran akan perlunya pemeriksaan kesehatan yang teratur, dan prasarana dan sarana kesehatan yang terbatas dan belum merata.

Dalam mengatasi masalah-masalah sebagaimana diatas, peran pemerintah bersama dengan masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat, terutama lembaga-lembaga yang memiliki visi pemberdayaan perempuan sangat besar untuk pemberdayaan perempuan.

2. Arah Kebijakan

- a. Meningkatkan kemandirian, pengetahuan dan keterampilan serta peran aktif wanita, anak dan remaja dalam pembangunan.
- b. Mewujudkan keluarga beriman dan bertakwa, sehat, sejahtera dan bahagia dalam masyarakat.
- c. Peningkatan kesadaran dan pekerjaan gender, mendorong terwujudnya perilaku yang berkesetaraan gender, dan perilaku gender untuk seluruh institusi politik dan hukum.
- d. Perlindungan Hak Tenaga Kerja Wanita (TKW)
- e. Pembangunan pemberdayaan perempuan secara terpadu.

3. Program pembangunan

Program peningkatan pemberdayaan perempuan, anak dan remaja, dengan kegiatan :

- a. Peningkatan pembinaan keluarga sejahtera dan bahagia.
- b. Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi perempuan, anak dan remaja.
- c. Peningkatan pendalaman dan wawasan perempuan dalam prospektif gender.
- d. Peningkatan perlindungan tenaga kerja perempuan dan penanggulangan pekerja anak dan remaja.
- e. Penelitian pemberdayaan wanita dalam berbagai dimensi.

4.2.5. Pemuda

1. Umum

Pengembangan kepemudaan dilakukan dalam rangka peningkatan kemampuan dan kekuatan fisik, dan daya nalar, keterampilan kerja, kreativitas, kecerdasan, kemandirian berwiraswasta, dan peningkatan serta berkemampuan dalam memanfaatkan, membangkitkan, dan menguasai IPTEK. Pengembangan ini berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas pemuda sebagai insan, pelopor dan penggerak pembangunan, serta sebagai sumber daya manusia yang

mampu menghadapi berbagai tantangan serta memanfaatkan peluang untuk berperan serta dalam pembangunan.

2. Arah Kebijakan

- a. Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat dan minat dengan memberikan kesempatan dan kebebasan organisasi.
- b. Mengembangkan minat dan bakat di kalangan generasi muda yang berdaya saing, unggul, ulet dan mandiri.

3. Program Pembangunan

Program kepemudaan dengan kegiatan :

- a. Pengembangan dan pembinaan potensi kepemudaan Propinsi Riau.
- b. Peningkatan pemahaman pemuda dalam penegakan supremasi hukum.
- c. Penumbuhan dan pengembangan usaha produktif pemuda.
- d. Peningkatan pendidikan kepeloporan kepemimpinan pemuda.
- e. Peningkatan peran serta organisasi kepemudaan dalam penanggulangan masalah penyalahgunaan obat terlarang dan HIV serta penyakit menular lainnya.
- f. Mengaktifkan tempat kegiatan pemuda untuk pembinaan dan kreasi.
- g. Pengembangan dan peningkatan pemahaman kebudayaan Melayu.

4.3. Pembangunan Ekonomi Berbasis Kerakyatan

4.3.1. Industri

1. Umum

Secara keseluruhan dalam sepuluh tahun ini perkembangan jumlah industri pengolahan menunjukkan trend meningkat. Berdasarkan perkiraan, keadaan dan perkembangan industri pengolahan pada masa yang akan datang cukup prospektif. Keadaan ini dimungkinkan oleh adanya potensi sumber daya alam yang dimiliki Riau dan kestrategisan letak Riau berada diposisi silang lintas jalur dunia (perdagangan internasional), membaiknya keadaan ekonomi nasional panca S1, memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi secara nasional. Hal ini juga akan berpengaruh positif terhadap perkembangan industri di Riau.

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal, maka isu- isu IRTKM adalah sebagian besar produk IRTKM tidak atau kurang “*marketable*”. Isu lainnya yang menonjol adalah lemahnya kemampuan finansial, manajemen, dan pemasaran IRTKM.

2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan industri adalah :

- a. Membangun kesejahteraan dan ketahanan ekonomi daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan melalui kegiatan agroindustri.
- b. Mewujudkan kemitraan industri kecil dan menengah dengan industri besar.
- c. Membangun industri rumah tangga, kecil dan menengah yang memiliki daya tahan dan fleksibilitas terhadap gejolak ekonomi.
- d. Menumbuhkan kewirausahaan yang handal dan mandiri.

3. Program Pembangunan

Program pengembangan industri rumah tangga, industri kecil dan menengah (IRTKM) dengan kegiatan :

- a. Pengembangan industri yang menyediakan kebutuhan pokok rakyat banyak.
- b. Menumbuhkembangkan industri hulu dan hilir dalam bentuk kemitraan.
- c. Pembinaan teknis dan pengembangan usaha IRTKM di daerah Kabupaten/ Kota.
- d. Pengembangan industri penunjang pertanian.

- e. Peningkatan keterampilan dan teknologi IRTKM dengan penerapan teknologi tepat guna.
- f. Peningkatan SDM aparatur dan sarana dan prasarana pusat pelatihan IRTKM.
- g. Peningkatan sarana dan prasarana PLIPKT.
- h. Penyediaan kemudahan modal usaha lewat perbankan dan non perbankan.

4.3.2. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

1. Umum

Pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Propinsi Riau cukup potensial, terutama bila dilihat dari luas lahan yang dapat dikembangkan tanaman pangan dan hortikultura. Produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura terdiri dari padi, palawija, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Dalam lima tahun terakhir ini kegiatan tanaman pangan dan hortikultura cenderung meningkat, terutama bila dilihat dari luas lahan dan produksi tanaman pangan dan hortikultura.

Untuk melihat prospek dan arah kebijakan (strategi) yang akan dibuat pada masa yang akan datang, aspek lingkungan internal adalah kekuatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura adalah lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura cukup potensial. Sumber tenaga kerja manusia secara kuantitas cukup tersedia, sebagian besar budaya masyarakat desa masih berorientasi pada budaya agraris. Sedangkan kelemahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura adalah; adanya konversi lahan pangan yang potensial menjadi lahan untuk kegiatan non pertanian tanaman pangan dan hortikultura, masih terbatas kemampuan petani baik dilihat dari manajemen usaha tani, teknologi, finansial maupun kawasannya.

Dari aspek analisa lingkungan eksternal, adalah peluang pertanian tanaman pangan dan hortikultura berupa masih terbukanya peluang pasar untuk produk-produk tanaman pangan dan hortikultura, semakin meningkatnya teknologi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, adanya dukungan pemerintah terhadap pengembangan tanaman pangan dan hortikultura. Ancaman pertanian tanaman pangan dan hortikultura adalah; semakin besarnya jumlah produk-produk tanaman pangan dan hortikultura dari daerah atau negara lain yang masuk ke Riau, produk-produk tanaman daerah atau negara lain mempunyai daya saing yang lebih baik dibandingkan produk-produk tanaman pangan dan hortikultura yang berasal dari Riau.

2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan tanaman dan hortikultura adalah :

- a. Meningkatkan pengembangan sumber daya manusia tanaman pangan dan hortikultura.
- b. Meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura yang pada gilirannya nanti akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
- c. Mendukung pengembangan sistem dan usaha agrobisnis serta agroindustri yang dapat meningkatkan nilai tambah usaha tanaman pangan dan hortikultura.
- d. Mendukung pembangunan sub sektor tanaman pangan dan hortikultura serta pengembangan wilayah yang masih tertinggal di daerah Propinsi Riau.
- e. Mengurangi kesenjangan pembangunan dalam wilayah dan kesenjangan ekonomi antar golongan masyarakat.
- f. Mempertahankan dan memelihara kesuburan tanah. Sumber air dan kelestarian fungsi ekosistem lingkungan hidup.
- g. Menopang pemanfaatan ketahanan pangan.
- h. Meningkatkan penggunaan teknologi sapa usaha tani menuju usaha tani yang efisien, efektif dan menguntungkan.
- i. Mendorong pengembangan difersifikasi pangan dan gizi melalui usaha pemampatan lahan perkarangan dan pengolahan aneka ragam pangan.
- j. Memperkuat sistem perbenihan dan mendorong peningkatan serta swasta dalam penembangan pembenihan.

- k. Mendorong minat investor dan pengusaha dalam menanamkan modal dan bermitra pada sub sektor tanaman pangan dan hortikultura.

3. Program pembangunan

Program pengembangan usaha pertanian dan ketahanan pangan , dengan kegiatan:

- a) Pembinaan teknis dan kemampuan keterampilan dalam usaha.
- b) Diversifikasi, ekstensifikasi dan intensifikasi usaha tani dalam upaya meningkatkan produksi dan pendapatan keluarga.
- c) Pengembangan kawasan sentra produksi pangan.
- d) Pengembangan diversifikasi pangan dan gizi keluarga.
- e) Meningkatkan akses petani komoditas pangan terhadap modal kerja sarana produksi dan pasar komoditas pangan.
- f) Menumbuhkan sentra-sentra pengembangan komoditas unggulan daerah.
- g) Mengembangkan sistem penembangan mutu dan peningkatan mutu produk untuk meningkatkan daya saing produk pertanian memasuki AFTA.
- h) Membangun dan memelihara prasarana penunjang usaha pertanian.

4.3.3. Peternakan

1. Umum

Pembangunan subsektor peternakan untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam usaha memperbaiki gizi masyarakat di samping meningkatkan pendapatan daerah.

Secara umum perkembangan populasi ternak di daerah Riau mengalami peningkatan selama kurun waktu 1995 -1999. Populasi ternak pada tahun 1999 tercatat ; sapi 140.897 ekor, kerbau 43.518 ekor, kambing 215.702 ekor, domba 1.057 ekor dan babi 514.566 ekor. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan populasi pada hampir seluruh jenis ternak, hanya domba dan babi yang mengalami kenaikan. Kenaikan jumlah populasi ternak tahun 1999 disebabkan kenaikan populasi ternak babi yang sangat drastis, yaitu dari 273.587 ton pada tahun 1998 menjadi 514.566 ton di tahun 1999.

2. Arah Kebijakan

- a. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak melalui kegiatan peternakan yang berskala ekonomi, menggunakan teknologi tepat guna sehinggadidapat nilai tambah yang meningkat serta mendorong peranan masyarakat yang lebih besar.
- b. Mengembangkan usaha peternakan yang berorientasi pada agrobisnis.
- c. Meningkatkan modal untuk pengembangan usaha petani melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.

3. Program Pembangunan

- a. Program peningkatan ketahanan pangan peternakan, dengan kegiatan :
 - 1) Pembiakan ternak dengan sistem *rank*
 - 2) Pencegahan penanggulangan dan pemberantasan penyakit hewan menular.
- b. Program pengembangan agrabisnis komoditas peternakan, dengan kegiatan :
 - 1) Penyaluran kredit modal usaha ternak dengan sistem bergulir.
 - 2) Klinik usaha bisnis ternak.

4.3.4. Perikanan

1. Umum

Produksi perikanan didaerah Riau sebagian besar berasal dari perikanan laut. Data menunjukkan bahwa dari sejumlah 284.992.4 ton produksi ikan pada tahun 1999 sebanyak 256.843.1 ton atau 93,28 persen merupakan hasil perikanan laut dan budidaya, 18.794,3 ton (6,58 persen) hasil dari perikanan umum, tambak dan kolam. Bila dibandingkan dengan total

produksi ikan pada tahun 1998 yang berjumlah 274.145,2 ton berarti produksi ikan pada tahun 1998 mengalami kenaikan sebesar 3,81 persen.

Nilai produksi pada tahun 1999 tercatat **195.892 miliar** rupiah lebih, sedangkan pada tahun 1998 tercatat sebanyak **852.45 miliar** rupiah.

2. Arah Kebijakan

- a. Meningkatnya kesejahteraan nelayan
- b. Pengembangan nelayan melalui pemanfaatan secara terpadu seluruh sumber daya alam, sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Peningkatan konsumsi protein perikanan.
- d. Peningkatan budidaya perikanan darat.

3. Program Pembangunan

Program diversifikasi pangan dan gizi, dengan kegiatan :

- 1) Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan dengan pola pinjaman dan bimbingan teknis.
- 2) Pengembangan tambak rakyat semi intensif.
- 3) Pengembangan kolam rakyat.
- 4) Pengembangan keramba perairan darat.
- 5) Pengembangan budidaya laut.
- 6) Pengembangan jaring apung sebagai kaji terap teknologi.
- 7) Pengembangan pasca panen dengan pola agrobisnis.

4.3.5. Perkebunan

1. Umum

Perkebunan mempunyai kedudukan yang penting di dalam pengembangan pertanian baik di tingkat nasional maupun regional. Perkembangan kegiatan perkebunan di Riau menunjukkan trend yang meningkat. Hal ini dapat dilihat dari semakin luasnya lahan perkebunan yang sampai saat ini (tahun 2000) mencapai luas 2.157.554 hektar dengan peningkatan rata-rata 7,64 % pertahun. Dan peningkatan produksi rata-rata 16,57 % atau sebesar 3.011.379 ton pada tahun 2000, dengan komoditas utama karet, kelapa sawit, kakao, dan aneka tanaman lainnya.

Dilihat dari lingkungan internal dan eksternal, maka pada lingkungan internal kekuatan kegiatan perkebunan adalah; semakin besarnya minat masyarakat untuk melakukan kegiatan dalam usaha perkebunan yang sampai dengan tahun 2000 telah melibatkan petani sebanyak 923.605 kepala keluarga, yang meliputi perkebunan besar sebanyak 145 perusahaan swasta dan 1 perusahaan BUMN (PTPN V), memberikan dampak yang luas dalam kegiatan usaha perkebunan, dengan semakin beragamnya jenis tanaman di samping tersedianya lahan untuk pembangunan. Sedangkan kelemahan kegiatan perkebunan ini, khususnya perkebunan rakyat adalah produktivitas dan kualitas produk masih relatif rendah dan petani selalu berada pada posisi lemah khususnya dalam penentuan harga produk.

Dari lingkungan eksternal peluang tanaman perkebunan adalah; semakin kuatnya dukungan pemerintah terhadap usaha perkebunan rakyat, tumbuhnya berbagai industri yang membutuhkan bahan baku dari produk perkebunan dan semakin luasnya pasar produk perkebunan, sedangkan ancaman terhadap perkebunan rakyat adalah; semakin maraknya tuntutan isu lingkungan dan hak asasi manusia, adanya isu pasar global (AFTA) dimana masyarakat belum siap, serta beberapa produk perkebunan tertentu pasarnya dikuasai oleh negara lain.

2. Arah kebijakan

Arah kebijakan sub sektor perkebunan adalah :

- a. Minumbuhkembangkan usaha perkebunan rakyat melalui peningkatan produktivitas.

- b. Peningkatan retribusi aset yang sesuai dengan perekonomian rakyat
- c. Menumbuhkembangkan industri perkebunan.

3. Program Pembangunan

Program pembangunan dan pengembangan usaha perkebunan rakyat, dengan kegiatan :

- a) Pengembangan Perkebunan Rakyat
- b) Pembangunan kebun karet dan sawit rakyat daerah perbatasan
- c) Intensifikasi perkebunan rakyat
- d) Pemetaan lahan perkebunan
- e) Pengembangan perkebunan rakyat dengan sistem peminjaman modal
- f) Pengembangan pabrik mini kelapa sawit, kelapa, dan karet.

4.3.6. Kehutanan

1. Umum

Pembangunan kehutanan mencakup semua upaya untuk memanfaatkan dan memantapkan fungsi sumberdaya alam hutan dan sumber daya alam hayati lainnya serta eksosistemnya, baik sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan dan pelestarian keanekaragaman hayati maupun sumber daya pembangunan. Pembangunan kehidupan meliputi aspek pelestarian fungsi lingkungan hidup, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial, dalam hutan negara maupun sekitar kawasan hutan.

Riau yang mempunyai wilayah daratan lebih kurang 9.456.160 hektar, dan berdasarkan paduserasi antara TGHK dan RTRWP Riau yang ditetapkan melalui keputusan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Riau, ditetapkan melalui Nomor Kpts/15a/ III 1998 tanggal 27 Maret 1998, hutan di Propinsi Riau.

3) Pembinaan dan pengendalian penguasaan hutan

- b. Program perlindungan, pengawasan dan pengendalian kerusakan hutan, dengan kegiatan:
 - 1) Pendidikan dan pelatihan bagi SDM kehutanan
 - 2) Pengamanan hutan dan penyuluhan kehutanan

4.3.7. Perdagangan

1. Umum

Kegiatan perdagangan di Riau sebelum krisis ekonomi (sebelum tahun 1998) didominasi oleh produk industri. Akan tetapi saat krisis ekonomi produk pertanian semakin besar proporsinya dalam kegiatan perdagangan, walaupun secara keseluruhan masih didominasi oleh produksi industri.

Permasalahan secara keseluruhan perdagangan terutama yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan adalah kecilnya nilai tambah yang didapat oleh usaha perdagangan kecil kalau dibandingkan dengan usaha perdagangan yang berskala besar.

2. Arah kebijakan

- a. Meningkatkan kemampuan usaha kecil dan menengah melalui perluasan lembaga-lembaga pendukung pengembangan usaha kecil dan menengah.
- b. Pengembangan kewirausahaan serta mendorong partisipasi aktif dalam memanfaatkan kesempatan berusaha untuk usaha kecil dan menengah, terutama dalam rangka peningkatan aktifitas perdagangan luar negeri.

3. Program pembangunan

- a. Program pembinaan usaha perdagangan kecil dan menengah dengan kegiatan:
 - 1) Bimbingan usaha bagi pedagang kecil dan menengah.

- 2) Bantuan pinjaman permodalan bagi pedagang kecil dan menengah.
- b. Program perlindungan konsumen, standarisasi mutu barang, pengawasan dan pengendalian distribusi barang kebutuhan pokok, dengan kegiatan:
 - 1) Sosialisasi tentang konsumen kepada dunia usaha dan masyarakat.
 - 2) Efektivitas standar mutu barang.
 - 3) Pengendalian distribusi barang kebutuhan pokok.

4.3.8. Koperasi dan Usaha kecil-Menengah (UKM)

1. Umum

Koperasi dan usaha kecil-menengah merupakan salah satu unsur penting dalam pengembangan ekonomi Indonesia pada umumnya, dan Riau khususnya ketangguhan ekonomi daerah tergantung pada pelaku – pelaku ekonomi, termasuk kinerja koperasi dan usaha kecil-menengah. Untuk itu, kekuatan ekonomi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, apabila kekuatan sinergi kolektif yang di naungi oleh koperasi berjalan sebagaimana mestinya.

Koperasi dan usaha kecil-menengah merupakan bentuk dan jenis usaha yang digolongkan dalam ekonomi kerakyatan karena sipatnya mandiri dan merupakan usaha bersama. Untuk koperasi di provinsi Riau (sebelum pemekaran) yang bergerak pada bidang produksi, penyaluran, pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, perikanan dan lain-lain. Pada tahun 1999 berjumlah 1.764 buah. Dengan dicapainya laju pertumbuhan ekonomi sebesar 2,31 persen di provinsi Riau tentunya berkaitan dengan besarnya investasi yang dilaksanakan pada kurun waktu yang bersangkutan, jumlah investasi di provinsi Riau bidang perkoperasian mencapai Rp.654.519.23 juta (10,34 persen).

2. Arah kebijakan

- a. Mengembangkan koperasi usaha kecil - menengah sebagai wadah kolektif yang efisien dan efektif sehingga dapat meningkatkan kegiatan-kegiatan produktif yang mempunyai nilai tambah.
- b. Pembinaan pengembangan koperasi dan UKM secara umum dalam pelaksanaan ekonomi kerakyatan guna peningkatan pendapatan dan kesejahteraan.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi produktif dalam rangka untuk mendorong peningkatan produktivitas, efisiensi usaha, melalui koperasi dan UKM.
- d. Memperkuat kerangka dasar koperasi dan UKM sebagai wadah ekonomi rakyat sekaligus mitra kerja usaha lainnya sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh dalam mewujudkan perekonomian nasional.
- e. Memperluas wawasan pengetahuan, organisasi manajemen dan usaha, pengalaman bagi koperasi dan UKM untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota dan masyarakat.
- f. Meningkatkan keyakinan kepada anggota masyarakat dan dunia usaha lainnya untuk menanamkan investasi pada Koperasi dan UKM.

3. Program Pembangunan

Program pengembangan koperasi dan Usaha Kecil Menengah, yang kegiatan :

1. Pembinaan teknis dan pengembangan usaha koperasi dan usaha kemitraan.
2. Peningkatan koordinasi antar instansi/lembaga dalam meningkatkan kepedulian pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah dan mekanisme pasar bagi koperasi dan UKM.
3. Peningkatan iklim yang kondusif melalui perumusan peraturan daerah (perda) yang membutuhkan tata nilai berusaha bagi koperasi dan UKM.
4. Penyediaan kemudian modal usaha lewat perbankan.

4.3.9. Pengembangan Usaha Daerah

1. Umum

Perkembangan perekonomian di Propinsi Riau tidak dapat di lepaskan dengan peranan dunia usaha yang ada, baik dalam skala yang kecil maupun yang besar. Jumlah pengusaha Propinsi Riau relatif banyak, yang keberadaanya terdapat di seluruh wilayah kabupaten/ kota, sekalipun dalam distribusinya kurang menyebar.

Propinsi Riau masih memiliki sejumlah potensi sumber daya alam yang masih dapat meningkatkan dan di kembangkan guna peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, namun kemampuan daerah secara loyalitas masih dihadapkan pada sejumlah kendala, terutama dalam hal pemodal, teknologi, dan keterampilan sumber daya manusia. Untuk itu pada masa mendatang kegiatan investasi masih sangat diperlukan, terutama yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan dalam rangka tranformasi teknologi yang dapat di adopsi oleh masyarakat tempatan, serta untuk menghadapi persaingan global yang bukan hanya mengandalkan pada keunggulan komperatif (*comperative advantage*) semata tetapi lebih di utamakan pada keunggulan dalam persaingan (*competitive advantag*).

2. Arah Kebijakan

- a. Peningkatan kemampuan baik secara kelembagaan maupun dalam operasionalisasi.
- b. Pengembangan investasi yang mengarah pada sektor-sektor rill dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

3. Program Pembangunan

- a. Program pembinaan usaha ekonimi daerah, dengan kegiatan :
 1. Pembinaan, identifikasi, seleksi kelompok UED simpan pinjam
 2. Bantuan modal usaha UED simpan pinjam
 3. Pengendalian, monitoring dan evaluasi UED simpan pinkam setra penilaian UED simpan pinjam
 4. Pembinaan dan pengembangan sektor informal
- b. Program pengembangan investasi daerah, dengan kegiatan :
 1. Pembangunan dan pengembangan pusat promosi, investasi dan pariwisata.
 2. Penyempurnaan database dan informasi potensi dan peluang investasi strartegis.

4.3.10. Pertambangan dan Energi

1. Umum

Perkembangan pertambangan umum di Propinsi Riau relatif cukup pesat, ditandai dengan banyaknya perusahaan yang bergerak dibidang ini yang mengusahakan bahan galian pasir laut, granit, bauksit, timah, emas, batubara, gambut, pasir wars dan andensit. Sampai bulan September 2000, tercatat sebanyak 164 pemegangan izin usaha pertambangan dalam bentuk Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dengan berbagai tingkatan, baik penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi. Total wilayah dari 163 pemegang izin Usaha Pertambangan Umum sebesar 1.408.376 hektar.

Mengamati potensi dan perkembangan kegiatan pertambangan yang ada di Riau sebagian besar adalah kegiatan-kegiatan yang berskala besar dan kurang memberi efek ganda bagi kegiatan masyarakat yang berskala kecil. Sebenarnya dari potensi pertambangan yang ada, peluang pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan pada kegiatan pertambangan cukup besar terutama pada kegiatan bahan galian golongan C.

Potensi pengembangan energi di Propinsi Riau sebenarnya relatif besar, namun untuk pengembangannya dihadapan kepada aspek pembiayaan maupun investasi. Oleh karenanya pembangunan energi di Propinsi Riau harus di carikan jalan keluarnya untuk mengatasi segala

permasalahan penyediaan energi yang cepat dan murah. Terutama untuk mendukung pengembangan industri setra pemerataanya ke seluruh daerah yang membutuhkan energi.

2. Arah Kebijakan

- a. Penyesuaian kembali peraturan izin di bidang pertambangan dan energi era otonomi daerah.
- b. Mengembangkan sistem informasi dan pelayanan terpadu (SIPT).
- c. Memberikan kemudahan dan memfasilitasi aparatur dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam manajemen dan usaha pertambangan dan energi.
- d. Penataan dan pengendalian wilayah pertambangan dan energi.
- e. Memfasilitasi dan memberikan kesempatan kepada masyarakat tempatan berperan aktif dalam usaha pertambangan dan energi.
- f. Memanfaatkan keterkaitan usaha pertambangan dan energi dengan sektor lain,
- g. Penyediaan sumber energi baik dalam bentuk listrik maupun sumber energi alternatif lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara murah, mudah, dan merata ke seluruh wilayah dengan kualitas dan kuantitas yang memadai.

3. Program Pembangunan

- a. Program pembangunan pertambangan umum, dengan kegiatan :
 1. Pemerataan potensial pertambangan untuk pengembangan pertambangan rakyat.
 2. Pengendalian usaha pertambangan.
 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola pertambangan umum.
 4. Pengembangan usaha pertambangan rakyat dan kemitraan.
- b. Program pengembangan geologi dan sumber daya mineral dengan kegiatan:
 1. Pemetaan potensi sumber daya geologi untuk pembangunan masyarakat, serta melengkapi infrastruktur masyarakat pesisir.
- c. Program pengembangan kelistrikan, dengan kegiatan :
 1. Pemetaan kebutuhan kelistrikan
 2. Pengembangan potensi sumber pembangkit listrik
 3. Perluasan dan pemerataan kelistrikan

4.3.11. Kepariwisataaan

1. Umum

Propinsi Riau sebagai pintu gerbang terdekat dengan dunia luar khususnya dengan wilayah Malaysia dan Singapura. Propinsi Riau juga merupakan daerah tujuan wisatawan mancanegara. Untuk itu wisatawan memerlukan waktu yang relatif pendek menuju ke Propinsi Riau (terutama Malaysia dan Singapore) dan untuk itu dapat menggunakan transportasi laut atau udara. Potensi pariwisata Riau yang dapat dikembangkan antara lain adalah wisata alam, wisata budaya, wisata olahraga, wisata industri niaga dan wisata bahari.

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dari tahun ke tahun terus meningkat dan mempunyai urutan ketiga setelah Bali dan DKI Jakarta. Pada tahun 1955 jumlah kunjungan wisatawan ke Riau sebanyak 1.242.848 orang, tahun 1996 sebanyak 1.490.801 orang, tahun 1997 sebanyak 1.600.629 orang, tahun 1998 sebanyak 1.920.027 orang. Dari jumlah kunjungan wisatawan tersebut, 96,50% merupakan kunjungan ke daerah Riau Kepulauan, dan 3,50% kunjungan ke Riau Daratan. Unsur penunjang pariwisata seperti hotel, transportasi dan unsur-unsur penunjang lainnya cukup memadai dan dari tahun ke tahun terus meningkat.

2. Arah Kebijakan

- a. Pengembangan pariwisata yang berbasiskan pada kekuatan ekonomi kerakyatan.
- b. Pembangunan peningkatan dan perluasan usaha jasa pariwisata yang ditunjang oleh unsur-unsur perhotelan, jasa pelayanan pariwisata, transportasi dan infrastruktur lainnya

c. Menciptakan rasa aman dan tertib yang kondusif

3. Program Pembangunan

a. Program pembangunan dan pengembangan potensi kepariwisataan, dengan kegiatan :

- 1) Sosialisasi RIPPDA Propinsi Riau
- 2) Perencanaan pengembangan pariwisata daerah
- 3) Peningkatan promosi pariwisata dan bahan-bahan informasi wisata daerah.
- 4) Pendidikan dan pelatihan pengelolaan wisata.
- 5) Peningkatan infrastruktur pariwisata dan pengembangan obyek wisata, terutama pariwisata budaya daerah.

4.3.12. Telekomunikasi

1. Umum

Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi dalam bidang telekomunikasi dan informasi, maka kesadaran masyarakat akan pentingnya sarana komunikasi ini menjadi semakin tinggi. Hal tersebut terlihat dari semakin banyaknya jumlah pengguna jasa telekomunikasi dari jenis alat yang digunakan maupun intensitas penggunaannya.

Dari jenis alat digunakan saja perkembangannya relatif pesat, seperti untuk jenis telekomunikasi tidak bergerak (*station*) yang sudah banyak digunakan di daerah pedesaan berupa penggunaan satelit dan penggunaan pemancar radio untuk daerah yang tidak terjangkau atau yang jalur kabelnya padat, seperti yang dilakukan baik oleh Telkom maupun Ratelindo. Demikian pula terhadap penggunaan jenis peralatan telekomunikasi lainnya untuk yang bergerak (*mobile*) yang kompetisinya di Propinsi Riau semakin ketat, seperti dilakukan oleh sejumlah perusahaan telekomunikasi seluler Telekomsel, Komselindo dan Satelindo.

Disamping itu pada saat sekarang di Propinsi Riau telah pula berkembang jasa internet yang dapat melakukan akses secara lintas Negara dengan biaya yang relative murah. Usaha jasa internet yang telah dilakukan oleh sejumlah perusahaan yang berperan sebagai provider, telah pula banyak disambut oleh masyarakat dengan mendirikan sejumlah usaha jasa rental internet dalam bentuk Warnet, Cafenet dan sebagainya.

2. Arah Kebijakan

- a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang lebih merata, hemat, akurat dan mudah baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.
- b. Sinkronisasi kebijakan telekomunikasi dengan kebijakan daerah.

3. Program Pembangunan

Program pengembangan jasa telekomunikasi, dengan kegiatan :

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana telekomunikasi daerah
- 2) Perluasan jaringan telekomunikasi sesuai dengan kebutuhan daerah.

4.3.13. Transportasi

1. Umum

Prasarana jalan merupakan urat nadi kelancaran lalu lintas di darat. Lancarnya arus lalu lintas akan sangat menunjang perkembangan perekonomian suatu daerah. Apabila prasarana jalan diibaratkan sebagai urat nadi maka prasarana pengangkutan adalah ibarat darah yang mengalir melalui urat nadi tersebut, dalam kurun yang singkat jumlah kendaraan bermotor mengalami pertumbuhan yang relatif pesat sehingga menuntut untuk ditingkatkannya terus kondisi jalan.

Angkutan laut merupakan sarana perhubungan yang sangat penting di Riau. Hal ini disebabkan sebagian Daerah Riau terdiri dari pulau-pulau yang terhampar di Selat Sumatra sampai ke laut Cina Selatan, sehingga di Riau terdapat 42 buah pelabuhan laut.

Dari 11 (sebelas) Bandar udara di Propinsi Riau yang ada, pada saat sekarang hanya dua bandara yang berfungsi secara komersil yaitu Bandara Sultan Syarif Kasim II–Pekanbaru, dan Bandara Hang Nadim–Batam, dengan grafik pada kedua bandara menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Adapun 9 (sembilan) Bandar lainnya (Kijang, Japura, Sei Bati, Dabo dan Pinang Kampai, Matak, Natuna, pasir Pengaraian dan Sungai Pakning), belum beroperasi secara optimal dan hanya melayani penerbangan perintis dan penerbangan non komersial dengan gtrafik angkutan dan penumpang yang masih sangat rendah.

2. Arah Kebijakan

- a. Pengembangan dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
- b. Mempercepat pencapaian pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- c. Memperluas sarana dan prasarana transportasi dengan berdasarkan pasca prioritas kewenangan Propinsi dan kebutuhan Kabupaten / Kota.

3. Program Pembangunan

- a. Program peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi dengan kegiatan :
 - 1) Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan sarana dan prasarana jalan
 - 2) Peningkatan kualitas jalan
 - 3) Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
 - 4) Rehabilitasi/peningkatan dan pembangunan fasilitas pelabuhan
- b. Program pembangunan sarana dan prasarana transportasi dengan kegiatan :
 - 1) Pembangunan sarana dan prasarana jalan
 - 2) Pembangunan jembatan
 - 3) Pengembangan sarana penunjang
 - 4) Pengembangan fasilitas lalu lintas
 - 5) Pembangunan jaringan kereta api
 - 6) Pengembangan aksesibilitas ASDP
 - 7) Pengembangan fasilitas pelabuhan udara dan keselamatan penerbangan
 - 8) Pengembangan armada perintis

4.3.14. Kelautan

1. Umum

Luas wilayah perairan laut Propinsi Riau mencapai 235.306 km² atau meliputi 71,33% dari luas daratan, yang didalamnya terdapat 3.214 pulau besar dan kecil, sebagian besar pulau-pulau kecil tersebut terhampar di Laut China Selatan, masih banyak yang belum berpenghuni.

Potensi kelautan yang ada di wilayah tersebut sangat besar baik ditinjau dari sisi pemanfaatannya sebagai sarana prasarana transportasi laut, maupun dari sisi sumber daya yang terkandung di bawah permukaannya seperti pasir laut, terumbu karang dan kemungkinan adanya harta karun karena wilayah perairan Riau sangat dikenal pada zaman VOC dahulunya sebagai wilayah lintasan dan berbagai jenis ikan mengingat bahwa wilayah perairan tersebut adalah merupakan selat dan pertemuan arus.

Aktifitas di wilayah perairan relatif sangat padat, terutama sebagai di Selat Malaka yang dimanfaatkan sebagai prasarana transportasi laut yang menghubungkan dengan daerah-daerah di sekitarnya dan juga dengan Negara luar. Dengan terbukanya akses transportasi laut ke pulau-pulau yang berada di Propinsi Riau, merupakan salah satu faktor pemacu pertumbuhan yang pada akhir-akhir ini cukup pesat.

Masih terdapat sejumlah pulau yang kosong, maka hal tersebut adalah merupakan potensi yang dapat dikembangkan. Tantangan pemanfaatan laut untuk kepentingan ekonomi, sangat didominasi oleh mereka yang memiliki kemampuan dalam bidang teknologi tinggi, permodalan yang kuat, dan memiliki akses komunikasi dengan luar negeri serta dengan pihak tertentu,

sehingga upaya optimalisasi pemanfaatan potensi kelautan ini belum dapat sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pantai dan pesisir yang selama ini kehidupan mereka akrab dengan laut, bahkan ekonominya mereka semakin terancam oleh karena potensi laut yang ada untuk kesejahteraan mereka semakin sulit didapat, seperti potensi perikanan, laut yang tercemar sehingga sulit untuk melakukan budidaya, dan sebagainya.

Oleh karenanya sejauh mana kemampuan pemerintah untuk dapat memotivasi dan mendorong masyarakat melakukan investasi ke laut terutama guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada di daerah pantai dan pesisir.

2. Arah Kebijakan

- a. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan untuk kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan perikanan, budidaya pantai dan pariwisata.
- c. Meminimalisasi dampak negatif dari pada kegiatan eksploitasi dan eksplorasi laut, pantai dan pesisir demi terjaganya kelestarian sumber daya laut yang ada dan mempertahankan ekosistem laut.

3. Program Pembangunan

- a. Program Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Pesisir dan Kelautan, dengan kegiatan :
 - 1) Identifikasi potensi sumber daya kelautan
 - 2) Pembinaan dan bimbingan kepada nelayan
 - 3) Peningkatan dan pengembangan infrastruktur sarana hasil ikan dan kelautan
- b. Program kelestarian dan konservasi sumber daya laut, dengan kegiatan :
 - 1) Pemetaan sumber daya kelautan
 - 2) Evaluasi ekonomi sumber daya pesisir dan kelautan Riau
 - 3) Penyusunan Renstra Pesisir dan kelautan
 - 4) Perlindungan dan perbaikan habitat dan jenis penting yang dikelola kelompok masyarakat Riau.

4.3.15. Sumberdaya Air dan Irigasi

1. Umum

Pembangunan pengairan mencakup segala upaya mengembangkan pemanfaatan, pelestarian dan perlindungan air beserta sumbernya dengan perencanaan yang terpadu dan serasi guna mencapai manfaat sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan perikehidupan rakyat. Pembangunan pengairan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang terus meningkat dan semakin memudahkan rakyat mendapatkan dan memanfaatkan air untuk keperluan hidupnya.

Pembangunan pengairan harus dilaksanakan dalam pola tata ruang yang terkoordinasi dengan sektor lainnya, agar diperoleh manfaat yang optimal. Tata guna air dan tata guna tanah serta kehutanan diselenggarakan secara terpadu sehingga menjamin fungsi kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Potensi sumber daya air yang ada di Propinsi Riau bukan saja karena terdapatnya empat sungai besar dengan beberapa anak sungainya, akan tetapi juga karena adanya curah hujan tahunan yang cukup tinggi. Selain itu Propinsi Riau memiliki perairan pantai dan lahan basah yang sangat luas dan tersebar di sepanjang wilayah bagian timur Pulau Sumatera. Pembangunan bidang pengairan meliputi: pembangunan pengairan dan pembangunan irigasi.

2. Arah Kebijakan

- a. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air untuk menunjang ketahanan pangan dan kebutuhan air baku.

- b. Pengalaman sumber daya air dalam rangka melindungi kawasan budidaya (pemukiman, pertanian, industri dan lain-lain).

3. Program Pembangunan

- a. Program pengembangan dan pengelolaan daerah rawa, dengan kegiatan
 - 1) Meningkatkan fungsionalisasi jaringan pengairan rawa guna meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan kebun kelapa rakyat.
 - 2) Mengembangkan daerah rawa agar dapat menjadi daerah atau areal perkebunan, pertanian, perikanan dengan perbaikan dan pengaturan tata air.
 - 3) Peningkatan jaringan rawa dan pembangunan tata air dengan sistem penyempurnaan jaringan pengairan rawa.
- b. Program pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air, dengan kegiatan :
 - 1) Pengendalian dan penanaman banjir, erosi, dan abrasi pantai.
- c. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, dengan kegiatan :
 - 1) Optimalisasi pemanfaatan jaringan irigasi
 - 2) Menumbuhkembangkan efisiensi dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan jaringan irigasi dan rawa.
- d. Program penyediaan dan pengelolaan air baku, dengan kegiatan :
 - 1) Pelestarian *catchment area* guna ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
 - 2) Pemeliharaan waduk / embung dalam rangka memenuhi kebutuhan air baku.

4.3.16. Perumahan dan Pemukiman

1. Umum

Perkembangan permukiman dapat terjadi secara alamiah dan terencana yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah baik di kawasan perdesaan maupun perkotaan. Dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan kegiatan sosial – ekonomi, menyebabkan pula meningkatnya kebutuhan penyediaan hunian dan lingkungan pendukungnya secara lebih layak, aman dan nyaman dan ketersediaan sarana air bersih.

Peranan sector swasta untuk mengambil bagian dalam pembangunan perumahan dan permukiman ini sangat diharapkan. Sementara itu dilain pihak pemerintah Propinsi Riau harus dapat mendorong penyediaan ketentuan-ketentuan yang mendukung, seperti kemudahan perizinan, pencadangan areal yang pasti, serta bantuan fasilitas ke dan di daerah permukiman sehingga dapat menurunkan biaya pokok pembangunan perumahan dan permukiman.

2. Arah Kebijakan

- a. Mengembangkan dan memantapkan system penyediaan hunian bagi masyarakat berpendapatan rendah dan miskin yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat.
- b. Meningkatkan institusi pembiayaan perumahan yang bertumpu pada mekanisme pasar primer dan sekunder.
- c. Meningkatkan kapasitas pelayanan jaringan prasarana dan sarana permukiman skala lingkungan, kota, dan wilayah.
- d. Meningkatkan penataan kawasan dalam rangka pengendalian perkembangan dan kualitas permukiman.
- e. Meningkatkan pengelolaan pemanfaatan, pemugaran dan pelestarian kawasan strategis khususnya di perkotaan, pedesaan dan kawasan permukiman tradisional.
- f. Peningkatan prasarana air bersih.

3. Program Pembangunan

- a. Program perbaikan perumahan dan permukiman, dengan kegiatan :
 - 1) Perbaikan kualitas sarana dan prasarana pada kawasan permukiman, terutama daerah miskin dan tertinggal.

- 2) Menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam pembangunan perumahan dan pemukiman.
- b. Program penyehatan lingkungan permukiman dengan kegiatan :
 - 1) Peningkatan dan pengembangan drainase primer
 - 2) Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.
 - 3) Peningkatan prasarana air bersih.

4.4. Pembangunan Kesehatan dan Olahraga

4.4.1. Kesehatan

1. Umum

Pembangunan kesehatan di Propinsi Riau diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta menuju kesejahteraan dan mempertinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat, perhatian khusus diberikan pada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, daerah kumuh baik perkotaan dan pedesaan yang menyebar ke seluruh daerah terpencil dan masyarakat yang hidupnya terasing di Propinsi Riau.

Pelayanan kesehatan selama ini selalu mengacu kepada perbaikan gizi, upaya penurunan angka kematian bayi dan ibu, sisi lain yang perlu terus dibudayakan adalah kebiasaan masyarakat untuk tetap menjaga hidup sehat, bersih dan peduli terhadap lingkungan tempat tinggal masing-masing, penyediaan air bersih, jamban keluarga, pembuangan sampah dan limbah serta meningkatkan mutu lingkungan hidup masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan kesehatan hendaknya berupaya untuk pencegahan dan pemberantasan dari berbagai macam penyakit baik menular maupun tidak menular, penyediaan air bersih, MCK dan sanitasi lingkungan, yakni derajat kesehatan dan gizi masyarakat dan kelembagaan dan mutu pelayanan kesehatan, diharapkan telah menyebarluas ke pelosok dan lapisan masyarakat di Provinsi Riau.

2. Arah Kebijakan

- a. Meningkatkan mutu kesehatan masyarakat dan lingkungan melalui pendekatan paradigma sehat dengan memperhatikan derajat kesehatan, pencegahan, penyembuhan dan rehabilitasi.
- b. Meningkatkan dan memelihara kualitas institusi pelayanan kesehatan, fungsi rujukan dan upaya peningkatan pemenuhan spesialis dan profesionalisme tenaga kesehatan guna mencapai Riau Sehat 2010.
- c. Penataan dan sosialisasi sistem pembiayaan kesehatan masyarakat JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat), dengan menggalang komitmen pihak terkait.
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam pola hidup sehat, dengan memanfaatkan forum komunikasi yang sudah ada di masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi.
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya (narkoba).
- f. Meningkatkan perlindungan masyarakat selaku konsumen dari penyalahgunaan berbagai produk dan pelayanan kesehatan.
- g. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengobatan tradisional yang rasional dan bertanggung jawab sehingga terwujud kemitraan yang berfungsi dengan baik.

3. Program Pembangunan

- a. Program penyuluhan kesehatan masyarakat, dengan kegiatan :
 - 1) Peningkatan penyuluhan kesehatan masyarakat di daerah terpencil, kumuh, perkotaan dan pedesaan
- b. Program peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dengan kegiatan :

- 1) Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat menuju Riau Sehat 2010.
 - 2) Koordinasi perencanaan dan pembinaan kesehatan di seluruh kabupaten / kota.
 - 3) Peningkatan pelayanan rumah sakit daerah
 - 4) Penurunan angka kematian ibu dan bayi
 - 5) Peningkatan pelayanan tenaga medis / kesehatan
- c. Program perbaikan gizi masyarakat, dengan kegiatan :
- 1) Penanggulangan gizi (KEP) Balita seluruh Propinsi Riau
 - 2) Bantuan program makanan tambahan anak sekolah (PMTAS)
- d. Program penanggulangan dan pemberantasan penyakit menular, dengan kegiatan :
- 1) Peningkatan penanggulangan penyakit menu
 - 2) Penanggulangan penyakit Filariasis
 - 3) Pelaksanaan imunisasi anak sekolah
- e. Program pengawasan obat, makanan dan bahan berbahaya yang beredar di lingkungan masyarakat, dengan kegiatan :
- 1) Penyuluhan dan pemberantasan narkoba
 - 2) Sertifikasi bahan makanan dan obat-obatan yang beredar

4.4.2. Olahraga

1. Umum

Kegiatan olahraga juga merupakan salah satu bentuk dari pendidikan. Pendidikan jasmani merupakan rangkaian aktivitas jasmani, bermain dan berolahraga, untuk membangun peserta didik yang sehat dan kuat sehingga dapat menghasilkan prestasi Akademik yang tinggi. Selain itu pendidikan jasmani yang dilakukan sejak dini merupakan awal pengembangan prestasi olahraga. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pembinaan pendidikan jasmani, baik melalui jalur sekolah maupun luar sekolah maupun luar sekolah, yang harus dilakukan sejak usia muda.

Pembangunan olahraga untuk even-even selama ini dicerminkan pula dari pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang mengalami perkembangan yang sangat cepat yang dipusatkan pada kota dan daerah. Dalam rangka pembinaan olahraga telah dibangun dan dikembangkan sejumlah fasilitas olahraga dalam mengacu pada standard internasional.

Kegiatan olahraga telah berkembang dan mencakup pula bagi para penyandang cacat yang dibina oleh Yayasan Pembinaan Olahraga Cacat (YPOC) yang kini menjadi Badan Pembina Olahraga Cacat (BPOC), olahraga tradisional, pencinta alam, kebaharian dan perairan serta kedirgantaraan.

Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembinaan olahraga telah cukup berkembang, bahkan mempunyai andil dalam pencapaian prestasi di tingkat internasional pada beberapa cabang olahraga. Namun, keterlibatan itu masih terbatas dan belum melibatkan dunia usaha secara keseluruhan sehingga masih luas potensi yang masih dapat dikembangkan.

2. Arah Kebijakan

- a. Penataan ulang dan penyempurnaan sistem pembangunan keolahragaan yang berbasiskan pada profesionalisme pelayanan publik dan pemberdayaan daerah.
- b. Peningkatan partisipasi masyarakat, kalangan professional dan dunia usaha.
- c. Peningkatan system pendidikan keolahragaan dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d. Sinkronisasi kebijaksanaan dalam pengembangan keolahragaan.

3. Program Pembangunan

- a. Program pembinaan keolahragaan, dengan kegiatan :
 - 1) Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
 - 2) Pemberdayaan pusat olahraga pelajar.
 - 3) Pembinaan olahraga dan olahraga prestasi

- 4) Pelatihan peningkatan kualitas pelatih/wasit dan atlet
- 5) Peningkatan sarana olahraga masyarakat.

4.5 Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan

1. Umum

Propinsi Riau memiliki keragaman suku dan budaya, selain memiliki budaya asli, yaitu budaya Melayu. Keberagaman suku dan budaya juga merupakan rahmat Tuhan Yang Mahakuasa karena keberagaman itu merupakan asset daerah yang dapat menghasilkan devisa. Meskipun beragam, budaya Melayu tetap eksis dan bahkan mulai disadari oleh kaum muda bahwa budaya Melayu memiliki daya tarik tersendiri karena mengansung falsafah hidup orang Melayu yang tidak ketinggalan oleh kemajuan zaman. Selain itu, penghargaan masyarakat yang memiliki budaya yang berbeda dengan budaya Melayu merupakan hal yang kondusif bagi perkembangan budaya Melayu. Masyarakat bukan Melayu yang berada di daerah Riau pada umumnya dan di daerah-daerah konsentrasi masyarakat Melayu telah banyak yang berbahasa Melayu. Kondisi-kondisi seperti ini perlu dipertahankan dan dikembangkan agar budaya Melayu tetap eksis, terutama dalam menghadapi budaya global.

Tujuan pengembangan kebudayaan adalah membangun ketahanan budaya daerah yang kokoh, dinamis, dan keratif dengan tetap berkepribadian dengan berakar pada jati diri bangsa dan berdaya terhadap pengaruh globalisasi. Dan sasaran yang akan dicapai adalah terbentuknya rujukan system nilai budaya yang berbasis pada warisan nilai luhur guna mendukung kerukunan, harapan hidup, dan peradaban bangsa.

2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan pembangunan kebudayaan adalah menggali, memelihara, dan melestarikan nilai-nilai budaya local untuk memperkaya khasanah budaya Melayu, serta mengembangkannya untuk memperkaya budaya nasional, serta menangkal ekkses penetrasi budaya asing yang bersifat negatif, melalui revitalisasi dan apresiasi kebudayaan

3. Program Pembangunan

- a. Program pembinaan dan pengembangan kebudayaan daerah, dengan kegiatan :
 - 1) Pengembangan budaya Melayu serumpun
 - 2) Penumbuhan dan pengembangan norma, identitas budaya Melayu.
 - 3) Revitalisasi budaya Melayu dalam bentuk penggalian dan aktualisasi nilai-nilai budaya Melayu.
 - 4) Festival kebudayaan Melayu
- b. Program bahasa dan kesusasteraan, dengan kegiatan :
 - 1) Pengembangan dan pelestarian bahasa dan sastra Melayu.
- c. Program pembinaan peninggalan sejarah dan permuseuman, dengan kegiatan
 - 1) Pembangunan/pengembangan museum sejarah Melayu Riau.
 - 2) Pelestarian peninggalan sejarah
- d. Program pembinaan dan pengembangan seni budaya (Melayu), dengan kegiatan :
 - 1) Penajaan seni, promosi, eksibisi, dan muhibah
 - 2) Pemberdayaan kesenian daerah (Melayu)
 - 3) Pertunjukan seni budaya Melayu dan tari keluar negeri
 - 4) Pembinaan dan pengembangan teater
 - 5) Pemberdayaan kesenian daerah
 - 6) Temu seniman dan lintas pelaku seni budaya
- e. Program pengembangan sumber daya, sarana dan prasarana, dengan kegiatan :
 - 1) Perbaikan pengembangan balai pelatihan dan pengkajian kebudayaan, kesenian, dan pariwisata
 - 2) Perbaikan pengembangan anjungan Riau di TMII

- 3) Pembangunan, perbaikan pengembangan balai adapt
- 4) Pembangunan pusat-pusat kebudayaan Melayu
- 5) Pembangunan sarana dan prasarana kesenian Melayu.

4.6. Penunjang

4.6.1. Pembinaan dan Pengendalian Penataan Ruang, Pertanahan, Kependudukan dan Lingkungan Hidup

1. Umum

Pembangunan daerah Riau adalah bagian integral dari upaya pembangunan secara nasional, yang pada hakikatnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan hal demikian, guna mencapai pembangunan yang dimaksud, maka masalah Tata Ruang, Pertanahan, Kependudukan, Kesejahteraan Sosial, Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup merupakan permasalahan utama yang harus mendapat perhatian semua pihak.

Dalam hal penataan ruang daerah Riau masih menghadapi ketidak-tepatan rencana dan ketidaktertiban pemanfaatan ruang yang dapat mengurangi efisiensi kegiatan social-ekonomi, investasi baik oleh pemerintah maupun swasta, termasuk penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan.

Selain itu, bidang pertanahan di daerah Riau menjadi sangat penting jika dilihat dari aspek hukum, sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, penataan dan pengawasan pada bidang pertanahan ini harus diupayakan sedemikian rupa sehingga tercapai administrasi pertanahan yang rapi, dan memudahkan dalam melakukan penataan ruang. Dalam konteks ini, permasalahan pertanahan yang dihadapi oleh daerah Riau adalah masih kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola administrasi pertanahan, antara lain dalam menangani proses sertifikasi status tanah, sedangkan dipihak lain peran pemerintah daerah sangat penting untuk menjamin ketepatan penggunaan tanah dan ketertiban penggunaan tanah untuk berbagai kepentingan sosial, ekonomi dan umum.

Menurut Sensus tahun 2000 penduduk Riau berjumlah 4.733.946 jiwa yang terdiri dari laki-laki 2.405.283 jiwa dan perempuan 2.328.665 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Riau relatif tinggi yaitu 3,79 persen pertahun. Kabupaten / Kota dengan laju pertumbuhan tertinggi adalah Kota Batam yang rata-rata 12,79 persen per tahun dan terendah adalah Kabupaten Natuna dengan rata-rata 0.15 persen per tahun. Penanganan masalah kependudukan melalui keluarga berencana, adalah sejauh mana upaya perwujudan norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS) dapat terwujudkan melalui berbagai aktifitas yang dilakukan oleh keluarga itu sendiri.

Dengan letak Propinsi Riau yang sangat strategis, maka permasalahan kependudukan perlu mendapatkan perhatian serius, antara lain masalah penyebaran penduduk yang tidak merata, permasalahan sosial, kriminalitas, tingginya pertumbuhan penduduk karena adanya migrasi, permukiman kumuh, masalah kependudukan lainnya akan terus tumbuh dan berkembang sejalan dengan semakin tingginya arus mobilitas penduduk yang masih cukup tinggi, pertumbuhan yang tidak seimbang antara jumlah penduduk dengan penyediaan fasilitas pelayanan umum dan fasilitas pelayanan sosial.

Masalah-masalah sosial di Riau yang menonjol saat ini adalah pelacuran, perjudian, dan penggunaan obat-obat terlarang atau narkoba. Masalah-masalah ini tampaknya menjadi dilema karena sulit diberantas. Hal disebabkan oleh beberapa faktor dan diantara beberapa faktor itu muncul dari masyarakat itu sendiri. Kemiskinan merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya berbagai masalah kesejahteraan sosial, muncul dalam berbagai bentuk ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan dasar, keterpencilan dan keterasingan, ketergantungan dan keterbatasan akses pelayanan sosial dasar. Masalah sosial lainnya yang tidak kalah

pentingnya untuk diperhatikan adalah penyalahgunaan obat-obat terlarang. Selain masalah-masalah di atas, masalah komunitas adat terpencil juga harus mendapat perhatian, terutama program permukiman dan pendidikan anak-anak mereka. Dengan demikian maka, banyaknya penyandang masalah sosial merupakan beban pembangunan. Hal ini harus mendapat penanganan yang baik dari pihak pemerintah karena salah satu tujuan pembangunan itu adalah untuk mensejahterakan masyarakat.

Selanjutnya, seiring dengan semakin pesatnya pelaksanaan pembangunan, menimbulkan berbagai dampak sebagai akibat dari pelaksanaannya yang tidak terkendali. Salah satu dampak itu adalah munculnya permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan. Oleh sebab itu, lingkungan perlu dilakukan upaya penjagaan dan melestarikannya. Upaya-upaya itu meliputi pengawasan terhadap pembangunan yang diperkirakan akan berdampak pada lingkungan dan rehabilitasi terhadap lingkungan yang telah mengalami kerusakan akibat dari pembangunan yang tidak terkendali.

2. Arah Kebijakan

A. Penataan Ruang

- 1) Memantapkan sistem perencanaan tata ruang dengan meningkatkan ketersediaan rencana tata ruang wilayah, kawasan perkotaan, kawasan pedesaan dan kawasan khusus yang dilakukan secara transparan, partisipatif dan sesuai dengan kaidah perencanaan.
- 2) Meningkatkan ketertiban pemanfaatan ruang melalui penyediaan rencana rinci tata ruang dan melengkapinya dengan kebijakan, peraturan-peraturan dan mekanisme perizinan dalam pemanfaatan pengendalian penataan ruang.
- 3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan penataan ruang melalui pengembangan prosedur dan mekanisme, pengembangan organisasi, permasyarakatan, prinsip penataan ruang, termasuk mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam penyusunan rencana, perwujudan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- 4) Menata kembali dan mengembangkan kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

B. Pertanahan

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan sistem informasi pertahanan kepada masyarakat tentang status kepemilikan tanah.
- 2) Meningkatkan pengembangan pertahanan yang serasi dengan rencana dan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan
- 3) Meningkatkan kapasitas lembaga pengelolaan dan organisasi pertanahan.
- 4) Memberikan kepastian hak atas tanah adat dan ulayat.
- 5) Melaksanakan redistribusi dan realokasi lahan-lahan yang dikuasai secara berlebihan yang tidak memenuhi azas keadilan dan pemerataan, terlantar, tidak ataupun belum dimanfaatkan, bekas HGU yang dicabut atau sudah habis jangka waktunya untuk menjamin ketersediaan lahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan kepentingan umum (*public utilities*).

C. Kependudukan.

- 1) Mengembangkan kebijaksanaan kependudukan yang selaras dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan sumber daya manusia khususnya meningkatkan kualitas penduduk.
- 2) Pengendalian penduduk
- 3) Penataan dan penyebaran penduduk
- 4) Meningkatkan peran kader tenaga keluarga berencana menuju keluarga informal masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup penduduk.

D. Kesejahteraan Sosial

- 1) Meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan sosial sehingga mampu mendukung tumbuhnya sikap tekad kemandirian manusia dan masyarakat dalam meningkatkan sumber daya manusia.
- 2) Memperluas jangkauan dan pelayanan sosial yang semakin adil dan merata.
- 3) Peningkatan profesionalitas pelayanan sosial baik yang diselenggarakan pemerintah maupun oleh masyarakat.
- 4) Meningkatkan pembinaan organisasi sosial sebagai ujung tombak dalam menggerakkan penanganan masalah sosial.
- 5) Optimalisasi ketahanan sosial yang mampu memberikan bantuan penyelamatan dan pemberdayaan penyandang masalah-masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana.

E. Lingkungan Hidup

- 1) Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat yang dilakukan secara terpadu dengan mempertimbangkan keselarasan dan keseimbangan lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan.
- 2) Mempertahankan kelestarian potensi sumber daya alam dan sumber daya buatan, mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan, sehingga kemampuan sumber daya untuk menunjang pembangunan.
- 3) Mengembangkan kelembagaan, peran serta masyarakat dan kemampuan sumber daya manusia serta mengembangkan teknologi pengelola lingkungan.
- 4) Menegakkan supremasi hukum serta meningkatkan kerjasama lintas kabupaten/kota di bidang lingkungan hidup.

3. Program Pembangunan

A. Penata Ruang

- a. Program penataan ruang, dengan kegiatan :
 - 1) Pembinaan dan pelatihan teknis tata ruang.
 - 2) Penyuusunan rencana penataan ruang kawasan perkotaan, perdesaan dan kawasan khusus.
 - 3) Penyempurnaan dan sosialisasi RT/RW.
 - 4) Penyusunan Masterplan Riau 2020.
 - 5) Pembuatan peta dasar dan digital tentang penggunaan lahan serta identifikasi potensi sumber daya lahan.
 - 6) Pemetaan dan penataan pengembangan kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

B. Pertanahan

Program penataan pertanahan, dengan kegiatan :

- 1) Sertifikasi pertanahan.
- 2) Pemberian kepastian hak atas tanah adat/ulayat.
- 3) Penetapan, pengukuran, dan pemetaan tata batas Propinsi, Kabupaten/Kota, dan antar Kecamatan.

C. Kependudukan

- a. Program pengendalian penduduk, dengan kegiatan :
 - 1) Penyusunan data base kependudukan untuk penyusunan perencanaan dan pengendalian kependudukan.
 - 2) Peningkatan registrasi kependudukan.
 - 3) Peningkatan pengembangan manajemen kependudukan.
- b. Program penataan dan penyebaran penduduk, dengan kegiatan :
 - 1) Penyelesaian SKHPL kawasan pengembangan tata ruang satuan pemukiman.
 - 2) Pembangunan sarana dan prasarana pemukiman penduduk.
 - 3) Peningkatan mutu permukiman penduduk.

- 4) Penyelesaian legalisasi hak atas lahan dan pemukiman penduduk.
 - 5) Identifikasi dan inventarisasi potensi dalam rangka penempatan masyarakat tempatan.
 - 6) Sosialisasi kependudukan kepada masyarakat.
 - 7) Penuntasan masalah lokasi ex transmigrasi.
- c. Program keluarga berencana, dengan kegiatan ;
- 1) Mendukung pendataan keluarga sejahtera .
 - 2) Sosialisasi dan penyuluhan KB menuju keluarga sejahtera.
 - 3) Sosialisasi pemahaman BKB Kemas untuk Dinas Instansi, LSM, dan Organisasi Wanita.

D. Kesejahteraan Sosial

- a. Program pembinaan kesejahteraan sosial, dengan kegiatan :
 - 1) Peningkatan pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK) Riau.
 - 2) Pembinaan kelompok masyarakat tertinggal.
 - 3) Pembinaan dan pengembangan kepada organisasi sosial kemasyarakatan.
 - 4) Peningkatan sarana dan prasarana bagi komunitas adat terpencil.
- b. Program pelayanan dan rehabilitasi sosial, dengan kegiatan :
 - 1) Peningkatan rehabilitasi anan cacat, tuna sosial dan anak bermasalah.
 - 2) Pengadaan sarana dan prasarana rehabilitasi tuna sosial.
 - 3) Pembinaan terhadap anak-anak bermasalah.

E. Lingkungan Hidup

- a. Program pembinaan dan pengembangan lingkungan hidup, dengan kegiatan :
 - 1) Pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dan kelembagaan dalam pelestarian lingkungan.
 - 2) Menyusun neraca kualitas lingkungan hidup daerah Riau.
- b. Program pembinaan daerah pantai, dengan kegiatan :
 - 1) Rehabilitasi/pemulihan hutan bakau.
 - 2) Peningkatan kualitas petani/nelayan tentang pemeliharaan hutan bakau.
- c. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dengan kegiatan :
 - 1) Pembinaan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
 - 2) Pelaksanaan program kali bersih (PROKASIH).
 - 3) Penelitian dampak limbah industri.
 - 4) Penyusunan baku mutu lingkungan inventarisasi potensi kerusakan ekosistem pantai dan laut.
- d. Program pengendalian kerusakan hutan, tanah dan air, dengan kegiatan :
 - 1) Operasional pelestarian dan pengelolaan kawasan lindung.
 - 2) Pengamanan dan pemeliharaan tata batas kawasan lindung.
 - 3) Peningkatan aparat pengamanan hutan/pemetaan hutan.
- e. Program penyelamatan, tanah dan air, dengan kegiatan :
 - 1) Penanggulangan satwa liar.
 - 2) Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan.

4.6.2. Pembinaan dan Pengembangan Supremasi Hukum, Aparatur, Politik, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

A. Hukum

1. Umum

Pemerintah Propinsi Riau melaksanakan azas dekonsentrasi melalui penekanan supremasi hukum yang menyangkut persoalan-persoalan nasional berada di Daerah Pemerintah Propinsi

Riau. Dilain pihak Pemerintah Propinsi Riau juga melaksanakan azas desentralisasi atau otonomi. Aspek-aspek hukum harus relevan dengan persoalan daerah menyangkut kehidupan masyarakat dalam lingkup propinsi Riau, berupa aturan yang menuntut keteraturan masyarakat dalam bermasyarakat dan pemerintahan.

Kesempatan pada era reformasi adalah peninjauan kembali peraturan-peraturan yang tidak relevan lagi dan penyusunan peraturan-peraturan baru untuk mendukung pelaksanaan otonomi.

Kelembagaan hukum diakui eksistensinya dalam menegakkan supremasi hukum ditengah masyarakat. Lembaga hukum dapat berfungsi sebagai alat kontrol bagi aparatur dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.

2. Arah Kebijakan

- a. Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat yang memerlukannya.
- c. Mengaktualisasikan dan merevisi berbagai bentuk peraturan daerah Propinsi Riau yang sesuai dengan perkembangan aspirasi masyarakat.
- d. Mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan-peraturan daerah yang mendukung kegiatan pembangunan daerah.

3. Program Pembangunan

Dalam rangka menjabarkan arah kebijakan pembangunan di bidang hukum maka disusun program sebagai berikut :

- a. Program peningkatan kesadaran hukum, dengan kegiatan :
 - 1) Penyusunan dan sosialisasi produk hukum.
 - 2) Bantuan hukum pada masyarakat.
 - 3) Penyusunan PERDA perangkat hukum Propinsi Riau.
 - 4) Peningkatan kualitas aparat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- b. Program peningkatan penyuluhan hukum, dengan kegiatan :
 - 1) Pendidikan sadar hukum pada masyarakat.

B. Aparatur Pemerintahan

1. Umum

Kelembagaan pemerintah pada umumnya belum dinamis dalam mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat, bahkan selalu ketinggalan dari kejadian yang terjadi dalam masyarakat. Ada kecendrungan aparatur Pemerintah yang dilayani masyarakat bukan melayani masyarakat. Tidak ada ketepatan waktu pelayanan, sehingga menimbulkan penafsiran yang keliru tentang aparatur sebagai pelayan masyarakat. Penempatan aparatur cenderung tidak sesuai dengan bidang studi keahliannya, sehingga menimbulkan penyesuaian dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Prasarana dan sarana kerja, belum memenuhi kelengkapan sebagai pelayanan masyarakat. Disiplin kerja dan insentif yang memadai sesuai indek biaya hidup, belum terlaksana dengan baik dan cenderung inkonsistensi sebagai pelayan yang bersih dan mengawasi pembangunan yang berkesinambungan.

Kelembagaan pemerintah yang diakui eksistensinya berfungsi sebagai pelayanan terhadap masyarakat, belum berfungsi sebagai pelayan masyarakat dan mengatur kehidupan masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih. Aparatur pemerintah merupakan sumber daya yang potensial dalam penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan bidang dan tugasnya, dan harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana kerja yang memadai, serta penataan kembali aparatur pemerintah Propinsi Riau, sehingga benar-benar mampu sebagai pelayan masyarakat yang bersih dan mampu melaksanakan pembangunan berkesinambungan

2. Arah Kebijakan

- a. Meningkatkan kesetiaan dan pengabdian aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

- b. Meningkatkan kualitas aparatur melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan dan konsisten guna menghadapi tuntutan global yang sangat dinamis, kompetitif, akuntabilitas, transparansi dan demokratisasi.
- c. Meningkatkan prasarana dan sarana kerja serta kesejahteraan aparatur.
- d. Meningkatkan upaya penertiban dan pengawasan terhadap aparatur untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif, profesional, berwibawa dan bersih dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

3. Program Pembangunan

- a. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pemerintah, dengan kegiatan :
 - 1) Pembangunan dan rehabilitasi gedung kantor dilingkungan Pemda Propinsi Riau.
 - 2) Pengadaan sarana dan prasarana
 - 3) Pengadaan sarana mobilitas dan pengadaan lahan bagi Pemda.
- b. Program pengembangan sumber daya manusia aparatur, dengan kegiatan :
 - 1) Inventarisasi kemampuan SDM aparatur
 - 2) Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional
 - 3) Studi komperatif pengembangan SDM aparatur
- c. Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, serta mekanisme perencanaan pembangunan, dengan kegiatan :
 - 1) Pengendalian administrasi manajemen pemerintahan dan pembangunan, serta pemantapan kearsipan.
 - 2) Pembinaan dan pemantapan kelembagaan organisasi publik.
- d. Program pendayagunaan sistem dan pelaksanaan pengawasan pembangunan, dengan kegiatan :
 - 1) Penyusunan rencana program pembangunan.
 - 2) Pengendalian dan pengawasan pelaporan program pembangunan.

C. Politik

1. Umum

Konsekuensi eforia reformasi, dinamika perpolitikan nasional pada saat ini, dihiasi oleh kebebasan mengemukakan pendapat yang cenderung lepas kendali, arogan dan kurang memperhatikan kaedah demokrasi. Hal itu dapat dilihat pada penjarahan aset negara dan perusahaan yang dilakukan masyarakat, dengan alasan bahwa masyarakat selama ini merasa hak-hak mereka terabaikan. Selain itu, elit politik banyak yang ‘memperalat’ masyarakat dengan maksud mencapai tujuan tertentu, baik untuk berposisi maupun mendukung pemerintah.

Akibatnya, karena pendidikan politik masyarakat relatif rendah, dan lebih menunjukkan ekspresi eforia daripada kesadaran politik, maka posisi masyarakat cenderung berada diantara pro-kontra terhadap elit politik yang berkonflik.

Kelembagaan politik lokal, khususnya partai politik yang memiliki fungsi-fungsi politik, diantaranya sebagai penampung aspirasi masyarakat, diharapkan mampu melakukan kontrol terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta mendorong proses penegakan demokratisasi di tingkat daerah. Dengan cara demikian, membangun tatanan politik masyarakat yang demokratis dan transparan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

2. Arah Kebijakan

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan demi terciptanya pemerintahan yang bersih, berwibawa, profesional, transparan dan bertanggung jawab.
- b. Menciptakan suasana kehidupan yang demokratis guna menunjang peningkatan kualitas pembangunan politik.

- c. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan organisasi politik agar lebih mandiri, profesional serta memiliki budaya politik yang demokratis.

3. Program Pembangunan

- a. Program peningkatan pembinaan dan pendidikan politik masyarakat, dengan kegiatan :
 - 1) Inventarisasi Orsospol di Propinsi Riau
 - 2) Optimalisasi fungsi-fungsi kelembagaan politik
 - 3) Pemetaan resolusi konflik lokal di Propinsi Riau
 - 4) Peningkatan pendidikan politik kewargaan untuk tokoh adat dan agama.
 - 5) Versifikasi partai politik di Propinsi Riau
 - 6) Pengumpulan data persiapan pelaksanaan Pemilu
- b. Program peningkatan pembinaan organisasi masyarakat, dengan kegiatan :
 - 1) Pembinaan organisasi masyarakat.

D. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

1. Umum

Hasil pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan dalam rangka perlindungan masyarakat selama ini telah menunjukkan kemajuan meskipun masih mengandung beberapa kelemahan. Implikasi kelemahan itu dapat dilihat pada aspek kuantitas dan tingkat kemampuan profesionalisme personil yang kurang memadai.

Dengan demikian, relatif rendahnya kualitas dan kuantitas dibandingkan dengan frekuensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, maka berdampak pada minimnya jaminan rasa aman dan ketentraman di kalangan masyarakat. Rasa tidak aman itu dapat dilihat dari banyak terjadinya perampokan, pemerkosaan, pencurian, dan pembunuhan serta tindakan kriminalitas lainnya.

Kelembagaan keamanan diakui eksistensinya sebagai pelindung masyarakat dari segala bentuk ancaman. Oleh karena itu, kehadiran LINMAS yang berfungsi sebagai lembaga yang memberikan perlindungan masyarakat memiliki misiluhur yakni mewujudkan ketertiban masyarakat.

Perlindungan masyarakat tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada POLRI sebagai penegak hukum dan perlindungan masyarakat. Maka itu, harus didukung oleh partisipasi masyarakat guna mensikapi gangguan, sehingga tercipta masyarakat yang tertib dan aman.

2. Arah Kebijakan

- a. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, dalam upaya peningkatan penegakan hukum dan pelayanan masyarakat secara transparan, profesional dan berkeadilan.
- b. Meningkatkan kordinasi antar instansi terkait dalam penanganan setiap masalah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- c. Meningkatkan upaya pengamanan terhadap proyek-proyek strategis dan kekayaan daerah dari ancaman pencurian, eksploitasi dan eksploitasi secara semena-mena oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan pengambilan secara sepihak tanpa melalui prosedur yang berlaku.

3. Program Pembangunan

- a. Program pembinaan kemandirian dan ketertiban masyarakat, dengan kegiatan :
 - 1) Pembinaan dan pengembangan SATPOL-PP Propinsi
 - 2) Pelatihan keterampilan penyelamatan SAR
 - 3) Peningkatan KAMTIBMAS

4.6.3. Pembinaan dan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1. Umum

Kebebasan mengemukakan pendapat belakangan ini, cenderung kebablasan, bahkan arogan, sehingga kurang memperhatikan kaedah demokrasi dan cita-cita reformasi. Akibatnya, masyarakat belum selektif dengan segala informasi yang dipublikasi, sehingga menimbulkan pro dan kontra dalam mensikapi kebijakan-kebijakan pemerintah. Masyarakat terombang ambing karena profokator, hal ini disebabkan oleh lemahnya data dan informasi yang diperoleh masyarakat. Apalagi kondisi kehidupan ekonomi masyarakat yang lemah, sehingga mudah dipengaruhi karena alasan ekonomi. Aspirasi masyarakat belum terpenuhi secara maksimal, karena aspirasi rakyat belum terartikulasi dengan sempurna dan transparan dan konsisiten. Distorsi atas aspirasi, kepentingan dan kekuasaan masih sangat terasa yang datangnya dari elite Penerangan, Komunikasi dan Media Massa, penyelenggara negara, pemerintahan maupun kelompok-kelompok tertentu.

Kelembagaan penerangan, komunikasi dan media massa yang diakui eksistensinya sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat, harus berfungsi sebagai alat kontrol bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sekaligus berfungsi memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Sebab, kehadiran institusi penerangan dalam era otonomi daerah hendaknya menjadi media obyektif dalam rangka pencerdasan masyarakat.

2. Arah Kebijakan

- a. Meningkatkan sistem informasi daerah untuk memenuhi kebutuhan informasi secara tepat, cepat, meluas dan terpadu.
- b. Meningkatkan kemampuan dan kegiatan komunikasi dan informasi dan media massa dalam mengarahkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.
- c. Mengoptimalkan pembangunan media komunikasi dan informasi untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.
- d. Meningkatkan jangkauan pelayanan komunikasi, informasi dan media massa.
- e. Mewujudkan kondisi yang kondusif bagi kehidupan pers dan media massa yang demokratis, bebas, objektif, berimbang, bermoral dan beretika sesuai dengan nilai-nilai budaya dan agama.

3. Program Pembangunan

- a. Program pengembangan sistem informasi, dengan kegiatan :
 - 1) Pendidikan dan pelatihan operator sistem informasi manajemen pembanguna daerah.
 - 2) Pengadaan hardware sistim informasi manajemen.
 - 3) Pengadaan sistem jaringan loncat lokal area net work (LAN).
 - 4) Pengadaan sistem Riau online
- b. Program pembinaan dan pengembangan radio, televisi dan film dengan kegiatan :
 - 1) Rehabilitasi relay mini TVRI.
 - 2) Pembangunan pemancar FM RRI.
 - 3) Pengadaan kamera betacam liputan TVRI.
 - 4) Pengembangan sarana dan pra sarana TVRI dan RRI.
- c. Program peningkatan pembinaan dan pengembangan kelembagaan informasi, komunikasi, media massa dan lembaga kewartawanan dengan kegiatan :
 - 1) Pelatihan insan pers dan lembaga kewartawanan.

BAB V PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA

5.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Di dalam pengelolaan Pembangunan Daerah evaluasi adalah merupakan bagian yang penting. Evaluasi dilakukan untuk memperoleh umpan balik dari pelaksanaan rencana pembangunan, sehingga secara dini dapat dibenahi penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan pembangunan dari rencana pembangunan dengan demikian dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan yang tepat sasaran dan tepat waktu.

Keberhasilan atau kegagalan Pemerintah Propinsi Riau akan dievaluasi berdasarkan kerangka pengukuran kinerjanya yang disusun melalui cara menetapkan indikator-indikator kinerja. Indikator-indikator kinerja ini menggambarkan secara tepat keadaan-keadaan sebab dan akibat dalam strategi pembangunan.

Di dalam melakukan evaluasi kinerja indikator-indikator yang digunakan meliputi:

- a. Dampak, yaitu dampak terhadap kondisi makro yang ingin dicapai.
- b. Manfaat, yaitu manfaat yang dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat maupun Pemerintah.
- c. Hasil, yaitu pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan kebijakan atau program yang telah dilaksanakan.
- d. Keluaran, yaitu bentuk produk yang dihasilkan langsung oleh kebijakan atau program, berdasarkan masukan yang digunakan.
- e. Masukan, yaitu besaran sumber-sumber yang digunakan.

Dalam rangka memilih indikator kinerja, diupayakan pengukuran dilakukan secara mudah dan murah, untuk itu pengukuran kinerja sedapat mungkin merupakan kegiatan yang melekat pada proses penyelenggaraan pembangunan sehingga tidak menimbulkan biaya yang berlebihan. Selanjutnya untuk keperluan pembuktian, maka dapat digunakan laporan-laporan yang dikeluarkan oleh Dinas, Badan Pusat Statistik (BPS) dan pihak-pihak ketiga (konsultan dan pusat-pusat kajian/studi sebagai sumber informasi).

Indikator kinerja yang digunakan dalam rangka evaluasi, dibedakan berdasarkan hirarki di tingkat Gubernur dan di tingkat Dinas. Di tingkat Dinas, besarnya rencana strategis hanya bersifat taktis bagi gubernur. Untuk melakukan pengukuran kinerja, perlu dikembangkan dokumen-dokumen yang dipakai untuk mencatat pencapaian kinerja yang disepakati dalam matriks rencana strategi.

Di dalam matriks rencana strategi sebagai *dash board* Gubernur, indikator-indikator kinerja yang dipilih adalah komponen strategis dalam rencana strategis yang mencakup pada pencapaian tiga besaran, yaitu tujuan, sasaran dan hasil-hasil pembangunan. Sedangkan Dinas menyusun matriks rencana strategi berdasarkan program-program serta kegiatan-kegiatan sebagai besaran matriks rencana strategis.

Setiap indikator kinerja yang dipilih, ditetapkan standar kinerjanya yang merupakan besaran-besaran target yang harus dicapai. Standar kinerja tersebut dapat dinyatakan sebagai batas bawah (***lower bound target***) yang masih dapat diterima atau batas atas (***upper bound target***) yang masih dapat diterima indikator pengukuran kerja yang dikenakan pada setiap program dan kegiatan yang terdiri dari 5 (lima) tolok ukur di atas, disesuaikan dengan :

- a. Laporan perhitungan APBD.
- b. Nota Perhitungan APBD.
- c. Laporan Aliran Kas
- d. Neraca Daerah
- e. Laporan Pertanggung Jawaban Gubernur

5.2. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja pemerintah merupakan suatu proses umpan balik atau kinerja masa lalu, yang berguna untuk meningkatkan produktivitas di masa mendatang. Evaluasi kinerja merupakan evaluasi yang menyeimbangkan antara tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam kerangka itu, evaluasi kinerja pemerintah Daerah Propinsi akan meliputi 3 (Tiga) hal, yaitu :

a. Evaluasi Kinerja Kegiatan.

Evaluasi kinerja kegiatan merupakan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah dalam kurun waktu tertentu, yaitu menunjukkan penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan sasaran dasar tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis. Rujukannya adalah indikator kinerja yang telah ditetapkan, baik input, output, outcomes, benefit dan impact serta pencapaiannya.

b. Evaluasi Kinerja Program

Evaluasi kinerja program merupakan hasil komulatif dari berbagai kegiatan. Evaluasi kinerja program Pemerintah daerah dilakukan dengan cara mengambil hasil dari setiap nilai pencapaian kinerja kegiatan kemudian memberikan pembatasnya, untuk kemudian dapat diproses nilai pencapaian strategi program.

c. Evaluasi Kinerja Kebijakan

Evaluasi kinerja kebijakan merupakan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan serta peraturan-peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang telah dikeluarkan, untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur Pemerintah Daerah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, yujuan, visi dan misi seefektifitasnya, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas serta ketepatannya.

Selanjutnya untuk memberikan arahan kepada unit kerja lingkup Pemerintah Provinsi Riau di dalam menjabarkan kebijakan dan program yang sudah ditetapkan dalam bentuk kegiatan pada masing-masing instansi yang bersangkutan, perlu ditetapkan pencapaian kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk meyakini dan mengevaluasi pencapaian indikator kinerja pelaksanaan kegiatan, program kebijakan yang ada dalam rencana strategis (Renstra). Untuk memudahkan dalam mengevaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan masing-masing instansi, maka dapat digunakan formulir pengukuran kinerja dengan formulasi sebagai berikut :

PENGUKURAN KINERJA											
Instansi											Formulir
Tahun											
No	Kebijaksanaan	Program	Kegiatan	Penetapan Indikator Kinerja		Penetapan Capaian Indikator Kinerja					
				Indikator Kinerja	Satuan	Rencana	Realisasi	Capaian Indikator Kinerja (%)	Bobot Indikator Kinerja (%)	Hasil Capaian Indikator Kinerja (%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Input Output Outcomes Benefits Impact		Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja input					
						Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja output					
						Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja outcomes					
						Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja benefits					
						Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja impacts					

I. Dengan Asumsi :

Semakin tinggi realisasi, menggambarkan pencapaian indikator kinerja semakin baik

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

II. Dengan :

Semakin tinggi realisasi, menunjukkan semakin rendah Pencapaian Kinerja

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

III. Nilai Capaian Indikator Kinerja

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Capaian Indikator Kinerja} - \text{Bobot Indikator Kinerja}}{100 \%}$$

Evaluasi kinerja, meliputi 3 (tiga) tingkatan yaitu :

- (a) Evaluasi Kinerja Kegiatan
- (b) Evaluasi Program
- (c) Evaluasi Kebijakan

(a) Evaluasi Kinerja Kegiatan

Instansi :

Tahun :

No	Program	Kegiatan	Kelompok Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja (%)	Bobot Indikator Kinerja (%)	Nilai Capaian Indikator Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
		Inputs Outputs Benefits Outcomes Impacts				
			Jumlah Nilai	Capaian		

Kinerja

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Capaian Indikator Kinerja} \times \text{Bobot Indikator}}{100 \%}$$

(b) Evaluasi Kinerja Program

Instansi :

Tahun :

No	Kebijakan	Program	Kegiatan	Nilai Capaian Kegiatan (%)	Bobot Kegiatan (%)	Nilai Capaian Akhir Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7

$$\text{Nilai Capaian Akhir Kegiatan} = \frac{\text{Nilai Capaian Kegiatan} \times \text{Bobot Kegiatan}}{100 \%}$$

(c) Evaluasi Kinerja Kebijakan

Instansi :

Tahun :

No	Kebijakan	Program	Nilai Capaian Program (%)	Bobot Program (%)	Nilai Capaian Akhir Program (%)
1	2	3	4	5	6

$$\text{Nilai Capaian Akhir Program} = \frac{\text{Nilai Capaian Program} \times \text{Bobot Program}}{100 \%}$$

5.3. Kesimpulan Hasil Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja dilaksanakan dengan menghitung nilai pencapaian dan pelaksanaan setiap kegiatan, kemudian dilanjutkan dengan menghitung pencapaian kinerja dan pelaksanaan program yang didasarkan pada pembatasan dari setiap kegiatan yang ada didalam suatu program. Sedangkan evaluasi kinerja kebijakan dilaksanakan melalui evaluasi dan aspek-aspek efektifitas efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas serta ketepatan kebijakan yang bersangkutan terhadap kondisi yang berkembang.

Langkah selanjutnya dalam proses pengukuran kinerja adalah membuat kesimpulan. Kesimpulan hasil evaluasi akan memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai kerja instansi pemerintah. Kinerja instansi pemerintah dalam hal ini dapat dinilai dengan skala pengukuran ordinat misalnya :

- 85 s/d 100 - Sangat baik
- 70 s/d 85 - Baik
- 55 s/d 70 - Sedang
- < 55 - Kurang baik

5.4. Analisa Pencapaian Akuntabilitas Kinerja

Pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan/kegagalan dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja, tetapi harus menyajikan data dan informasi relevan lainnya yang dapat digunakan pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan tersebut secara luas dan mendalam.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyampaian kesimpulan hasil evaluasi perlu dibuat analisa pencapaian akuntabilitas kinerja secara keseluruhan. Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dan program dengan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategis. Di dalam analisis ini, perlu pula dijelaskan proses dan nuansa pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien, efektif dan ekonomis sesuai dengan kebijaksanaan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Disamping itu perlu dilakukan analisa terhadap komponen-komponen penting dalam evaluasi kinerja yang mencakup analisis *input*, *output*, *analisis* realisasi *output* dan *benefit*, analisis *impacts* baik positif maupun negatif, analisis proses pencapaian indikator-indikator kinerja, analisis keuangan dan analisa kebijakan.

Analisis tersebut dilakukan dengan cara membandingkan indikator kinerja dengan realisasi yaitu :

- a. Perbandingan antara kinerja dan kinerja mmmm yang direncanakan.
- b. Perbandingan antara kinerja nyata dari tahun-tahun sebelumnya.
- c. Perbandingan kinerja suatu instansi dengan instansi lain yang unggul dibidangnya atau dengan sektor swasta.
- d. Perbandingan kinerja nyata antara kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.

Bagi pemerintah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, perlu ditetapkan standar yang berkaitan dengan penggunaan jasa layanan pemerintah, dengan memperhatikan standar internasional dan kendala-kendala serta tingkat kepuasan yang diinginkan masyarakat pelanggan.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja suatu instansi, terutama yang sifatnya lintas sektoral, digunakan indikator-indikator ekonomi, sosial atau indikator lainnya baik yang bersifat nasional internasional, seperti :

- a. Indeks pembangunan manusia.
- b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
- c. Produk Domestik Regional Bruto Perkapita.
- d. Tingkat inflasi, ekspor, import.
- e. Tingkat kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan.
- f. Tingkat kematian bayi, ibu melahirkan balita.
- g. Tingkat kesehatan, ibu dan anak.
- h. Tingkat kesehatan gizi masyarakat.
- i. Tingkat usia harapan hidup rata-rata penduduk dan sebagainya.

BAB 6 MATRIKS : DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN Daerah Propinsi Riau Tahun 2001-2003

No.	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan (Tahun)			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Bobot (%)				
			2001	2002	2003		2001	2002	2003		
1	Pembangunan dalam rangka meningkatkan iman dan taqwa	Peningkatan sarana kehidupan beragama	Menunjang pembangunan ibadah 300 unit Pembangunan/renovasi masjid Annur Peningkatan sarana ibadah haji	Menunjang ibadah 50 unit Pembangunan/renovasi masjid Annur pekanbaru sebagai pusat pengembangan Islam (Islamic Center) Bantuan sarana dan prasarana ibadah haji.	Menunjang pembangunan ibadah 50 unit Pembangunan/renovasi pekanbaru sebagai pusat pengembangan Islam (Islamic Center) Bantuan sarana dan prasarana ibadah haji.	Input	Dana Kegiatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Manusia	2.73	3.46	3.49	
						Output	Terlaksana Pembangunan, renovasi dan Rehabilitasi Rumah Ibadah dan berbagai sarana Ibadah lainnya				
						Outcome	Sarana dan Prasarana dan kehidupan beragama berfungsi dengan baik.				
						Benefit	kehidupan beragama berlangsung dengan baik dan lancer serta terciptanya kondisi yang kondusif				
							Impact	Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana kehidupan beragama yang layak dan memadai			
		Peningkatan pelayanan kehidupan beragama	Peningkatan pelayanan ibadah haji	Penunjang pengembangan sarana ibadah haji Pembinaan dan pengembangan lembaga (badan zakat, infak dan sedekah (Basis)	Pemantapan pelayanan ibadah haji Pembinaan dan pengembangan lembaga (badan zakat, infak dan sedekah (Basis)	Input	Dana Kegiatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Manusia	0.05	0.06	0.04	
						Output	Pemantapan dan peningkatan pelayanan ibadah keagamaan Peningkatan lembaga keagamaan				
						Outcome	Pelayanan Ibadah keagamaan/kehidupan beragama lainnya terlaksana dengan baik Lembaga sosial keagamaan berfungsi dengan baik				
						Benefit	Masyarakat semakin merasakan kemudahan akan fasilitas dan kenyamanan kehidupan beragama.				
							Impact	Aktivitas keamanan semakin marak			
		Pembinaan kerukunan hidup beragama	Pelatihan Da'i motivator pembangunan	Pembinaan MDA dan Guru mengaji 120 org Pelatihan Guru TK Alquran TQA 1210 org Festival anak saleh Pendataan rumah ibadah dan TPA Pembangunan TPA 1 unit Pembinaan seni budaya keagamaan (tamadun) 1 akt	Pembinaan MDA dan guru mengaji 150 org Penyuluhan dan pengendalian penyakit masyarakat (pekat) apresiasi kebijakan tentang kerukunan umat beragama Pembinaan remaja masjid Pelatihan guru seni baca Alquran Forum komunikasi antar umat beragama Pembinaan seni budaya keagamaan (tamadun)3 akt	Input	Dana Kegiatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Manusia	0.04	0.13	0.13	
						Output	Peningkatan pengetahuan pemahaman dan pengamatan nilai-nilai agama. Memantapkan kerukunan hidup beragama				
Outcome	Meningkatnya mutu dan moralitas, perilaku Lembaga keagamaan berfungsi dengan baik meningkatnya kerukunan hidup beragama antar umat										
Benefit	Nilai-nilai agama sebagai landasan kehidupan masyarakat semakin tertanamkan dengan sempurna Kerjasama antar umat beragama										
					Impact	Komunikasi antar umat beragama semakin lancer Kondisi masyarakat semakin kondusif Tercapainya hidup rukun dan sejahtera Berkurangnya hidup ego bermasyarakat antar umat beragama semakin sinerjis					
Peningkatan kualitas pendidikan agama	Pembangunan Pesantren Teknologi dipekanbari 1,6%	Pembangunan Pesantren Teknologi di Pekanbaru dikerjakan 25,6% Pengembangan Pesantren	Pembangunan Pesantren Teknologi di Pekanbaru dikerjakan 27,9% dan sisanya akan diselesaikan pada T.A 2004 dan 2005 Prasaran pendidikan keagamaan (pembangunan UGB) revitalisasi dan rehabilitasi MTs, Pondok Pesantren dan MDA 40 unit	Input	Dana Kegiatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Manusia	0.72	0.98	0.99			
				Output	Pembangunan Pesantren Teknologi Riau						
				Outcome	Pengembangan sarana dan prasarana Pendidikan Tradisional Keagamaan (Pesantren, MDA, MTs, TPA dsb)						

2	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia	<p>Pendidikan dasar, Sekolah Luar Biasa dan Pra Sekolah</p> <p>Pendidikan Menengah dan Kejuruan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Revitalisasi dan rehabilitasi SD/MI 147 unit Manajemen Training Kepala dan calon Kepala 120 org Penerapan pola pembelajaran kooperatif (1 paket) Training persiapan UMPTN siswa Aliyah 280 org Bantuan kesejahteraan Guru MDA dan Mts 500 org pelatihan Penyetaraan D-II GPAI SD/MI 2.100 Modul Pengadaan buku pembelajaran guru MDA 7000 eks Buku pegangan guru dan siswa pendidikan agama 3.000 buah Alat peraga pendidikan agama 600 set PGSD D-II 100 orang Setara D-II BLJJ 9.741 orang S1 guru Daerah terampil 50 org Bantuan kesejahteraan guru 43.656 org Pengadaan buku bacaan dan pegangan guru 1.500 SD/MI Pengadaan alat peraga dan alat penunjang lainnya 3.500 SD/MI bantuan Modal Usaha Daerah sulit/tepencil 9 lokasi alat peraga pendidikan agama 600 set PGSD D-II 100 orang 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan sarana fisik pendidikan dasar, sekolah luar biasa dan pra sekolah 18 unit Peningkatan mutu tenaga pengajaran dasar 15 kegiatan Peningkatan prasarana pendidikan dasar 1.602 paket Pengadaan buku pelajaran pokok siswa, pegangan guru, bacaanmuatan local dan perpustakaan alat Bantu pengajaran, peta prop. Kab/kota, alat peraga dan alat penunjang 535.000 eks 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan sarana fisik pendidikan dasar, sekolah luar biasa dan pra sekolah 15 unit Peningkatan tenaga pendidikan dasar 18 kegiatan Peningkatan prasarana pendidikan dasar 1.926 paket Pengadaan buku pelajaran pokok siswa, pegangan guru, bacaanmuatan local dan perpustakaan alat Bantu pengajaran, peta prop. Kab/kota, alat peraga dan alat penunjang 642.000 eks Bantuan block grant kepala sekolah Sosialisasi kurikulum 200216 Kab/Kota 	<p>Input Dana 45% gedung SD/MI mengalami rusak ringan sedang & berat dari 3.374 gedung SD/MI yang ada 13.206 anak usia 7-12 tahun yang belum tertampung di SD/MI Peralatan, buku pokok, buku bacaan SD/MI terbatas disekolah 65% dari 3.374 kepala Sekolah belum mengikuti Manajemen Skill Training Kualifikasi pendidikan Guru SD/MI belum memenuhi standar. Kesejahteraan guru belum memadai Buku pokok dan buku bacaan/muatan lokal, perpustakaan serta alat peraga SD/MI masih terbatas</p> <p>Output 180 gedung SD/MI dapat di Revitalisasi/rehabilitasi 1.177.000 paket buku terdistribusi disekolah 3.528 peralatan terdistribusi 120 org Kepala dan calon Kepala Sekolah dapat dilatih 10.316 guru SD/MI mengikuti penyetaraan D-III dan S1 43.656 guru SD/MI dapat diberi kesjahteraannya Buku pokok dan buku bacaan/muatan local, perpustakaan serta peralatan IPA Sd/MI sebanyak 55 pkt</p> <p>Outcome Standarisasi Gedung SD/MI sesuai type sekolah Kebutuhan buku dan peralatan disekolah secara bertahap dapat terpenuhi Manajemen pengelolaan sekolah SD/MI menjadi baik Kemampuan mengajar guru lebih meningkat menjadi baik Motivasi guru dalam mengajar meningkat Kekurangan buku pokok dan bacaan/muatan local Perpustakaan serta peralatan IPA pada sekolah terpenuhi secara bertahap menjadi baik</p> <p>Benefit Kenyamanan siswa dlm belajar menjadi lebih baik Motivasi guru dan siswa lebih meningkat Kualitas sarana prasarana terpenuhi Pengelolaan sekolah menjadi lebih efektif Standar kualifikasi pendidikan terpenuhi Pengelolaan sekolah menjadi lebih efektif Taraf hidup guru secara bertahap menjadi layak KBM menjadi aktif Minat baca meningkat Efektivitas KBM dan daya serap tercapai</p> <p>Impact Proses Kegiatan Belajar Mengajar meningkat 26.480 siswa SD/MI layak belajar di sekolah Mutu hasil belajar baik Mutu pengelolaan sekolah menjadi tertib Metode mengajar guru menjadi lebih baik Konsentrasi mengajar guru menjadi lebih baik Proses KBM di sekolah menjadi baik Mutu hasil belajar meningkat</p>	11.32	7.69	7.88
			<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan sarana SLTP kecil dan revitalisasi 39 unit Peningkatan SMP kecil menjadi SMP reguler 21 unit Pegadaan peralatan kantor dan genset SLTP kecil 30 unit Pembangunan sarana SMU Nomor type 40 unit Pembangunan UGB SMK 2 unit bantuan biaya beasiswa pendidikan bantuan beasiswa bid.kesehatan Pengadaan meublie 2 unit Pengadaan peralatan UGB 2 unit Pekerjaan pagar dan taman Pembuatan jalan, lapangan parker dan drainase jalan Pembuatan saluran induk Pemasangan instalasi, telepon dan air 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan SLTP kecil serta meubilier, 8 unit Pembangunan ruang kelas baru beserta meubilier, 80 ruang Rehabilitasi SLTP/MTs 3.864 M2 (8 unit) Pengadaan alat peraga dan alat penunjang SLTP/MTs 120 unit Pengadaan buku pelajaran, buku perpustakaan, peta Propinsi, Kab/Kota, 188.500 eks Peningkatan sarana fisik pendidikan menengah dan kejuruan 18 unit Pemberian beasiswa bagi siswa SMU, MA dan SMK kurang mampu bakat, minat dan berprestasi 3.500 siswa Peningkatan mutu tenaga pendidikan menengah dan kejuruan 34 keg TOT dan pelatihan gurumata pelajaran umum dan agama, SBM, Work shop, lokakarya, 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan SLTP kecil serta meubilier, 4 unit Pembangunan ruang kelas baru beserta meubilier, 40 ruang Rehabilitasi SLTP/MTs 1.932 M2 (4 unit) Pengadaan alat peraga dan alat penunjang SLTP/MTs 145 unit Pengadaan buku pelajaran, buku perpustakaan, peta Propinsi, Kab/Kota, 226.200 eks Peningkatan sarana fisik pendidikan menengah dan kejuruan 12 unit Pemberian beasiswa bagi siswa SMU, MA dan SMK kurang mampu bakat, minat dan berprestasi 3.850 siswa Peningkatan mutu tenaga kependidikan menengah dan kejuruan 42 keg TOT dan pelatihan guru mata pelajaran umum dan agama, SBM, work shop, 	<p>Input 83.000 anak usia 13-15 Tahun belum tertampung di SLTP/MTs Peralatan, buku pokok, buku bacaan SLTP/MTs terbatas di sekolah Buku poko dan bacaan/ muatan lokal, perpustakaan serta alat peraga IPA SLTP/MTs masih terbatas 48% penduduk usia 16-18 Tahun belum tertampung 31 kecamatan belum memiliki SMU negeri Lulusan SMK belum siap pakai Mutu hasil belajar belum memuaskan Lulusan sekolah menengah pertanian dan perikanan belum siap Mutu hasil belajar belum standar 51 gedung SLTP MTs dibangun/ditingkatkan status dari SMP kecil menjadi reguler</p> <p>Output Terlaksananya pengadaan peralatan 295 paket untuk SLTP/MTs Buku pokok dan bacaan/muatan lokal, perpustakaan SLTP/MTs sebanyak 414.700 paket Terlaksananya pembangunan gedung SMU 66 unit dan SMK 6 unit Terlaksananya pelatihan guru SMA/MA/SMK 76 kgt Menurunnya anak putus sekolah/drop out sebanyak 7.380 siswa</p>	16.04	12.71	12.50

		bersih Rehabilitasi bangunan, pembuatan instalasi air dan listrik Pengadaan sarana pendidikan Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidikan 43.654 orang Peningkatan sarana dan prasarana SPMA marpoyan pekanbaru, 1 paket	pengawas, pada SMU/MA dan SMK Penyusunan standar kompetensi guru SMU/MA dan SMK Sertifikasi D-III dan setara S1, S2 Peningkatan prasarana pendidikan menengah dan kejuruan 97 paket Pengadaan buku pelajaran pokok siswa, pegangan guru, bacaan dan perpustakaan pada SMU, MA dan SMK Pengadaan alat Bantu pelajaran SMU/MA dan SMK Peningkatan sarana, prasarana dan mutu sekolah kejuruan lainnya 8 sekolah Pembangunan dan pengembangan sekolah unggul, plus, model dan binaan 16 Kab/Kota Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidikan 53.636 orang peningkatan sarana dan prasarana SPMA marpoyan pecanbaru, 1 paket Peningkatan sekolah pertanian pembangunan usaha perikanan menengah (SPP-SUPM) dumai 1 paket	lokakarya, pengawas, pada SMU/MA dan SMK Penyusunan standar kompetensi guru SMU/MA dan SMK Sertifikasi D-III dan setara S1, S2 Peningkatan prasarana pendidikan menengah dan kejuruan 102 paket Pengadaan buku pelajaran pokok siswa, pegangan guru, bacaan dan perpustakaan pada SMU, MA dan SMK Pengadaan alat bantu pelajaran SMU/MA dan SMK Peningkatan sarana prasarana dan mutu sekolah kejuruan lainnya 12 sekolah Lanjutan pembangunan dan pengembangan sekolah unggul, plus, model dan binaan 16 Kab/kota Peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan 53.636 orang Peningkatan sarana dan prasarana SPMA marpoyan pekanbaru 1 paket Peningkatan sekolah pertanian pembangunan usaha perikanan menengah (SPP-SUPM) dumai 1 paket	Meningkatnya mutu lulusan SMU/SMK Terselenggaranya pelatihan guru umum dan agama 199 paket prasarana pendidikan telah didistribusikan ke sekolah-sekolah 53.636 guru dapat diberi kesejahteraannya Terpenuhinya standar prasarana sekolah kejuruan pertanian dan perikanan 4 paket								
Pembinaan dan pengembangan pendidikan tinggi	Pembangunan sarana dan prasarana (infrastruktur)	Pembinaan dan pengembangan pendidikan tinggi 18 pt Pendidikan Tinggi Negeri Pendidikan Tinggi Swasta Pembinaan dan pengembangan pendidikan tinggi sains dan teknologi Akademi Teknik/Politeknik Fakultas Teknik Fakultas Kedokteran Akademi Kebidanan	Pembinaan dan pengembangan pendidikan tinggi 18 pt Pendidikan Tinggi Negeri Pendidikan Tinggi Swasta Pembinaan dan pengembangan pendidikan tinggi sains dan teknologi Akademi Teknik/Politeknik Fakultas Teknik Fakultas Kedokteran Lanjutan Akademi Kebidanan	Pembinaan dan pengembangan pendidikan tinggi 18 pt Pendidikan Tinggi Negeri Pendidikan Tinggi Swasta Pembinaan dan pengembangan pendidikan tinggi sains dan teknologi Akademi Teknik/Politeknik Fakultas Teknik Fakultas Kedokteran Lanjutan Akademi Kebidanan	Outcome Standar pelayanan pendidikan bagi masyarakat sesuai dengan tipe sekolah Kualitas hasil belajar memuaskan Motivasi siswa untuk sekolah meningkat Kualitas hasil belajar siswa SMU/MA dan SMK menjadi lebih baik Motivasi siswa untuk sekolah meningkat Motivasi guru dalam mengajar meningkat Meningkatnya kualitas lulusan dan keterampilan siswa sekolah kejuruan Benefit • Pengelolaan UPT sekolah menjadi baik • Semakin meningkatnya pelayanan pendidikan • Tercapainya sasaran pendidikan • Proses belajar mengajar menjadi efektif dan efisien • Peralatan sekolah bertahap dapat terpenuhi • Taraf hidup guru secara bertahap menjadi layak • Standarisasi kualitas lulusan siap pakai Impact • Proses Kegiatan Belajar Mengajar menjadi baik • Daya tampung usia, 13-15 dan 16-18 tahun meningkat • Mutu lulusan SMK siap pakai • Angka putus sekolah menurun • Kualitas lulusan SLTP/MTs, SMU/SMK dan MA baik • Prasarana pendidikan meningkat • Konsentrasi mengajar menjadi lebih baik • Proses kegiatan belajar mengajar menjadi lebih baik	Input • Keberadaan perguruan tinggi serata sarana dan prasarana belum memadai	Output • Terbangunnya 1 (satu) Fakultas Kedokteran • Bantuan prasarana perguruan tinggi 18 dan politeknik 18 paket negeri dan swasta	Outcome • Kualitas lulusan perguruan tinggi menjadi lebih baik • Kekurangan tenaga medis secara bertahap terpenuhi	Benefit • Meningkatkan SDM bidang pendidikan • Pelayanan kesehatan masyarakat terjangkau	Impact • Meningkatnya kualitas lulusan perguruan tinggi negeri dan swasta • Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	2.82	6.86	7.03
Pembinaan pendidikan Non formal dan luar sekolah, perpustakaan dan pengembangan IPTEK	Pengadaan buku bacaan dan kelengkapan buku perpustakaan Pengadaan buku bacaan dan kelengkapan buku perpustakaan Pengembangan perpustakaan	Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan non formal dan luar sekolah Pemabangunan aula, work shop, dan pengadaan sarana belajar Pengadaan buku pelajaran pokok siswa, pegangan guru, bacaan muatan lokal dan perpustakaan alat Bantu pelajaran/alat peraga 32 paket Peningkatan jangkauan pelayanan warga belajar kejar paket A dan B 7 paket Peningkatan dan pengembangan perpustakaan Pemasarakatan dan pengembangan perpustakaan, 22 paket Pembinaan dan pemsarakatan Bahasa Indonesia, 2 kegiatan Lomba IPTEK dan ilmu terapan tingkat SD/MI, SLTP/MTs, SMU/MA, SMK, Pondok Pesantren dan Perguruan Tinggi	Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan non formal dan luar sekolah Pemabangunan aula, work shop, dan pengadaan sarana belajar Pengadaan buku pelajaran pokok siswa, pegangan guru, bacaan muatan lokal dan perpustakaan alat Bantu pelajaran/alat peraga 32 paket Peningkatan jangkauan pelayanan warga belajar kejar paket A dan B 7 paket Peningkatan dan pengembangan perpustakaan Pemasarakatan dan pengembangan perpustakaan, 28 paket Pembinaan dan pemsarakatan Bahasa Indonesia, 2 kegiatan Lomba IPTEK dan ilmu terapan tingkat SD/MI, SLTP/MTs, SMU/MA, SMK, Pondok Pesantren dan Perguruan Tinggi	Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan non formal dan luar sekolah Pemabangunan aula, work shop, dan pengadaan sarana belajar Pengadaan buku pelajaran pokok siswa, pegangan guru, bacaan muatan lokal dan perpustakaan alat Bantu pelajaran/alat peraga 32 paket Peningkatan jangkauan pelayanan warga belajar kejar paket A dan B 7 paket Peningkatan dan pengembangan perpustakaan Pemasarakatan dan pengembangan perpustakaan, 28 paket Pembinaan dan pemsarakatan Bahasa Indonesia, 2 kegiatan Lomba IPTEK dan ilmu terapan tingkat SD/MI, SLTP/MTs, SMU/MA, SMK, Pondok Pesantren dan Perguruan Tinggi	Input • Keterampilan masyarakat dan anak-anak putus sekolah masih rendah • Minat baca masyarakat masih kurang • Motivasi bidang IPTEK masih rendah	Output • Terlaksananya 32 pkt pengadaan dan pelatihan keterampilan masyarakat dan anak putus • Terpenuhinya 50 paket kekurangan buku pada perpustakaan Daerah • Terlaksananya lomba IPTEK/Ilmu Terapan bagi siswa SD s/d Perguruan Tinggi	Outcome • Kualitas keterampilan SD/MI menjadi lebih baik • Kemampuan mengajar masyarakat dan putus sekolah secara bertahap bertahap dapat meningkat • Minat baca masyarakat dan pelajar bertambah • Motivasi siswa dan mahasiswa di bidang IPTEK lebih meningkat	0.19	0.22	0.23			

				<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sarana dan prasarana balai teknologi dan pelatihan pendidikan Propinsi Riau Peningkatan SDM petani nelayan Prop. Riau Pengembangan SDM petambak sebanyak 20 kk Pengembangan SDM pengolahan pengolahan hasil perikanan (pemanggangan, pembuatan terasi dan kerupuk udang) untuk 15 KK petani nelayan Pengembangan SDM, perikanan tangkap (pengembangan siswa SUPM dalam rangka sertifikasi MPL) 30 orang siswa Pengembangan SDM, pembudidayaan ikan air tawar (pemanggangan, perkolam) sebanyak 20 kk 	<ul style="list-style-type: none"> Pondok Pesantren dan Perguruan Tinggi Pengembangan sarana dan prasarana balai teknologi dan pelatihan pendidikan Propinsi Riau Pengembangan SDM penambak sebanyak 120 KK Pengembangan SDM pengolahan pengolahan hasil perikanan (pemanggangan, pembuatan terasi dan kerupuk udang) untuk 15 KK petani nelayan Pengembangan SDM, perikanan tangkap (pengembangan siswa SUPM dalam rangka sertifikasi MPL) 30 orang siswa Pengembangan SDM, pembudidayaan ikan air tawar (pemanggangan, perkolam) sebanyak 20 kk Pengembangan budidaya laut sebanyak 120 kk Pengembangan SDM nelayan peikanan umum sebanyak 100 kk 	<ul style="list-style-type: none"> Benefit <ul style="list-style-type: none"> Kualitas pelayanan masyarakat dan putus sekolah menjadi lebih efektif Meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat pelajar Kecintaan pelajar dan mahasiswa dibidang IPTEK secara bertahap meningkat Impact <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya keterampilan dan nilai masyarakat dan anak putus sekolah Meningkatnya minat pelajar dan masyarakat untuk membaca buku perpustakaan Meningkatnya kecintaan siswa dan mahasiswa dibidang IPTEK 			
	Perencanaan dan pengawasan program dan jaringan kerjasama pendidikan dan pengembangan partisipasi masyarakat/dunia usaha		<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan data base pendidikan Propinsi Riau, kegiatan Penyusunan program pendidikan Propinsi Riau, 1 kegiatan Pengawasan mutu pendidikan 1 kegiatan Kerjasama bidang pendidikan, dalam maupun luar negeri, 1 kegiatan Pengembangan dan pembinaan partisipasi masyarakat/dunia usaha dibidang usaha 	<ul style="list-style-type: none"> Abdeting data base pendidikan Propinsi Riau, 1 kegiatan Kegiatan program kemitraan Penyusunan program pendidikan Propinsi Riau, 1 kegiatan Pengawasan mutu pendidikan 1 kegiatan Kerjasama bidang pendidikan, dalam maupun luar negeri, 1 kegiatan Penataan sistim dan standar pendidikan Pengembangan dan pembinaan partisipasi masyarakat/dunia usaha dibidang usaha 	<ul style="list-style-type: none"> Input <ul style="list-style-type: none"> Database pendidikan belum lengkap Penyusunan program perencanaan pendidikan masih lemah Kerjasama dan kemitraan perlu ditingkatkan Output <ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya kegiatan penyusunan database pendidikan 2 paket Terlaksananya pelatihan perencanaan pendidikan dan pengawasan 4 paket Terlaksananya program kemitraan antar masyarakat dunia usaha pendidikan dalam dan luar negeri Outcome <ul style="list-style-type: none"> Adanya master plan pendidikan Perencanaan program pendidikan menjadi lebih baik dan terarah Dorongan melakukan program kemitraan meningkat Benefit <ul style="list-style-type: none"> Adanya standar baku dalam perencanaan pendidikan Perencanaan pendidikan menjadi lebih efektif Terjadinya kerjasama dan kemitraan dunia pendidikan Impact <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas perencanaan pendidikan Meningkatnya ketertarikan perencanaan pembangunan pendidikan antar kabupaten Propinsi dan pusat Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia dalam mendukung kerjasama pendidikan 	0.03	0.03		
	Perlindungan dan Pengembangan Tenagakerja	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan keterampilan tenaga kerja Pengembangan balai ketenagakerja Peningkatan keterampilan melalui pendidikan teknisi program D3 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan keterampilan tenaga kerja 1 paket Pengembangan balai ketenagakerja 1 paket Peningkatan keterampilan melalui pendidikan teknisi program D3, 4 angkatan 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan keterampilan tenaga kerja 1 paket Pengembangan balai ketenagakerja 1 paket Peningkatan keterampilan melalui pendidikan teknisi program D3, 3 angkatan 	<ul style="list-style-type: none"> Input <ul style="list-style-type: none"> Terjadinya dana program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja Tersedianya sarana dan prasarana pelatihan Tersedianya Sumber Daya Manusia/Instruktur 5000 org pencari kerja yang terdaftar belum memiliki keterampilan 220 org tenaga kerja belum memiliki Diploma program keterampilan teknis D3 Peralatan pelatihan yang ada di BLK sudah cukup tua sehingga mempengaruhi pengembangan jenis pelatihan Output <ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya pelatihan tenaga kerja institusional, 5000 org Terselenggaranya program teknis D3, 220 org Tersedianya sarana dan prasarana BLK serta peralatan lainnya yang memadai 4 unit Outcome <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya jumlah dan kualitas tenaga kerja terampil dan tenaga teknis, 5220 org Kebutuhan tenaga instruktur dimasyarakat Meningkatnya jumlah dan jenis pelatihan yang dapat diselenggarakan, 4 kejuruan Benefit <ul style="list-style-type: none"> Tenaga kerja dapat mampu bersaing dipasar kerja Meningkatnya kesempatan kerja & kesempatan berusaha, 	0.82	0.74	0.74	

						<p>meningkatkan pendapatan tenaga kerja dan berkurangnya pengangguran</p> <p>Impact</p> <ul style="list-style-type: none"> Efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya pelatihan Lemabaga pelatihan lebih berperan dalam menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas sesuai kebutuhan daerah dan pasar kerja <p>Input</p> <p>Dana</p> <ul style="list-style-type: none"> Tesediannya dana program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja Tesediannya sarana dan prasarana Tesediannya sumber daya manusia kegiatan Belum tersusunnya buku perencanaan kerja daerah di Propinsi dan 15 Kab/Kota Belum adanya komputerisasi sistim jaringan informasi pasar kerja di 16 Kab/Kota 1.000 org tenaga kerja tempatan belum tersalurkan ke perusahaan-perusahaan di Riau dan 225 org tenaga kerja tempatan belum mendapatkan peluang kerja di luar negeri <p>Output</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya buku perencanaan tenaga kerja Daerah di 1 Propinsi, 15 Kab/Kota Terwujudnya jaringan sistem informasi pasar kerja dengan komouterisasi di 16 Kab/Kota Tersalurkannya tenaga kerja tempatan di perusahaan di prop. Riau, 1.000 org dan keluar negeri 225 org <p>Outcome</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan perencanaan tenaga kerja Daerah di 1 Propinsi, 15 Kab/Kota Pengembangan sistem informasi pasar kerja terpadu dan komprehensif melalui komputerisasi di 16 Kab/Kota Meningkatnya Pendapatan tenaga kerja bagi 1.000 org tenaga kerja dan pemasukan devisa ke Daerah Riau bagi 225 org TKI asal Riau <p>Benefit</p> <ul style="list-style-type: none"> Mendukung pertumbuhan ekonomi Daerah/regional dan sektoral Perumusan kebijaksanaan ke tenagakerjaan Memberikan peluang kerja bagi tenaga kerja tempatan di pasar kerja Efisiensi dan efektifitas pelaayanan informasai pasar kerja <p>Impact</p> <ul style="list-style-type: none"> memperkecil kesenjangan informasi pasar kerja Meningkatnya keterkaitan perencanaan tenaga kerja dalam pembangunan Daerah Propinsi dan Kab/Kota Meningkatnya kualitas pelayanan informasi ke tenagakerjaan Memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran/ setengah menganggur Memudahkan pelayanan bagi masyarakat pencari kerja dan instansi berwenang melalui jariaden komputerisasi sistem informasi pasar kerja 	0.03	0.13	0.13
	Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja	Peningkatan kesempatan dan perluasan lapangan kerja keluar negeri	Perencanaan tenaga kerja dan pengembangan informasi 1 paket Pendayagunaan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja tempatan 500 org Perluasan kesempatan kerja keluar negeri 125 org	Perencanaan tenaga kerja dan pengembangan informasi 1 paket Pendayagunaan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja tempatan 500 org Perluasan kesempatan kerja keluar negeri 125 org					
	Perlindungan dan pengembang tenaga kerja	Pengembangan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja	Pengembangan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja 2 pkt	Pengembangan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja 2 pkt					
					<p>Input</p> <ul style="list-style-type: none"> Tesediannya dana perlindungan dan pengemabangan lembaga tenaga kerja Tesediannya sarana dan prasarana Tesediannya Sumber Daya Manusia kegiatan Belum adanya penetapan upah minimum di Propinsi dan 15 Kab/Kota 600 kasus perselisihan hubungan industrial belum disidangkan ditingkat P4D Belum tersosialisasinya UU dan Peraturan tentang ke tenagakerjaan ditingkat perusahaan dan lemabga ke tenagakerjaan lainnya <p>Output</p> <ul style="list-style-type: none"> Penetapan dan pengawasan atas pelaksanaan upah minimum di Propinsi dan 15 Kab/Kota Terselenggaranya hubungan industrial dilemaba ketenagakerjaan dan perusahaan Sosialisasi UU dan Peraturan tentang ketenagakerjaan <p>Outcome</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya standar upah minimum di Propinsi dan 15 Kab/Kota 	0.02	0.07	0.07	

						<ul style="list-style-type: none"> • Tersesainya kasus-kasus ketenagakerjaan dalam hubungan industrial • Terciptanya hubungan yang harmonis antara pekerja, pengusaha dan Pemerintah 			
						<p>Benefit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan pekerja • Meningkatnya produktifitas, efisiensi dan efelitifitas perusahaan <p>Impact</p> <ul style="list-style-type: none"> • terpeliharanya stabilitas ekonomi, sosial dan keamanan di Daerah Riau • Meningkatnya kepercayaan investor untuk melakukan investasi di Daerah Riau • Mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja 			
	Peningkatan pemberdayaan perempuan, anak dan remaja	Pelatihan tenaga perencanaan pemabangunan dan kepemimpinan wanita 3 akt	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pembangunan keluarga sejahtera danbagia 1 pkt - Pemberdayaan anak dan remaja 1 paket - Penanggulangan pekerja anak 1 paket 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas hidup poerempuan 3 paket - Pembinaan keluarga sejahtera dan bahagia 1 paket - Pendidikan dan pelatihan bagi perempuan anak dan remaja 3 paket - Peningkatan perlindungan tenaga kerja perempuan 1 paket - Penanggulangan pekerja anak 1 pkt 	<p>Input</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dana ATK pemberdayaan anak dan remaja • Keegiatannya mencakup : <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan keterampilan bidang usaha masyarakat • Pendidikan hidup sehat dan lain-lain • Sarana dan prasarana yang memadai • Sumber Daya Manusia <p>Output</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas dan taraf hidup bagi perempuan anak dan remaja • Meningkatkan kesejahteraan hidup bagi perempuan anak dan remaja • Memberantas kebodohan, kemiskinan, dan pola hidup yang keterbelakang <p>Outcome</p> <ul style="list-style-type: none"> • terwujudnya perempuan yang mandiri, berpotensi dan intelektual sebagai individu dan sebagai sumber daya pembangunan <p>Benefit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keikutsertaan dan peran perempuan, anak dan remaja dalam pembangunan dapat terlaksana diberbagai bidang <p>Impact</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan yang terefisien lebih cepat terlaksananya sehingga masyarakat adil dan makmur terlaksana dengan merata 	0.02	0.13	0.13	
	Kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan kewirausahaan pemuda prop. Riau 40 orang, 8 hari (1 Akt) - Pelatihan Achievement Motivation Training (AMT), 26 orang, 7 hari (2 Akt) - Pelatihan Creation Enterprenuership For Envelopment (CEFE) 28 orang, 30 hari 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan pemuda Propinsi Riau 1 paket - Peningkatan sumber daya pemuda Propinsi Riau 1 paket - Penungkatan pusat gelanggang pemuda Propinsi Riau 1 paket 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan pemuda Propinsi Riau 1 paket - Pembinaan sumber daya pemuda Propinsi Riau 1 paket - Pelatihan peningkatan sumber daya pemuda Propinsi Riau 2 pkt 	<p>Input</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdianya dana untuk program pembinaan kepemudaan • Pelatihan pemuda bidang kewirausahaan, koperasi manaj. kepemimpinan sebanyak ± 760 orang • Pembinaan bagi pemuda dalam rangka mengantisipasi narkoba 300 orang lulus organisasi pemudaan • Pelaksanaan temu komunikasi forum pemuda melayu serumpun • Tersedianya sarana dan prasarana • Tersedianya sumber daya manusia <p>Output</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan koperasi, manajemen, kepemimpinan sebanyak lebih kurang 760 orang • Terwujudnya pemahaman pemuda tentang narkoba sebanyak 300 orang, pemuda utusan organisasi • Terwujudnya tali persaudaraan lintas daerah melayu serumpun <p>Outcome</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meingkatkan kegiatan pemuda yang dapat menjadi motivator dalam pembangunan • Meningkatkan aktifitas pemuda dalam meningkatkan tata kehidupan <p>Benefit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya profesionalisme pemuda dalam berwirausaha, berkoperasi, dan berorganisasi <p>Impact</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya tata kehidupan pemuda • Meningkatnya kreatifitas pemuda • Meningkatnya jenis komunikasi pembangunan untuk daerah melayu serumpun 	0.07	0.43	0.44	
	Penelitian dan Pengembangan (R dan D) IPTEK	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian Bidang Ekonomi 2 paket - Penelitian Bidang Sosial Budaya 5 paket - Penelitian Bidang IPTEK 1 paket 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian Bidang Ekonomi 2 paket - Penelitian Bidang Sosial Budaya 3 paket - Penelitian Bidang IPTEK 1 paket 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian Bidang Ekonomi 2 paket - Penelitian Bidang Sosial Budaya 3 paket - Penelitian Bidang IPTEK 1 paket 	<p>Input</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dana • Minat lulusan perguruan tinggi menjadi peneliti masih rendah • Motivasi dibidang IPTEK masih rendah 	0.95	0.80	0.81	

3	Pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan	Pengembangan industri rumah tangga, industri kecil dan menengah	<p>Penelitian Bidang Umum 2 paket Pengembangan jaringan sistem informasi teknologi Terbangunnya 5 (lima) aplikasi SIM APBD, SIMPEG, SIM Lingkungan, SIM Promosi, SIM Duk Pemutahiran data Homepage Riau go. id. untuk tahun 2002 (3 bidang pada BPDE) Pebangunan work station sistem aplikasi</p> <p>Pembinaan identifikasi dan seleksi, pelatihan keterampilan, pendampingan, monitoring dan evaluasi IRTKM, di 15 Kab/Kota</p> <p>Studi kelayakan dan perencanaan pertumbuhan, pembinaan dan pengembangan industri rumah tangga kecil dan menengah di 15 Kab/Kota</p> <p>Pembinaan dan pengembangan industri kecil sandang pangan melalui KUB sebanyak 230 orang pengrajin</p> <p>Peningkatan sarana dan prasarana PLPIKT</p> <p>Pembinaan dan pengembangan industri kecil kimia bahan bangunan dan logam sebanyak 130 orang</p> <p>Pengembangan industri kecil dan kerajinan 30 orang pengrajin</p>	<p>Penelitian Bidang Umum 2 paket Terbangunnya 4 (empat) aplikasi SIM</p> <p>Peningkatan dan pemberdayaan SIM yang sudah dibangun</p> <p>Pemutahiran data dan Re-Engineering Homepage pem. Prov Riau go. id. untuk tahun 2003</p> <p>Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data secara elektronik</p> <p>Pembinaan identifikasi dan seleksi, pelatihan keterampilan, pendampingan, monitoring dan evaluasi IRTKM, di 16 Kab/Kota</p> <p>Penataan struktur pengembangan industri dan perdagangan di 16 Kab/Kota</p> <p>Pemberdayaan industri rumah tangga kecil dan menengah 96 orang</p> <p>Pembinaan dan peningkatan keterampilan teknologi IRTKM sandang pangan sebanyak 110 orang</p> <p>Peningkatan sarana dan prasarana PLPIKT</p> <p>Pembinaan dan pengembangan industri logam, mesin dan elektronika sebanyak 110 orang</p> <p>Pengembangan industri kimia, agro dan hasil hutan</p>	<p>Penelitian Bidang Umum 2 paket Terbangunnya 3 (tiga) aplikasi SIM</p> <p>Implementasi dan peningkatan SIM yang sudah dibangun</p> <p>Pemutahiran data dan Re-Engineering situs web pem. Prov Riau go. id. Pemutahiran data secara elektronik</p> <p>Pembinaan identifikasi dan seleksi, pelatihan keterampilan, pendampingan, monitoring dan evaluasi IRTKM, di 16 Kab/Kota</p> <p>Pemberdayaan industri rumah tangga kecil dan menengah 200 orang</p> <p>Pembinaan dan peningkatan keterampilan teknologi IRTKM sandang pangan tanget 230 orang</p> <p>Peningkatan sarana dan prasarana PLPIKT</p> <p>Pembinaan dan pengembangan industri logam, mesin dan elektronika sebanyak 130 orang</p> <p>Pengembangan industri kimia, agro dan hasil hutan</p>	<p>• Data Base jaringan sistem informasi belum lengkap</p> <p>• Kesejahteraan peneliti belum memadai</p> <p>• Keberadaan lembaga litbang serta sarana dan prasarana belum memadai</p> <p>• Peralatan, buku literature standar masih terbatas</p> <p>• Kualifikasi peneliti dan personil teknologi informasi belum memenuhi standar</p> <p>• Lulusan Perguruan Tinggi belum siap pakai</p> <p>Output</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya penelitian, pengkajian dan pengembangan kebijakan • Terselenggaranya pengkajian dan pengembangan teknologi • Terselenggaranya pemasyarakatan dan diseminasi, sosialisasi, publikasi informasi hasil-hasil Litbang untuk kesejahteraan masyarakat • Terselenggaranya Inventarisasi Potensi Sumber Daya • Keterpaduan antara lembaga Litbang • Terselenggaranya jaringan sistem informasi teknologi • Tersedianya SDM yang terampil • Pemasyarakatan teknologi informasi, data base teknologi informasi <p>Outcome</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya data dan informasi tentang paket IPTEK, sosial budaya, ekonomi kelembagaan sumber daya alam dan lingkungan • Tersedianya data base dan penguasaan teknologi informasi dalam menghadapi persaingan bebas di era globalisasi • Peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah dan jasa teknologi informasi dalam persaingan di era globalisasi <p>Benefit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahan acuan dalam penyusunan kebijakan paket IPTEK, sosialbudaya, ekonomi kelembagaan sumber daya alam dan lingkungan • Tersedianya data base dan penguasaan teknologi informasi dalam menghadapi persaingan bebas di era globalisasi • Peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah dan jasa teknologi informasi dalam persaingan di era globalisasi <p>Impact</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kualitas pelayanan dan pembinaan Dinas/Instansi Kab/Kota dan masyarakat • Meningkatnya keterkaitan perencanaan pembangunan pusat dan Propinsi dengan Kab/Kota • Efektifitas dan pemanfaatan sumber daya daerah • Meningkatnya kinerja peneliti dan personil teknologi informasi dalam menghadapi era globalisasi • Meningkatnya kompetensi dinas dan instansi • Peningkatan kesejahteraan dan motivasi peneliti <p>Input</p> <p>Dana Kegiatan Waktu SDM Sarana dan Prasarana</p> <p>Output</p> <p>Teridentifikasi dan terseleksi bantuan modal bagi IRTKM di 16 Kab/Kota Terselenggaranya sistem labeling bagi industri kecil potensial Terciptanya sistem kemitraan IRTKM Terciptanya kualitas SDM dibidang industri Terciptanya koordinasi dan kerjasama disektor industri antara Kab/Kota se prop. Riau Terwujudnya pedoman pengembangan kawasan industri Terciptanya pengelolaan limbah industri Pengembangan indag di Propinsi</p> <p>Outcome</p> <p>Lancarnya penyaluran pinjaman modal bagi IRTKM di 15 Kab/Kota Meingkatnya penerapan labeling pada hasil produk IRTKM Meingkatnya peluang usaha dibidang indag Menciptakan kawasan industri yang terkoordinir Meingkatnya diversifikasi produk dan limbah industri</p> <p>Benefit</p> <p>Meningkatnya Pendapatan masyarakat indag</p>	0.36	0.41	0.62
---	---	---	--	---	--	---	------	------	------

		diversifikasi pangan dan gizi	<p>pengembangan dan peningkatan produksi perikanan melalui pengadaan alat tangkap 800 unit, kapal motor 10 unit pembuatan kolam 35 ha, dengan pola bantuan pinjaman bantuan murni</p> <p>pengembangan agrobisnis budidaya laut, rumput laut 270 unit/ 9 lokasi keramba jaring apung natuna 15 unit</p> <p>pengembangan kawasan sentra produksi perikanan karimun- moro</p>	<p>pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan yaitu revitalisasi dempon air tawar, lppmhp tanjung pinang, pengenalan lampu penangkap ikan tenaga surya di kepri, dan revitalisasi dempon air payau di sei suir kab. bengkalis</p> <p>pembinaan dan pengembangan p-ksp perikanan, identifikasi dan seleksi pelatihan dan penyuluhan, monitoring dan evaluasi</p>	<p>pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan dan kelautan propinsi riau</p> <p>pembinaan dan pengembangan p- ksp perikanan, identifikasi dan seleksi, pelatihan dan penyuluhan, monitoring dan evaluasi</p>	<p>Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani Mningkatnya perusahaan yang diawasi dan dibina Meningkatnya produksi perusahaan Meningkatnya perusahaan yang mentaati kewajiban perusahaan</p> <p>Impact Terciptanya swasembada daging Terjangkaunya daya beli masyarakat terhadap produk-produk peternakan Meningkatnya kemitraan usaha peternakan Meningkatnya iklim yang kondusif bagi perusahaan peternakan Meningkatnya keuntungan yang diperoleh perusahaan peternakan</p> <p>Input Dana Kegiatan Sarana dan Prasarana Sumberdaya manusia</p> <p>Output Terlaksananya Pembinaan, Seleksi Pemaganagan , Monitoring dan Evaluasi Terwujudnya persamaan presepsi pembangunan perikanan dan kelautan Propinsi Riau Tersedianya data dan informasi Perikanan dan kelautan Propinsi Riau yang akurat. Terlaksananya pemanfaatan dan pengelolaan Sumberdaya ikan secara rasional dan berkelanjutan (Sustainable Development fisheries) Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung produksi perikanan dan kelautan Propinsi Riau Terlaksananya Pemb. Dan Pengembangan P-KSP Perikanan, Identifikasi dan Seleksi, pelatihan dan Penyuluhan, Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya Temu Kemitraan Usaha Perikanan dan Kelautan Propinsi Riau Terlaksananya Temu Pelaku Usaha Bisnis Perikanan dan Kelautan (Store holders) se Propinsi Riau Terlaksananya Sosialisasi & Penyebaran Informasi ProsuK – ProsuK Perikanan dan Kelautan yang bersaing (Comperative Advantage) dipasar Nasional dan internasional</p> <p>Outcome pemangaaan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan yang berkelanjutan Peningkatan Kualitas SDM Perikanan Pembangunan Perikanan dan Kelautan yang terencana dengan baik Terwujudnya Kawasan Sentra Bisnis perikanan yang terpadu serta Kemitraan usaha perikanan yang saling menguntungkan antara masyarakat petani nelayan dan pengusaha perikanan Penyebaran informasi dan globalisasi pemasaran produk-produk perikanan di pasar Nasional dan Internasional</p> <p>Benefit Kemampuan pemanfaatan dan pengelolaan Sumberdaya Perikanan secara macro meningkat Kualitas Perencanaan Pembangunan perikanan dan kelautan semakin baik Meningkatnya ketersediaan prosuk-prosuK perikanan dan kelautan yang tepat: waktu, jumlah dan kualitas</p>				
		program pembangunan dan pengembangan usaha perkebunan rakyat	<p>pengembangan perkebunan rakyat propinsi riau</p>	<p>perencanaan ,pengendalian dan pengawas bidang perkebunan</p> <ul style="list-style-type: none"> - identifikasi dan seleksi petani, 1 paket - supervisi, monitoring dan pendampingan 1 paket - evaluasi pelaksanaan , 1 paket - pemeliharaan kebun entrys kakap 1 ha 	<p>Perencanaan ,pengendalian dan pengawas bidang perkebunan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi dan seleksi petani, 1 paket - Supervisi, monitoring dan pendampingan 1 paket - Evaluasi pelaksanaan , 1 paket - Pemeliharaan kebun entrys kakap 1 Ha 	<p>Dana Kegiatan Sarana dan Prasarana Sumberdaya manusia</p> <p>Output - Teridentifikasi dan terseleksi petani, 2 paket - Terdata luasan lahan perkebunan, 18.00 Ha - Terpeliharanya kebun karet 6.892 Ha - Terbangunnya kebun karet 2.020 Ha - Terbangunnya kebun sawit 3.789 Ha - Terbangunnya tanaman kelapa rakyat 225 Ha - Terbangunnya tanaman kako 175 Ha - Terbangunnya tanaman kopi 150 Ha - Terbangunnya tanaman cengkeh 150 Ha - Terbangunnya tanaman karet 300 Ha</p>	3.85	1.28	1.30	

		<p>(murni) pemeliharaan kebun karet masyarakat plta koto panjang 6.899.5 ha</p> <p>(permodalan) pembangunan kebun karet 1.720 ha dab sawit rakyat 398 ha di daerah perbatasan</p> <p>bantuan pengadaan excavator untuk sarana pembangunan perkebunan rakyat sebanyak 2 unit.</p> <p>intensifikasi perkebunan rakyat prov. riau</p> <p>(permodalan)</p> <p>permukiman kebun rakyat 800 ha(kampar, pelalawan, inhu ,rohul)</p> <p>peremajaan tanaman kelapa rakyat 125 ha.(kec, kundur karimun)</p> <p>rehab dan intensifikasi tanaman kelapa rakyat dilahan kritis 100 ha di kab inhil</p> <p>diversifikasi tanaman kelapa kakao 175 ha di bengkalis dan inhil</p> <p>diversifikasi tanaman kelapa rakyat dengan tanman kopi seluas 150 ha di bengkalis</p> <p>intersifikasi cengkeh 150 ha di natuna</p> <p>peremajaan tanaman katet rakyat 300 ha di siak, kuansing,pelalawan</p> <p>(murni)</p> <p>perawatan dan pemurnian kebun entries karet 9 ha di kuansingdan rohil</p> <p>pembangunan kebun entries kakao 2 ha di inhil</p> <p>deplomasi pengembangan perlebaran 2 koloni di pelalawan</p> <p>ekstensifikasi perkebunan rakyat propinsi riau</p> <p>(permodalan)</p> <p>pembangunan kebun kelapa sawit rakyat 3,400 ha di dumai,inhu,rohul, pelalawan , kuansing, inhil, dan rohil</p>	<p>pendidikan dan pelatihan petani, 3 paket 240 orang. pemeliharaan kebun karet masyarakat plta koto panjang, 6,892 ha</p>	<p>Pendidikan dan pelatihan petani, 3 Paket 240 orang. Pemeliharaan Kebun Karet Masyarakat PLTA Koto Panjang, 6,892 Ha</p> <p>Pengukuran ulang lahan perkebunan, 18.000 Ha</p>	<p>Outcome</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terpeliharanya kebun entries karet 6 Ha - Terbangunnya kebun entries karet 2 Ha - Terbangunnya pengembangan perlebaran 2 koloni - Terlatihnya petani perkebunan 3 paket (480 orang) <p>- Tersedia pertanian kebun, 2 paket</p> <p>- Tersedianya data luasan lahan perkebunan yang akurat, 18.0 Ha</p> <p>-Pembangunan dan pengembangan tanaman perkebunan sesuai dengan standard an pedoman Teknis budidaya perkebunan</p> <p>- Petani perkebunan yang telah di latih dapat mengaplikasikan keahliannya dalam pengelolaan budidaya perkebunan</p> <p>Impact</p> <ul style="list-style-type: none"> - meningkatnya pendapatan & kesejahteraan petani - Meningkatnya keterampilan & pengetahuan petani - Meningkatnya produksi perkebunan - Meningkatnya lapangan kerja baru - Lancarnya aksesibilitas perkebunan 				
	pembinaan usaha ekonomi daerah	<p>identifikasi dan seleksi ,pelatihan keterampilan ,pendampingna ,monitoring dab evaluasi ued simpan pinjam</p> <p>bantuan modal usaha ued simpan pinjam 70 kelompok</p>	<p>identifikasi dan seleksi ,pelatihan keterampilan ,pendampingna ,monitoring dab evaluasi ued simpan pinjam</p> <p>pembinaan administrasi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan pengelolaan wilayah terpadu (ppk dan ppwt)</p>	<p>Identifikasi Dan Seleksi, Pelatihan Keterampilan,Pendampingan,Monitoring Dan Evaluasi Ued Simpan Pinjam</p> <p>Bantuan Modal Usaha Ued Simpan Pinjam</p>	<p>Input</p> <p>Dana Kegiatan Sarana dan Prasarana Sumberdaya manusia</p> <p>Output</p> <p>Peningkatan Usaha dan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Peningkatan Peranan masyarakat dalam Pengelolaan bantuan modal.</p>	2.62	11.15	11.32	

		pembinaan administrasi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan pengelolaan wilayah terpadu (ppk dan ppwt)	menyertakan modal ekonomi kerakyatan melalui lembaga keuangan	75 Kelompok Pembinaan Pengembangan Perekonomian Daerah Serta Pembinaan Pengendalian Ekonomi Kerakyatan	Meningkatkan peranan masyarakat dalam pembangunan (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan) Peningkatan kualitas perencanaan dalam pengelolaan pembangunan wilayah terpadu. Peningkatan modal usaha ekonomi Masyarakat Pedesaan.			
	pengembangan investasi daerah	pembangunan pusat promosi dagang, investasi dan pariwisata	pembangunan pusat promosi dagang, investasi dan pariwisata	Pembangunan pusat promosi dagang, investasi dan pariwisata	Outcome Meningkatkan usaha dan pendapatan masyarakat Pedesaan/ Meningkatnya Peranan Masyarakat dalam pengelolaan bantuan modal. Meningkatnya peranan masyarakat dalam pembangunan (perencanaan pelaksanaan dan pengawasan). Adanya kualitas perencanaan dalam pengelolaan pembangunan terpadu. Mandiri. Meningkatnya Modal Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan Benefit Meningkatnya Pendapatan masyarakat pedesaan . Masyarakat berperan dalam proses perencanaan Adanya perencanaan pembangunan secara terpadu dan sistematis Impact Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat pedesaan. Adanya suatu pola perencanaan yang tersusun dan sistematis dalam pembangunan wilayah terpadu.	0.37	1.49	1.51
	Pembinaan usaha perdagangan kecil dan Menengah		pengembangan, pembinaan , pengawasan dan pembentukan usaha dan lembaga perdagangan di 14kab/ kota pengawasan jalur distribusi barang-barnag kebutuhan produk masyarakat perlindungan konsumen forum konsultasi perdagangan dalam negeri bantuan dana bergulir untuk pedagang kecil di 16 kab/ kota peningkatan pelayanan operasional kemetrolagian pengembangan balai latihan industri dan perdagangan Prop.Riau	Pengembangan, pembinaan , pengawasan dan pembentukan usaha dan lembaga perdagangan di 16 Kab/ kota Pengawasan jalur distribusi barang-barnag kebutuhan produk masyarakat perlindungan konsumen Forum konsultasi perdagangan dalam negeri Bantuan dana bergulir untuk pedagang kecil di 16 kab/ kota Pengembangan Standarisasi dan pengawasan mutu barang Peningkatan pelayanan Operasional Kemetrolagian Pengembangan Balai Latihan Industri dan Perdagangan Prop.Riau	Input Dana Kegiatan Waktu SDM Sarana dan Prasarana Output Terselenggaranya sosialisasi Perlindungna konsumen dan pembentukan LPKSM Terciptanya kelancaran arus barang di Prop Riau Teridentifikasi dan tersosialisasi bantuan modal bagi perdagangan se Propinsi Indonesia Terciptanya aparatur kemetrolagian dan pengawasan mutu dan balai latihan Indag Terlaksananya kegiatan UTTP penyajian mutu di propinsi Riau Tercptanya Peningkatan operasional UPT Terselenggaranya Penyuluhan UTTP penyusunan SNI, Sosialisasi mutu di Propinsi Riau Terciptanya Peningkatan Pelayanan kemetrolagian pengawasan mutu dan balai latihan		0.39	0.40
	Perlindungan konsumen standarisasi mutu barang dan Pengawasan, dan pengendalian distribusi bahan kebutuhan pokok		Pengembangan pembinaan dan peningkatan potensi Ekspor daerah riau Penyebaran informasi dan sosialisasi kebijaksanaan	Sosialisasi kebijaksanaan perdagangan luar negeri Penyebaran informasi dan sosialisasi kebijaksanaan				

				<p>Pemuktahiran data eksportir dan importer</p> <p>Pembinaan Perdagangan luar negeri</p> <p>Pembinaan dan pengembangan perdagangan luar negeri</p> <p>Pembinaan dna pengembangan perdagangan lintas batas</p>	<p>Pemuktahiran data eksportir dan importer</p> <p>Pembinaan Perdagangan luar negeri</p> <p>Pembinaan dan pengembangan perdagangan luar negeri</p> <p>Pembinaan dna pengembangan perdagangan lintas batas</p> <p>Kajian tentang produk unggulan dalam angka AFTA</p> <p>Kajian terhadap penetapan tariff bea masuk komoditi dan pengaruhnya terhadap import barang di Riau dalam rangka AFTA</p>	<p>Outcome</p> <p>Meningkatnya efektivitas dan produktifitas</p> <p>Meningkatnya sarana dan prasarana kemetrolgian,BPSMB dan Balai Latihan</p> <p>Meningkatnya sarana dan prasarana</p> <p>Meningkatnya kualitas aparatur</p>			
			<p>pembinaan ,identifikasi dan seleksi, monitoring dan evaluasi koperasi dan ukm</p> <p>bantuan modal kerja pola channelling bank di 15 unit ksp dan usp</p>	<p>Pembinaan ,identifikasi dan seleksi, monitoring dan evaluasi kopersi dan UKM</p> <p>Bantuan modal kerja KSP dan USP 70 unit</p>	<p>Pengendalian monitoring dan evaluasi koperasi dan UKM 85 unit, KSP/ USP & 65 Koperasi Swamitra</p> <p>Peningkatan kualitas perencanaan Kop. Dan UKM Kab/ kota Se- Propinsi riau</p>	<p>Benefit</p> <p>Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk yang si pasarkan</p> <p>Meningkatnya kualitas usaha perdagangan</p> <p>Impact</p> <p>Mengkatnya pendapatan masyarakat</p> <p>Meningkatnya Kontribusi PAD</p> <p>Meningkatnya pengetahuan dan kepercayaan</p> <p>Meningkatkan Kualitas pelayanan</p> <p>Meningkatnya Keterkaitan antara pemerintah dan dunia usaha / masyarakat</p>			
			<p>penyertaan modal pola di 36 koperasi</p>	<p>Penyertaan modal di 29 koperasi pola swamitra</p> <p>Peningkatan kualitas perencanaan melalui pertemuan pemerintah 16 Kab/ kota dan propinsi</p> <p>Peningkatan kualitas pengurus dan pengelola koperasi dan UKM sebanyak 210 orang , 7 angkatan</p>	<p>Peningkatan kualitas pengurus dan pengelola koperasi dna UKM sebanyak 210 orang . 7 angkatan</p>	<p>Input</p> <p>Data</p> <p>Kegiatan</p> <p>Sarana dan prasarana</p> <p>Sumberdaya Manusia</p> <p>Output</p> <p>Peningkatan kebutuhan modal KSP/ USP dan Swamitra di 16 kab/ kota</p> <p>Mewujudkan Koperasi sehat dan mandiri</p> <p>Penyusunan perencanaan Koperasi secara akurat di antara Kab/kota Riau</p> <p>Mewujudkan kepengurusan koperasi dan UKM yang andal.</p> <p>Outcome</p> <p>Meningkatnya Modal KSp/ USP dan Swamitra di 16 kab/ kota.</p> <p>Terwujudnya Koperasi sehat dan Mandiri</p> <p>Tersusunnya perencanaan kopersai secara akurat di antara Kab/ kota Riau.</p> <p>Terwujudnya kepengurusan koperasi dan UKM yang andal</p> <p>Benefit</p> <p>Meningkatnya anggota Koperasi KSP /USP USP dan Swamitra di 16 Kab/kota.</p> <p>Berkembangnya koperasi sehat dan mandiri</p> <p>Adanya perencanaan Pengembangan Koperasi secara sistematis</p> <p>Meningkatnya Pengetahuan Pengurus koperasi tentang manajemen koperasi</p> <p>Impact</p> <p>Anggota koperasi KSp/ USP dan Swamitra dapat mengembangkan usahanya dengan baik</p> <p>Pengambil kebijakan dapat menyusun rencana program pengembangan Koperasi dengan baik</p>	0.16	0.18	0.18
			<p>l. Perencanaan pengembangan Kehutanan</p> <p>pengembangan pembenihan</p> <p>pembinaan sumber benih</p> <p>pengadaan bibit 15.750 btg</p>	<p>Pengembangan pembenihan</p> <p>- inventarisasi/ identifikasi sumber benih, 10 lks</p> <p>- Penunjukan dan pengukuhan sumber, benih 10 lokasi</p> <p>- Pembuatan persemaian swakelola, 100.000 btg</p> <p>- Penyusunan database sumber benih , 1 paket</p> <p>- Pengembangan Kelembagaan Perbenihan 1 paket</p> <p>- Persiapan pembangunan persemaian 20 permanen 5 ha</p> <p>Pendidikan dan latihan :</p> <p>- PelatihanPengkuran dan pemetaan, 30 orang</p> <p>- Penganggulangan kebakaran hutan , 25 org</p> <p>- Pelatihan peningkatan usaha lebah madu masyarakat, 30 org</p>	<p>Pengembangan pembenihan :</p> <p>- Pembinaan sumber benih local 10 lokasi</p> <p>- Pengembangan sumber benih 10 Ha</p> <p>- Pembangunan persemaian permanen</p> <p>- Pembuatan unit percontohan kebun benih jenis ungul 10 Ha</p> <p>- Pengembangan Hutan Rakyat dan Hutan Kemasyarakatan, 4 lembaga</p> <p>Pendidikan latiahn :</p> <p>- Pengembangan aneka usaha kehutanan : 5 kelompok masyarakat terdiri dari pengembangan lebah madu, rotan,tanaman garahu, tanaman kehidupan (MPTS) dan pemanfaatan limbah kayu</p>	<p>Input</p> <p>Data</p> <p>Kegiatan</p> <p>Sarana dan Prasarana</p> <p>Sumberdaya manusia</p> <p>Output</p> <p>- Terinventarisasi/ teridentifikasi sumber benih, 10 lokasi</p> <p>- Dikukuhkannya sumber benih, 10 lokasi terbangunnya persemaian swakelola ; 100.000 batang</p> <p>- Terbangunnya hutan rakyat dan hutan kemasyarakatan 4 lembaga</p> <p>- Terlatihnya masyarakat desa sekitar hutan, 90 orang</p> <p>- Aparatur 55 orang dan 5 kelompok masyarakat</p> <p>Outcome</p> <p>- Tersedianya sumber benih yang memenuhi standar</p> <p>- Sistem pengelolaan hutan rakyat dan hutan dan kemasyarakatan yang baik , 4 lembaga</p> <p>- Masyarakat sekitar hutan memiliki aneka usaha permanent</p> <p>Benefit</p> <p>- Tersedianya benih kehutanan yang baik untuk penghijauan dan reboisasi</p> <p>- Sumberdaya Hutan Rakyat dan hutan kemasyarakatan yang dikelola menjadi efektif dan efesien</p> <p>Impact</p> <p>- Meningkatnya pendapatan masyarakat</p> <p>- Meningkatnya lapangan kerja baru</p>	0.01	0.10	0.11

Pembangunan infrastruktur ekonomi penunjang ekonomi berbasis kerakyatan	2. Perlindungan, Pengawasan, dan Pengendalian Kerusakan Hutan	<p>binaan dan pengendalian pengusaha hutan, 25 hph dan 27 hti (53 perusahaan)</p> <p>Pengamanan dan penyuluhan kehutanan, Kabupaten/ kota se- Propinsi sebanyak 20 kali operasional</p>	<p>Pembinaan dan Pengendalian Pengusahaan hutan 60 perusahaan</p> <p>Pengamanan dan penyuluhan kehutanan, Kabupaten/ kota se- Propinsi sebanyak 20 kali operasional</p>	<p>Pembinaan dan Pengendalian Pengusahaan hutan 60 perusahaan</p> <p>Pengamanan dan penyuluhan kehutanan, kabupaten/ kota Se- Propinsi Riau sebanyak 20 kali operasional</p>	<p>Input Dana Kegiatan Sarana dan Prasarana Sumberdaya Manusia</p> <p>Output - Patroli pengendalian dan pengawasan kegiatan illegal logging, 40 kali operasi - Pengendalian dan pengawasan pengusaha hutan, 173 perusahaan</p> <p>Outcome - Berkurangnya kegiatan illegal logging & pemrosesan perkara illegal logging, 40 berkas perkara - Meningkatkan pendapatan Negara (iuran hasil hutan)</p> <p>Benefit - Terjaganya kelestarian hutan</p> <p>Impact Peningkatan kesadaran pengusaha hutan yang baik</p>	0.07	0.11	0.10
	Program Peningkatan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi	<p>- melaksanakan pekerjaan rehab/ pemel jalan propinsi sepanjang 770.5 km dan jembatan sepanjang 2.064 m</p> <p>- melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan propinsi sepanjang 884.6 km dan penggantian jembatan 287 m.</p> <p>- perencanaan, pengendalian dan pengawasan teknik jalan prop. (1 paket)</p> <p>- pengadaan peralatan dan operasional fasilitas work shop dinas pu (1 paket)</p> <p>- peningkatan fasilitas laboratorium dinas pu (1 paket)</p> <p>- pengendalian penanganan jalan propinsi (1 paket)</p>	<p>- Melaksanakan Pekerjaan Rehab/ Pemel jalan Propinsi sepanjang 879.84 Km dan jembatan sepanjang 406 M</p> <p>- Melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Propinsi sepanjang 885.56 dan Penggantian jembatan 315.7 M.</p> <p>- Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Teknik Jalan Prop. (1 paket)</p> <p>- Pengembangan Fasilitas work Shop Dinas Kimpraswil (1 paket)</p> <p>- Perencanaan, Pengendalian Pengawasan Perhubungan (1 paket)</p>	<p>- Melaksanakan Pekerjaan Rehab/ Pemel jalan Propinsi sepanjang 860.75 Km dan jembatan sepanjang 1.250 M</p> <p>- Melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Propinsi sepanjang 887.2 dan Penggantian jembatan 347.27 M.</p> <p>- Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Teknik Jalan Prop. (1 paket)</p> <p>- Pengembangan Fasilitas work Shop Dinas Kimpraswil (1 paket)</p> <p>- Perencanaan, Pengendalian Pengawasan Teknis Perhubungan (1 paket)</p>	<p>Input - Dana - Kegiatan - Sarana dan Prasarana - Sumberdaya Manusia</p> <p>Output - Fungsionalisasi ruas jalan Prop sepanjang 2511.09 Km dan pemeliharaan Jembatan sepanjang 3710 M - Peningkatan kemampuan pelayanan jalan sepanjang 2657.36 KM dan Penggantian jembatan sepanjang 949.97 M.</p> <p>Outcome Berfungsinya prasarana jaringan jalan dan jembatan sehingga memperlancar aktifitas perekonomian dan membuka keterisolasian wilayah</p> <p>Benefit - Meningkatkan pendapatn perkapita masyarakat - Mengurangi ekonomi biaya tinggi</p> <p>Impact - Mengurangi kesenjangan antar daerah - Menurunkan kualitas lingkungan</p>	16.04	13.3	13.53
	Program pembangunan sarana dan prasarana transportasi	<p>Pengembangan fasilitas dan pengawasan lalu lintas jalan, dengan kegiatan pengadaan dan pemasangan fasilitas LLAJ berupa rambu jalan (772 bh) deliniator, (500 bh) guardrail (550 m)</p> <p>pengadaan fasilitas gedung kantor pkb kota pekanbaru</p> <p>penumpang/ barang , dengan kegiatan : # sosialisasi perda no. 9 tahun 2000 dan pendataan kendaraan non bm</p> <p># Pengawasan dan Penertiban kendaraan angkutan penumpang dan kendaraan non BM sesuai perda No. 9 tahun 2000</p> <p>Pengadaan saran Mobilitas Dinas LLAJ Propinsi Riau</p> <p>Peningkatan/ pembangunan fasilitas pelabuhan dengan kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan laut di sei. Tenam (1 paket) dan Tg. Buton (1 paket)</p> <p>Pelabuhan laut di sei. Tenam terdiri dari : - Pek. Talud 150 m' - Pek. Dermaga 8 x 35 m2 - Pek. Trestle 5 x 25 m2 + Pelabuhan 5 m2 peningkatan / pembangunan fasilitas pelabuhan laut Tanjung Buton terdiri dari : - pengadaan Ponton (18.5 x 10 m2) - jembatan bergerak (12 x 2 m2) - Pek. Timbunan 4.050 m3</p>	<p>Pengembangan fasilitas dan Pengawasan Lalu Lintas Jalan, dengan kegiatan Pengadaan dan Pemasangan fasilitas LLAJ berupa Rambu Jalan (455 bh) Deliniator, (970 bh) Guardrail (800 m), Marka jalan (9350 m) Rambu Petunjuk Jalan (12 unit) dan Traffic Light (2 buah) dan relokasi pembangunan Jembatan timbang Taluk Kuantan 1 unit yang terdiri dari : Kantor 127 m2, jalan keluar masuk 276 m2, lapangan parker 672 m2, pengadaan dan pemasangan alat jembatan timbang 1 unit</p> <p>Subsidi angkutan penyeberangan Perintis Lintas Bengkalis- Mengkapan 104 trip</p> <p>Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Penyebrangan Mengkapan 1 paket terdiri dari : resen air dan instalasi , deep weel, genes dan rumah genset 35 KVA, jalan dan lapangan parker 5.450 m2, pagar BRC 344.3 m, canopy jalur penumpang 200 m2 dan pengadaan meubeler.</p> <p>Lanjutan peningkatan fasilitas pelabuhan di Tanjung Buton (tahap V), sei tenam (tahap II), Tanjung Buton terdiri dari : Pek. Trestle (102.4 x 4) m2 + Penyebrangan 9 m2, terminal penumpang 600 m2, reservoir 100 m3, pengaspalan jalan dan lapangan parker 1.200 m2, pengadaan genset dan instalasi, pagar BRC 306 m'.</p> <p>Sei Tenam terdiri dari : Talud 150 m', Kantor</p>	<p>Pengembangan fasilitas dan Pengawasan Lalu Lintas Jalan, dengan kegiatan Pengadaan dan Pemasangan fasilitas LLAJ berupa Rambu Jalan (426 bh) Deliniator, (1.164 bh) Guardrail (960 m), Marka jalan (11.220 m) Rambu Petunjuk Jalan (14 unit) dan Traffic Light (1 buah)</p> <p>Pembangunan UPPKB di Bagan Batu, terdiri dari : Kantor 127 m2, Jalan keluar masuk 276 m2, Lapangan Parkir 672 m2, Pengadaan dan pemasangan alat Jembatan Timbang 1 Unit</p> <p>Pembangunan UPPKB di simpang Lago, terdiri dari : Kantor 127 m2, Jalan keluar masuk 276 m2, Lapangan parker 672 m2, pengadaan dan pemasangan alat jembatan Timbang 1 unit</p> <p>Studi teknis jaringan Kereta Api</p> <p>Subsidi angkutan penyeberangan perintis Lintas Bengkalis- Mengkapan 104 Trip</p> <p>Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Penyebrangan Mengkapan 1 paket terdiri dari : Pos jaga 9 m2, landscaping, kawat berduri 800 m, pagar BRC 344.3 m3 Rehabilitasi dan Pembangunan dermaga</p>	<p>Input - Dana - Kegiatan - Sarana dan Prasarana - Sumberdaya Manusia</p> <p>Output - Pengembangan fasilitas lalu lintas Angkutan jalan a. Pembangunan gedung UPPKB beserta fasilitasnya. b. Penertiban angkutan penumpang dan barang c. Pengadaan sarana dan prasarana mobilitas LLAJ d. Perencanaan jaringan kereta api di Propinsi Riau e. Pemberian subsidi untuk lintas penyeberangan antar pulau f. Penyediaan dermaga ASDP g. Pembangunan pelabuhan laut beserta fasilitasnya h. Pembangunan dermaga pelabuhan rakyat i. Pembangunan Bandara dalam menunjang operasional Riau Airline j. Pengembangan aksesibilitas angkutan udara perintis k. Penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi pedesaan l. Pembangunan Jembatan sepanjang 3380 m 33820 m</p> <p>Outcome - Berfungsinya sarana dan prasarana transportasi dengan baik - Membuka keterisolasian wilayah</p> <p>Benefit - Meningkatkan aktivitas perekonomian dan memperlancar arus transportasi penumpang dan barang - Meningkatkan income masyarakat - Mengurangi ekonomi biaya tinggi</p>	6.17	3.12	3.26

		<p>survey lokasi lapangan terbang Bagan siapi-api , taluk kuantan dan selat panjang, pembelian tanah masing –masing 22.5 Ha pada 3 kota dan studi lanjutan lapangan terbang Tempuling</p>	<p>150 m` ,pengadaan genset 35 KVA dan rumah genset 42 m2 ,pek.Dermaga (8x 35) m2, Trestle (5x25) m2 + pelebaran 5 m2, pekerjaan cut and fill tanah</p> <p>Rehabilitasi dermaga pelra di Kuala Gaung (1 paket) terdiri dari :Rehab dermaga (8x27)m2, trestle (3x40)m2 + pelebaran 6 m2, daprah 30 m`</p> <p>Relokasi pembangunan pelabuhan di Moro (1 paket) terdiri dari : terminal penumpang 60 m2</p> <p>Pengembangan Aksebilitas Angkutan Udara Perintis Rute Tg. Pinang- matak natuna 2 kali seminggu (104 frekuensi)</p>	<p>Sungai, danau dan penyebrangan di Siak Sri Indrapura</p> <p>Pengadaan dan pemasangan rambu sungai 500 buah</p> <p>Rehabilitasi fasilitas pelabuhan di sei.Guntung terdiri dari : dermaga pontoon (18.5 x 10) m2</p> <p>Rehabilitasi dermaga pelra di Sinoboi 1 paket</p> <p>Pembangunan Bandara di 2 lokasi (Kab.Rohil dan Inhil)</p> <p>Pengadaan dan pemasangan fasilitas elektronik , telekomunikasi dan sarana Bantu navigasi di Bandara Pasir Pengaraian 1 paket</p> <p>Pengembangan Aksesibilitas Angkutan Udara Perintis rute Tg.Pinang – Matak – Natuna 3 kali seminggu (156 frekuensi)</p>	<p>Impact</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi kesenjangan antar daerah - Menurunkan kualitas lingkungan 			
		<p>Pembangunan jembatan pada ruas jalan propinsi sepanjang 1.226 m</p>	<p>Pembangunan jembatan pada ruas jalan propinsi sepanjang 1.026 m</p>	<p>- Pembangunan jembatan pada ruas jalan propinsi sepanjang 1.128 M</p> <p>Studi pengembangan sarana dan prasarana telekomunikasi di pedesaan (1 paket)</p>				
	Pengembangan dan Pengelolaan daerah rawa	<p>Meningkatkan fungsionalisasi jaringan pengairan rawa guna meningkatkan produktivits lahan pertanian dan kebun kelapa rakyat seluas 3.150 Ha</p>	<p>Mengembangkan daerah rawa agar dapat menjadi daerah atau areal perkebunan , petani , perikanan dengan perbaikan dan pengaturan tata air seluas 3380 Ha</p>	<p>Peningkatan jaringan rawa dan pembangunan tata air dengan system penyempurnaan jaringan pengairan rawa 410 Ha</p>	<p>Input</p> <ul style="list-style-type: none"> Dana Kegiatan Sarana dan Prasarana Sumberdaya Manusia <p>Output</p> <ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya perbaikan dan pengaturan tata air daerah rawa seluas 4.100 Ha Terpeliharanya daerah rawa yang potensial sebagai lahan pertanian dan perkebunan seluas 7780 Ha <p>Outcome</p> <ul style="list-style-type: none"> Berfungsinya hasil produksi pertanian perkebunan rakyat Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat <p>Impact</p> <ul style="list-style-type: none"> Bertambah daerah rawa yang potensial untuk pertanian dan perkebunan Meningkatnya pendapatan petani 	0.67	0.54	0.55
	Pengelolaan Sungai Danau dan Sumber Daya Air	<p>Mengamankan dan melindungi wilayah pemukiman ,sarana transportasi fsilitas umum dan fasilitas sosial dan ancaman banjir,erosi sungai sepanjang 876 m dan abrasi pantai sepanjang 1.315 m</p>	<p>Mengamankan dan melindungi tebing sungai dari bahaya kelongsoran tebing yang diakibatkan oleh adanya aktifitas lalulintas air, degrasi bagian hilir pengaruh pasang surut pada 4 (SWS)sepanjang sungai dan pantai</p>	<p>Mengamankan daerah pemukiman dan areal produksi pangan yang rawan longsor dan banjir sepanjang 1975 pada 4 SWS dan abrasi pantai sepanjang 1.950 M</p>	<p>Input</p> <ul style="list-style-type: none"> Dana Kegiatan Sarana dan Prasarana Sumberdaya Manusia 	1.97	1.58	1.60
	Penyediaan dan pengelolaan air baku	<p>Memenuhi kebutuhan air baku untuk kebutuhan masyarakat pada daerah – daerah tertentu dengan target 318.000 M3</p>	<p>Peningkatan danpenyediaan air baku dengna pembuatan waduk/ embung</p>	<p>Pemeliharaan dan peningkatan waduk/ embung dalam rangka memenuhi kebutuhan air baku 400.000 M3 untuk kebutuhan masyarakat dan daerah irigasi pada daerah tertentu</p>	<p>Output</p> <ul style="list-style-type: none"> Melindungi dan mengamankan tebing pada 4 SWS dari kelongsoran tebing,erosi sungai sepanjang 4.250 m dan abrasi pantai sepanjang 4.765 m, Memenuhi kebutuhan air baku untuk keperluan masyarakat dan industri pada daerah tertentu dengan target 1.218.000 m3 <p>Outcome</p> <ul style="list-style-type: none"> Terlindungnya pusat pemukiman penduduk pusat permintaan perekonomian wisata dari bahaya lonsor tebing akibat erosi Tersedia air baku untuk keperluan masyarakat , industri pada daerah- daerah pusat pertumbuhan penduduk <p>Benefit</p> <ul style="list-style-type: none"> Lancarnya aktivitas ekonomi masyarakat Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Dari berbagai tingkat kehidupan <p>Impact</p> <ul style="list-style-type: none"> Masyarakat dapat mengembangkan kehidupan social dengan baik 	0.15	0.59	0.60

	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi	Melakukan pengaturan dan perencanaan detail sebagai data- data teknis pekerjaan bidang pengairan dari tercapainya pelaksanaan yang efektif dan efisien Mendata kembali catchement area yang kemiringannya < 15 % sebagai database akibat adanya alih fungsi lahan dan berkembangnya wilayah pemukiman	Melakukan evaluasi dan percontohan pemanfaatan lahan berpengairan dan penggunaan air irigasi pada 5 lokasi daerah irigasi Meningkatkan fungsi drainase induk dan mutu lingkungan perairan perkotaan untuk kota Pekanbaru dan Batam Melanjutkan mendata kembali catchement area yang kemiringannya < 15 % sebagai database akibat adanya alih fungsi lahan dan berkembangnya wilayah pemukiman, konservasi catchement area untuk daerah irigasi	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi jaringan dan rawa melalui pengembangan pertanian dan pedesaan secara terpadu Perbaikan drainase induk permukiman kota dan daerah rawan banjir sepanjang 10 km Konservasi catchement area untuk daerah irigasi seluas 3.800 Ha	Input Dana Kegiatan Sarana dan Prasarana Output Meningkatnya konsidi dan fungsi jaringan irigasi sepanjang 19 KM Mengamankan daerah cathement area seluas 5000 Ha Memenuhi kebutuhan air untuk irigasi Outcome Terpenuhinya kebutuhan air untuk irigasi Meningkatnya kesadaran dan keinginan petani untuk menggarap lahan pertanian Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan Benefit Berkurangnya alih fungsi lahan Meningkatnya penghasilan petani Impact Masyarakat dapat mengembangkan kehidupan social dengan baik Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	0.22	0.37	0.38
	Perbaikan perumahan dan pemukiman	Penyusunan PJM – P3KT 2 kota Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan SUDSP	Bantuan PSDPU 3 kawasan Perbaikan kualitas sarana dan prasarana pada kaw.Miskin dan tertinggal 3 kawasan Pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan 3 kawasan	Bantuan PSDPU pada 4 kawasan Perbaikan kualitas sarana dan prasarana pada kaw.Miskin dan tertinggal 3 kawasan Pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan 3 kawasan	Input Dana Kegiatan Sarana dan Prasarana Sumberdaya masyarakat Output Penyusunan sistem manajemen pembangunan untuk lingkungan pemukiman pada 12 Kab/kota Outcome Tersedianya sistem manajemen pembangunan untuk lingkungan pemukiman 12 Kab/ kota Benefit Masyarakat / swasta turut serta dalam berpartisipasi dalam pembangunan Memudahkan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan Pemanfaatan sumberdaya terkendali Impact Menciptakan lingkungan kondusif sehat dan asri di perkotaan dan pedesaan Masyarakat / swasta lebih tanggap berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan Meningkatkan nilai ekonomis kawasan perkotaan dan pedesaan	0.05	0.07	0.07
	Penyehatan lingkungan Pemukiman	Pembangunan Drainase primer 3000 meter di kota Pekanbaru Pengadaan dump truck 6 M3 2 unit di pekanbaru Pembangunan jalan lingkungan 5.885 M Pembangunan gorong- gorong 18 M dan luiker 6 M	Peningkatan dan pengembangan saran dan prasarana air bersih 60 l/dtk di 6 kabupaten Monitoring Kinerja PDAm se- Propinsi Riau Pengembangan Drainase primer 4000 meter di 5 Kabupaten / kota Penyusunan rencana induk system persampahan 4 Paket Penyusunan DED TPA 3 paket Pengadaan sarana dan persampahan di 3 kab/ kota Peningkatan dan pelayanan sarana dan sanitasi 20 hektar	Peningkatan dan pengembangan saran dan prasarana air bersih 60 l/dtk di 6 kabupaten Monitoring Kinerja PDAm se- Propinsi Riau Pengembangan Drainase primer 4000 meter di 5 Kabupaten / kota Penyusunan rencana induk system persampahan 4 Paket Penyusunan DED TPA 3 paket Pengadaan sarana dan persampahan di 4 kab/ kota Peningkatan dan pelayanan sarana dan sanitasi 20 hektar	Input Dana Kegiatan Sarana dan Prasarana Sumberdaya masyarakat Output Penyusunan perencanaan pembangunan prasarana infrastruktur pada 7 kawasan miskin & tertinggal Terbangunnya sarana dan prasarana pada kawasan miskin tertinggal Outcome Tersusunnya perencanaan pembangunan dan prasarana infrastruktur pada 7 kawasan miskin & tertinggal Benefit Masyarakat / swasta turut serta dalam berpartisipasi dalam pembangunan Memudahkan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan Pemanfaatan sumberdaya terkendali Impact Menciptakan lingkungan kondusif sehat dan asri di perkotaan dan pedesaan Masyarakat / swasta lebih tanggap berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan Meningkatkan nilai ekonomis kawasan lingkungan pemukiman	0.57	0.94	0.95

	Program Pembangunan Pertambangan Umum	Penyusunan Data/ informasi Potensi Pertambangan untuk Pengembangan pertambangan untuk pengembangan rakyat (galian C , emas dll)	Penyusunan Data/ informasi dan penganalisa kelayakan usaha pertambangan sumur tua untuk pertambangan rakyat 1 paket	Pengembangan Usaha Petambangan rakyat dan Kemitraan	Input - Dana - Kegiatan - Sarana dan Prasarana - Sumberdaya masyarakat	0.17	0.30	0.30
		Pengawasan dan penertiban Usaha pertambangan	Peningkatan Sumberdaya Manusia pengelola Pertambangan Umum melalui Pelatihan dan Penyertaan Diklat	Peningkatan Sumberdaya Manusia Pengelola Pertambangan Umum, melalui pelatihan dan Penyertaan Diklat	Output - Tersedianya Data/ informasi usaha pertambangan - Terciptanya Pengawasan Usaha Pertambangan Outcome - Pengelolaan Pertambangan umum yang baik Benefit - Kemampuan Pengelolaan pertambangan umum meningkat Impact - Kesenjangan masyarakat meningkat - PAD meningkat			
	Program Pengembangan Kelistrikan		> Penyusunan data/ informasi kebutuhan listrik pedesaan Propinsi Riau > Pemanfaatan energi alternative pedesaan untuk penerangan pedesaan (Gasifikasi ,diesel tenaga Surya dll) pilot proyek	> implementasi pembangunan Kelistrikan Pedesaan Propinsi riau Menjadi 65 % > penerapan energi alternative pedesaan dengan program shearing dengan pemerintah kab/ kota	Input - Dana - Kegiatan - Sarana dan Prasarana - Sumberdaya masyarakat Output - Tersedianya Data/ informasi kebutuhan listrik daerah - Terciptanya pembangkit listrik bertenaga kecil - Terselenggaranya pembiayaan terhadap pengelola jasa wisata - Tersedianya sarana dan prasarana wisata daerah Outcome - Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan daerah dan mancanegara terhadap daerah tujuan wisata serta objek wisata tertentu Benefit - Kesjahteraan masyarakat meningkat PAD meningkat Impact Integrasi kegiatan dan sector terkait untuk menunjang sector pariwisata menciptakan peluang investasi di daera	-	0.09	0.09
	Program Pembangunan dan Pengembangan Potensi Pariwisata	Riview RIPPDA Prop.Riau Promosi Pariwisata Wisata Daerah Pengadaan bahan- bahan informasi wisata daerah Pasar wisata Jakarta Fair, Bali Nusa, Mojopahit Fair Malaysia ,Thailand dan Singapura	> Penetapan Perda Riview RIPPDA Prop.Riau dan sosialisasi > Promosi Pariwisata Daerah - Pengadaan bahan-bahan informasi wisata daerah - Penyertaan even wista dalam negeri (pasar wisata ,Jakarta Fair, dll) - Penyertaan Even di luar Negeri (Malaysia , Thailand, dll) > Pengembangan Pariwisata Daerah - Melengkapi Infrastruktur pariwisata budaya daerah kab/ kota dan pengembangan objek wisata > Pelatihan Pengelola Pariwisata	> Sosialisasi RIPDA Prop.Riau dan motivasi Kab/ kota penyusunan Rencana Detail dan RIPOW > Promosi Pariwisata Daerah - Pengadaan bahan- bahan informasi Wisata daerah - Penyertaan even wista dalam negeri (pasar wisata ,Jakarta Fair, dll) - Penyertaan Even di luar Negeri (Malaysia , Thailand, dll) > Pengembangan Pariwisata Daerah - Melengkapi Infrastruktur pariwisata budaya daerah kab/ kota dan pengembangan objek wisata > Pelatihan Pengelola Pariwisata	Input - Dana - Kegiatan - Sarana dan Prasarana - Sumberdaya masyarakat Output - Perda RIPDA - Tersedianya bahan informasi pariwisata daerah - Terselenggaranya pembiayaan terhadap pengelola jasa wisata - Tersedianya sarana dan prasarana wisata daerah Outcome - Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan daerah dan mancanegara terhadap daerah tujuan wisata serta objek wisata tertentu Benefit - Kesjahteraan masyarakat meningkat PAD meningkat Impact Integrasi kegiatan dan sector terkait untuk menunjang sector pariwisata menciptakan peluang investasi di daerah	0.15	0.39	0.40
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir dan Kelautan		> Pengembangan database perikanan dan kelautan (Perangkat lunak & Komputer) > Inventarisasi Kateristik Potensi Lahan Kawasan Pesisir dan Laut di Pulau –Pulau Kecil Propinsi Riau (Profile) > Analisa Pasar dan Sumber- sumber Modal Nelayan, Pesisir dan Kepulauan Kab Kepri ,Karimun ,Batam dan Natuna	> Pengembangan database perikanan dan kelautan (Penyempurnaan data & meta data) > Pengelolaan batas-batas wilayah - eksploitasi sumberdaya kelautan di kab. Bengkalis , Rohil dan Dumai > Analisa Pasar dan Sumber- sumber Modal -Nelayan, Pesisir dan Kepulauan Kab Inhil, Bengkalis, Rohil, Pelalawan	Input - Dana - Kegiatan - Sarana dan Prasarana - Sumberdaya masyarakat Output - Pedoman Pengelolaan Wil Pesisir dan laut - Kesadaran masyarakat meningkat dalam pengelolaan SD pesisir dan Lautan - Tersedianya Pinjaman Modal Untuk Nelayan	-	0.10	0.80

				<ul style="list-style-type: none"> > Optimalisasi usaha dan Pengenalan teknologi pengkapan dan pengolahan kab. Kepri, Batam, Karimun dan Natuna > Sosialisasi Peraturan Pemanfaatan Sumber daya dan pesisir laut > Pengawasan dan Pengendalian Sumber daya pesisir dan laut 	<ul style="list-style-type: none"> > Optimalisasi usaha dan Pengenalan teknologi pengkapan dan pengolahan kab. Inhil, Benkalis, Rohil dan Pelalawan > Evaluasi Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Pemanfaatan Sumber daya dan pesisir laut > Pengawasan dan Pengendalian Sumber daya pesisir dan laut 	<p>Outcome</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya Perencanaan Wil Pesisir dan Lautan - Terciptanya pemetaan dan inventarisasi Potensi SD dan lautan - Tersedianya pinjaman modal untuk nelayan - Tersusunnya Peraturan Pemanfaatan SD Pesisir dan Laut <p>Benefit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan - Pengelolaan Wil pesisir dan Lautan secara terpadu dan berkelanjutan - Dapat mengetahui batas- batas eksploitasi SD pesisir dan Lautan - Dapat menerapkan teknologi baru dalam pengelolaan Wil pesisir dan Lautan - Dapat menerapkan Peraturan tersebut <p>Impact</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesejahteraan nelayan meningkat -Terpadunya Pengelolaan wil pesisir dan lautan -Batas-batas pengelolaan akan terlihat -Masyarakat dapat mengetahui teknologi yang di terapkan -Peningkatan PAD 			
		Program kelestarian dan Konservasi Sumberdaya Laut		<ul style="list-style-type: none"> > Identifikasi Potensi Sumberdaya Pesisir dan lautan Propinsi Riau (Kab.Karimun) > Perlindungan dan Perbaikan Habitat dan Jenis Penting yang dikelola kelompok masyarakat Propinsi Riau(edifikasi dan kompilasi serta social) > Pembentukan kelompok- kelompok masyarakat konservasi wilayah pesisir dan kepulauan Propinsi Riau(Analisa situasi dan inisiasi pembentukan kelompok dengan pendampingan) 	<ul style="list-style-type: none"> > valuasi ekonomi sumberdaya pesisir dan kelautan Propinsi Riau (Kab.Inhil kab.Rohil) > Perlindungan dan Perbaikan Habitat dan Jenis Penting yang dikelola kelompok masyarakat Propinsi Riau(Stratafikasi dan penyusunan rencana serta implementasi) > Pembentukan kelompok- kelompok masyarakat konservasi wilayah pesisir dan kepulauan Propinsi Riau(penyusunan rencana kelompok dan pelatihan serta motivasi kelompok) 	<p>Input</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana - Kegiatan - Sarana dan Prasarana - Sumberdaya masyarakat <p>Output</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya perhitungan ekonomi pemanfaatan sumberdaya Pesisir dan lautan - Adanya dokumen profil SD pesisir <p>Outcome</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terciptanya dokumen perhitungan ekonomi dan rencana strategi sumberdaya pesisir dan lautan <p>Benefit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan dan pelestarian sumberdaya dan lautan - Sumberdaya pesisir dan lautan dapat teridentifikasi <p>Impact</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan dan pelestarian sumberdaya dan kelautan -Kesejahteraan masyarakat pesisir meningkat 	-	0.06	0.10
Pembangunan kesehatan dan olahraga	Penyuluhan kesehatan masyarakat	Peningkatan penyuluhan kesehatan masyarakat melalui : - Peningkatan Pengetahuan perilaku Hidup Bersih dan sehat (PHSB) di 16 Kab/ kota.	Peningkatan penyuluhan kesehatan masyarakat melalui : - Peningkatan Pengetahuan perilaku Hidup Bersih dan sehat (PHSB) di 15 Kab/ kota.	Peningkatan penyuluhan kesehatan masyarakat melalui : - Peningkatan Pengetahuan perilaku Hidup Bersih dan sehat (PHSB) di 16 Kab/ kota.	Peningkatan penyuluhan kesehatan masyarakat melalui : - Peningkatan Pengetahuan perilaku Hidup Bersih dan sehat (PHSB) di 16 Kab/ kota.	<p>Input</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana - Kegiatan - Sarana dan Prasarana - Sumberdaya masyarakat <p>Output</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerapan pola hidup bersih dan sehat - Penetapan pedoman penyuluhan kesehatan - Pelaksanaan bimbingan teknis program penyuluhan kesehatan - Pelaksanaan promosi kesehatan masyarakat <p>Outcome</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya derajat kesehatan terwujudnya perilaku hidup bersih dan sehat <p>Benefit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produktivitas sumberdaya meningkat <p>Impact</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesadaran keluarga yang menjalankan pola hidup sehat meningkat 	0.05	0.07	0.07
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan pelayanan Kesehatan Masyarakat Menuju Riau sehat 2005 : Perencanaan dan Pembinaan kab/ kota sehat pada 15 kab/ kota Peningkatan Pelayanan RS : - Peningkatan RSUD type B menjadi B - Peningkatan RSUD type B menjadi B PendidikanPropinsi Riau - Peningkatan sarana RSUD pada 5 kab/kota	Peningkatan pelayanan Kesehatan Masyarakat Menuju Riau sehat 2005 : Perencanaan dan Pembinaan kab/ kota sehat pada 15 kab/ kota Peningkatan Pelayanan RS : - Peningkatan RSUD type B menjadi B PendidikanPropinsi Riau - Peningkatan sarana RSUD pada 5 kab/kota - Peningkatan Prasarana Puskesmas pada 5 kab/ kota	Peningkatan Pelayanan ke Masyarakat menuju Riau sehat 2005 : - Pelaksanaan Program Kab/ kota sehat pada 16 kab/ kota Peningkatan pelayanan RS : - Peningkatan RSUD type B menjadi B PendidikanPropinsi Riau - Peningkatan sarana RSUD pada 3 kab/ kota	Peningkatan Pelayanan ke Masyarakat menuju Riau sehat 2005 : - Pelaksanaan Program Kab/ kota sehat pada 16 kab/ kota Peningkatan pelayanan RS : - Peningkatan RSUD type B menjadi B PendidikanPropinsi Riau - Peningkatan sarana RSUD pada 3 kab/ kota	<p>Input</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana - Kegiatan - Sarana dan Prasarana - Sumberdaya masyarakat <p>Output</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatandarana dan prasarana Rumah sakit - Peningkatan akreditasi RSUD Propinsi - Peningkatan Kinerja dan Penempatan tenaga kesehatan - Pembinaan pelayanan kesehatan masyarakat - Survellands ephidemologi serta penanggulangan wabah penyakit 	6.62	6.44	6.46

		<p>peningkatan Prasarana Puskesmas pada 5 kab/ kota</p> <p>Penurunan angka kematian ibu (AKI) melalui akses pelayanan alternative & neonatal dengan peningkatan Manajemen KIA pada 15 kab/ kota</p> <p>Peningkatan pelayanan Tenaga Medis / kesehatan :</p> <p>Pemberdayaan Bidan Desa 300 orang untuk 15 kab/ kota</p> <p>Peningkatan keterampilan tenaga kerja kesehatna 229 orang</p>	<p>peningkatan Prasarana Puskesmas pada 5 kab/ kota</p> <p>Penurunan angka kematian ibu (AKI) melalui akses pelayanan alternative & neonatal dengan peningkatan Manajemen KIA pada 15 kab/ kota</p> <p>Peningkatan pelayanan Tenaga Medis / kesehatan :</p> <p>Pemberdayaan Bidan Desa 100 orang untuk 15 kab/ kota</p> <p>Peningkatan keterampilan tenaga kerja kesehatna 150 orang</p>	<p>Penurunan angka kematian ibu (AKI) melalui akses pelayanan alternative & neonatal dengan peningkatan Manajemen KIA pada 16 kab/ kota</p> <p>Peningkatan pelayanan Tenaga Medis / kesehatan :</p> <p>Pemberdayaan Bidan Desa 100 orang untuk 15 kab/ kota</p> <p>Peningkatan keterampilan tenaga kerja kesehatna 100 orang</p>	<p>dan kejadian luar biasa</p> <p>Penetapan satandarisasi laboratorium kesehatan</p> <p>Pembinaan Pengelolaan Obat dan Perlindungan masyarakat Dari bahaya narkoba ,sikotropika & zat adukatif (NAFSA) dan bahan berbahaya lainnya.</p> <p>Penekanan angka kematian ibu dan bayi</p> <p>Perilaku sehat dan pemberdayaan masyarakat</p> <p>Menuju masyarakat yang sehat mandiri dan produktif melalui penerapan “Visi Raiu Sehat 2005 ”</p>				
	Perbaikan gizi masyarakat	<p>Penanggulungan gizi dan kekurangan energi protein (KEP) 4.063 balita se Riau</p> <p>Bantuan pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS) untuk 267.040 anak se Riau</p>	<p>Penanggulungan gizi dan kekurangan energi protein (KEP) 1000 balita se Riau</p> <p>Bantuan pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS) untuk 250.000 anak se Riau</p>	<p>Penanggulungan gizi dan kekurangan energi protein (KEP) 500 balita se Riau</p> <p>Bantuan pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS) untuk 200.000 anak se Riau</p>	<p>Outcome Meningkatnya Saran dan prasarana kesehatan</p> <p>Terwujudnya Visi Riau Sehat 2005</p> <p>Tercapainya akreditasi RSUD Tipe B pendidikan dan rujukan Fak. kedokteran</p> <p>Benefit Meningkatnya kesehatan masyarakat</p> <p>Impact Angka harapan hidup meningkat</p> <p>Kesejahteraan masyarakat meningkat</p> <p>Input Dana</p> <p>Kegiatan</p> <p>Sarana dan Prasarana</p> <p>Sumber Daya Manusia</p> <p>Output Penggunaan kekurangan energi protein 6130 balita</p> <p>Pemberi bantuan program anak sekolah (PMT-AS) 621854 anak</p> <p>Peningkatan perbaikan gizi keluarga dan masyarakat</p> <p>Outcome Meningkatnya gizi masyarakat</p> <p>Terciptanya anak sekolah yang produktif</p> <p>Benefit meningkatnya produktivitas sumber daya manusia</p> <p>Tercapainya tingkat kehidupan masyarakat yang memenuhi standar WHO</p> <p>Impact Sumber daya manusia yang berkualitas</p>	-	-	0.02	
	Penanggulungan dan pemberantasan penyakit menular	<p>Peningkatan Penanggulungan penyakit menular antara lain</p> <p>Pemberantasan demam berdarah Dengue 250 fokus</p> <p>Penanggulungan penyakit Filariasis (kaki gajah) pada 5 kab (inhu, inhil, kuansing, bengkalis, rokan hilir)</p> <p>Penanggulungan kasus Malaria melalui penyemprotan Bandiocarb di 14 kab/kota sasaran 14.000 rumah</p> <p>Penanggulungan penyakit kelamin (PMS, HIV/AIDS) di 6 kab (kampar, pelalawan, inhu, bengkalis, rokan hilir)</p> <p>Pelaksanaan imunisasi di 15 kab/kota sasaran 34.400 anak sekolah</p>	<p>Peningkatan Penanggulungan penyakit menular antara lain</p> <p>Pemberantasan demam berdarah Dengue 200 fokus</p> <p>Penanggulungan penyakit Filariasis (kaki gajah) pada 5 kab (inhu, inhil, kuansing, bengkalis, rokan hilir)</p> <p>Penanggulungan kasus Malaria melalui penyemprotan Bandiocarb di 14 kab/kota sasaran 18.000 rumah</p> <p>Penanggulungan penyakit kelamin (PMS, HIV/AIDS) di 6 kab (kampar, pelalawan, inhu, bengkalis, rokan hilir)</p> <p>Pelaksanaan imunisasi di 15 kab/kota sasaran 25.000 anak sekolah</p>	<p>Peningkatan Penanggulungan penyakit menular antara lain</p> <p>Pemberantasan demam berdarah Dengue 200 fokus</p> <p>Penanggulungan penyakit Filariasis (kaki gajah) pada 5 kab (inhu, inhil, kuansing, bengkalis, rokan hilir)</p> <p>Penanggulungan kasus Malaria melalui penyemprotan Bandiocarb di 14 kab/kota sasaran 17.000 rumah</p> <p>Penanggulungan penyakit kelamin (PMS, HIV/AIDS) di 6 kab (kampar, pelalawan, inhu, bengkalis, rokan hilir)</p> <p>Pelaksanaan imunisasi di 15 kab/kota sasaran 20.000 anak sekolah</p>	<p>Input Dana</p> <p>Kegiatan</p> <p>Sarana dan Prasarana</p> <p>Sumber Daya Manusia</p> <p>Output Pemberantasan penyakit menular di daerah endemis, demam berdarah 1.050 fokus</p> <p>Penanggulungan penyakit menular malaria melalui penyemprotan bandiocarb di 16 kab/kota untuk 79.000 rumah</p> <p>Survei prevalensi di daerah potensial penyebaran penyakit</p> <p>Peningkatan manajemen program</p> <p>Pemberian imunisasi rutin untuk 79.400 anak sekolah</p> <p>Penanggulungan penyakit kelamin di 16 kab/kota</p> <p>Outcome Tertanggulangnya penyebaran penyakit menular</p> <p>Meningkatnya sistem kekebalan tubuh anak sekolah</p> <p>Menurunya kasus penyakit menular</p> <p>Terciptanya lingkungan masyarakat yang bebas dari penyalit menular</p> <p>Benefit Kualitas kesehatan masyarakat meningkat</p> <p>Pendapatan perkapita masyarakat membaik</p> <p>Kualitas kesehatan anak sekolah meningkat</p> <p>Impact Kesejahteraan masyarakat meningkat</p> <p>Derajat kesehatan masyarakat meningkat</p>				
	Pengawasan obat, makanan dan bahan berbahaya			<p>Penyuluhan penanggulungan NAFSA</p> <p>sertifikasi pengawasan penyaluran obat dan makanan</p> <p>Penyebaran informasi dan narkoba</p>	<p>Input Dana</p> <p>Kegiatan</p> <p>Sarana dan Prasarana</p> <p>Sumber Daya Manusia</p>				

						<p>Output Penetapan pedoman pengawasan obat dan makanan Lisensi dan sertifikasi pemasaran obat dan makanan Persamaan persepsi melalui integrasi lintas sector penanggulangan NAFSA</p> <p>Outcome Tertanggulangnya kasus narkoba Terciptanya lingkungan masyarakat yang bebas dari NAFSA</p> <p>Benefit Kualitas generasi muda meningkat Terciptanya perlindungan masyarakat terhadap NAFSA dan bahan berbahaya</p> <p>Impact Generasi muda yang bersih dan bebas dari NAFSA</p>			
		Pembinaan keolahragaan	Pembangunan stadion rumbai pekanbaru	<p>Pembangunan stadion rumbai 1 paket</p> <p>Peningkatan sarana dan prasarana 1 paket</p>	<p>Pembangunan stadion rumbai 1 paket</p> <p>Peningkatan sarana dan prasarana 2 paket</p>	<p>Input Dana Kegiatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Manusia</p> <p>Output Meningkatkan kualitas dan taraf hidup bagi perempuan anak dan remaja Meningkatkan kesejahteraan hidup bagi perempuan anak dan remaja Memberantas kebodohan kemiskinan dan pola hidup yang terbelakang</p> <p>Outcome Tewujudnya perempuan yang mandiri, berpotensi dan intelektual sebagai individu dan sebagai sumber daya pembangunan</p> <p>Benefit Keikutsertaan dan peran perempuan, anak dan remaja dalam pembangunan dapat terlaksana diberbagai bidang</p> <p>Impact Pembangunan yang terefisien lebih cepat terlaksana sehingga masyarakat adil dan makmur terlaksana dengan merata</p>	2.82	4.68	4.70
				<p>Peningkatan pendidikan dan latihan olahraga Prop. Riau 1 paket</p> <p>Pembinaan olahraga dan olahraga prestasi 1 paket</p>	<p>Peningkatan pendidikan dan latihan olahraga Prop. Riau 1 paket</p> <p>Pembinaan olahraga dan olahraga prestasi 2 paket</p> <p>Evaluasi pelaksanaan dan pembinaan dan pelatihan olahraga (1 paket)</p>	<p>Input Dana Kegiatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Manusia</p> <p>Output Tersedianya pusat-pusat pelatihan olahraga di tingkat pelajar Peningkatan jumlah & kualitas wadah pembinaan olahraga masyarakat Tersalurnya bakat dan pembibitan olahraga sejak usia dini Terlaksananya pendidikan dan pelatihan keolahragaan serta penempatan mental bagi atlet 7 cabang olahraga Peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi pelatih/wasit olahraga</p> <p>Outcome Mewujudkan pemanduan bakat dan pembibitan atlet olahraga pelajar sejak usia dini Meningkatnya profesionalisme atlet, pelatih/wasit Meningkatnya motivasi olahraga pelajar dan masyarakat</p> <p>Benefit Meningkatkan prestasi olahraga dikalangan pelajar Meningkatkan prestasi olahraga di propinsi</p> <p>Impact Meningkatkan budaya olahraga ditingkat pelajar Meningkatnya taraf hidup bagi atlet daerah</p>			
5	Pembinaan dan pengembangan dan kebudayaan	Pembinaan dan pengembangan budaya daerah	<p>Festival budaya melayu Asia Pasifik</p> <p>Identitas benda cagar budaya</p> <p>Dokumentasi/rekaman adapt perkawinan siak</p> <p>Penyusunan visi dan misi kebudayaan melayu Riau tahun 2020</p> <p>Konfransi sejarah melayu serumpun di tanjung pinang</p>	<p>Pengembangan budaya melayu serumpun</p> <p>Penumbuhan dan pengembangan norma dan identitas budaya melayu</p> <p>Revitalisasi dan apresiasi budaya melayu</p> <p>Pengendalian dan aktualisasi nilai-nilai budaya melayu</p> <p>Penyusunan program kegiatan pembangunan kebudayaan sesuai dengan visi dan misi kebudayaan melayu Riau 2020</p>	<p>Input Dana Kegiatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Manusia</p> <p>Output Terlaksananya festival budaya melayu asia pasifik Terlaksananya identitas benda-bendacagar budaya Terlaksananya perekaman adapt budaya perkawinan melayu Tersusunnya visi dan misi Riau 2020 bidang kebudayaan melayu Terlaksananya konfransi wisata sejarah melayu serumpun Terlaksananya kegiatan pengembangan budaya melayu serumpun Terlaksananya kegiatan penumbuhan dan pengembangan norma dan identifikasi budaya melayu</p>	-	0.29	0.29	

						<p>Terlaksananya kegiatan pengendalian dan aktualisasi nilai-nilai budaya melayu</p> <p>Terlaksananya kegiatan penyusunan program pembangunan/pengembangan kebudayaan melayu Riau dengan visi misinya</p> <p>Outcome Lebih dikenalnya nilai-nilai budaya melayu dikawasan asia pasifik Tersedianya dokumentasi (fakta dan data) kebudayaan Terwujudnya visi dan misi Riau 2020 bidang kebudayaan melayu Tersusunnya rekomendasi tentang wisata sejarah melayu Tersedianya program pembangunan/pengembangan budaya melayu yang berkesinambungan</p> <p>Benefit Tersosialisasikannya kebudayaan kesegala penjuru Tersedianya wadah penajaan seni budaya melayu Terwujudnya landasan/rujukan kebijakan pengembangan kebudayaan melayu</p> <p>Impact Meningkatnya pemahaman tentang kebudayaan melayu Meningkatnya arus wisata sejarah/budaya</p>			
	Pembinaan bahasa dan kesusastraan	Temu sastrawan Lomba cipta sastrawan Lomba pentas sastra	Kampanye bahasa dan sastra melayu didaerah strategis Penterjemahan bahasa dan sastra melayu di penyengat	Seminar perkembangan bahasa dan melayu sastra se Asia Tenggara Pembinaan sastra melayu	<p>Input Dana Kegiatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Manusia</p> <p>Output Terlaksananya kampanye bahasa dan sastra melayu didaerah strategis Terlaksananya penterjemahan bahasa dan sastra melayu di penyengat</p> <p>Outcome Meningkatnya pemahaman tentang bahasa dan nilai-nilai sastra melayu dikalangan masyarakat</p> <p>Benefit Bahasa dan sastra melayu semakin memasyarakat Masyarakat memperoleh hiburan yang bernilai sastra tradisional</p> <p>Impact Bahasa melayu dapat menjadi tuan rumahnya sendiri Penajaan seni dan sastra budaya melayu mempunyai nilai dan daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk dikunjungi</p>	0.02	1.09	1.10	
	Pembinaan peninggalan sejarah dan permuseuman		Pembangunan/pengembangan museum sejarah melayu Riau Pembuatan museum mini di kec. Lingga Penajaan seni, promosi	Pembangunan/pengembangan museum sejarah melayu Riau Identifikasi peninggalan sejarah dan kepurbakalaan pembinaan dan fasilitas penyelenggaraanmuseum mini lingga	<p>Input Dana Kegiatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Manusia</p> <p>Output Terlaksananya pembangunan/pengembangan/penyelenggaraan museum sejarah Propinsi Riau dan museummini kec. Lingga Teridentifikasinya Peninggalan sejarah dan kepurbakalaan</p> <p>Outcome Terwujudnya museum sejarah Propinsi riau di Pekanbaru dan museum mini di kecamatan Lingga yang representati layak dan memadai Tersedianya dokumen data dan benda-benda peninggalan sejarah dan kepurbakalaan</p> <p>Benefit Fungsi museum sejarah dapat dilaksanakan dan diselenggarakan dengan baik Dokumen/data peninggalan sejarah dan kepurbakalaan dapat menjadi penelitian/pengkajian bagi pihak-pihak berkepentingan</p> <p>Impact Museum dapat menjadi suatu wadah atau objek penelitian/pengkajian sejarah serta sekaligus sebagai salah satu tujuan wisata budaya</p>	-	0.20	0.21	
	Pembinaan dan pengembangan seni budaya (melayu)	Pertunjukan seni budaya melayu (luar dalam negeri 20 paket) Pengembangan seni budaya daerah 20 paket Temu kesenia 1 paket	Penajaan seni, promosi, eksibisi dan muhibah (1 paket) Bantuan peralatan seni 3 paket Bantuan/penajaan kesenian daerah melayu di TMII ventarisasi dan pengkajian musik tradisional	Penajaan seni, promosi, eksibisi dan muhibah (1 paket) Bantuan peralatan kesenian 5 paket Pemberdayaan kesenian daerah melayu di TMII Pembinaan kesenian di kab/kota (16 paket)	<p>Input Dana Kegiatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Manusia</p> <p>Output Terlaksananya bantuan kelengkapan peralatan kesenian tradisional Terlaksananya penajaan seni budaya melayu dalam rangka revitalisasi,</p>	0.17	0.20	0.21	

				<p>inventarisasi dan Pengkajian tari tradisional daerah Riau</p> <p>mbuatan buku naskah seni</p> <p>udi banding wisata budaya</p>	<p>Temu lintas pelaku seni budaya dalam rangka menuju visi Riau 2020</p>	<p>promosi dan pembinaan</p> <p>Terlaksananya kegiatan penyusunan naskah buku seni</p> <p>Terlaksananya inventarisasi dan pengkajian musik serta tari tradisional melayu</p> <p>Terlaksananya kegiatan seni budaya melayu di anjungan TMII Jakarta</p> <p>Terlaksananya temu lintas pelaku seni budaya melayu di Pekanbaru</p> <p>Outcome Meningkatkan ketersediaan peralatan seni, buku referensi dan dokumentasi data seni budaya melayu</p> <p>Tersusunnya rumusan dan rekomendasi tentang pengembangan seni budaya melayu</p> <p>Benefit Anjungan riiau di TMII menjadi salah satu sentra budaya melayu sekaligus berfungsi sebagai wahana pengenalan, promosi, publikasi, komunikasi dan informasi seni budaya melayu sebagai asset bangsa</p> <p>Tersedianya berbagai bahan dan masukan pemikiran untuk perencanaan pembangunan/pengembangan seni budaya melayu</p> <p>Impact Seni budaya melayu semakin dikenal di Nusantara maupun dimancanegara</p> <p>Anjungan Riau di TMII dapat mejadi salah satu tempat kunjungan wisata budaya</p> <p>Pihak-pihak terkait dengan perencanaan pembangunan pengembangan seni budaya melayu semakin mudah melaksanakan tugasnya</p>			
	Pengembangan sumber daya, sarana, dan prasarana	Pembangunan teater tertutup (auditorium)	<p>Perbaikan/pengembangan balai pelatihan dan pengkajian kebudayaan, kesenian dan pariwisata 1 unit</p> <p>Perbaikan/pengembangan anjungan Riau di TMII 1 unit</p> <p>Pembangunan/perbaikan/pengembangan balai adat 1 unit</p> <p>Pembangunan pusat-pusat kebudayaan melayu di wilayah Riau</p> <p>Pembangunan pusat seni budaya Bandar serai raja ali haji</p> <p>Pelatihan kebudayaan dan pariwisata</p>	<p>Perbaikan/pengembangan balai pelatihan dan pengkajian kebudayaan, kesenian dan pariwisata 1 unit</p> <p>Perbaikan/pengembangan anjungan Riau di TMII 1 unit</p> <p>Pembangunan/perbaikan/pengembangan balai adat 1 unit</p> <p>Pembangunan pusat-pusat kebudayaan melayu</p> <p>Pengkajian kebudayaan melayu Riau</p> <p>Pelatihan seni budaya</p>	<p>Input Dana</p> <p>Kegiatan</p> <p>Sarana dan Prasarana</p> <p>Sumber Daya Manusia</p> <p>Output Terlaksananya Perbaikan/pengembangan balai pelatihan dan pengkajian kebudayaan, kesenian dan pariwisata</p> <p>Terlaksananya Perbaikan/pengembangan anjungan Riau di TMII</p> <p>Terlaksananya Pembangunan/perbaikan/pengembangan balai adat</p> <p>Terlaksananya Pembangunan pusat-pusat kebudayaan melayu di Riau</p> <p>Terlaksananya pelatihan dan pengkajian budaya melayu Riau</p> <p>Terlaksananya master plan Bandar serai</p> <p>Tersusunnya detail engineering design (DED) Bandar serai</p> <p>Terlaksananya teater tertutup di lokasi purna MTQ (tahap II)</p> <p>Outcome Lebih berfungsinya balai pelatihan dan pengkajian kebudayaan, kesenian dan pariwisata</p> <p>Terbangunnya sarana dan prasarana penunjang anjungan riiau yang representative di TMII Jakarta</p> <p>Terbangunnya balai adat budaya melayu</p> <p>Terciptanya SDM lintas pelaku budaya melayu</p> <p>Tersedianya teater tertutup dipurna MTQ Pekanbaru</p> <p>Tersedianya master plan dan DED Bandar serai</p> <p>Benefit Berfungsinya balai pelatihan dan pengkajian kebudayaan, kesenian dan pariwisata anjunganRiau di TMII Jakarta serta balai adat</p> <p>Hasil-hasil pelatihan dan pengkajian dapat dirasakan manfaatnya</p> <p>Kegiatan seni dan sastra melayu dapat ditaja di teater tertutup yang representative dan bermutu tinggi</p> <p>Impact Kinerja pelatihan dan pengkajian kebudayaan, kesenian dan pariwisata anjungan Riau serta balai adat semakin baik dan bermanfaat bagi pengembangan daerah</p>	0.59	1.50	1.40	
6	Pembinaan dan pengendalian penataan ruang pertanahan, kependudukan dan lingkungan hidup	Penataan ruang	<p>Pembinaan teknis tataruang dan pelatihan tata ruang 1 paket</p> <p>Penyusunan rencana tata ruang kawasan perkotaan, pedesaan dan kawasan khusus 5 paket</p>	<p>Pembinaan teknis tataruang dan pelatihan tata ruang 1 paket</p> <p>Penyusunan rencana detail tat ruang kawasan 4 paket</p>	<p>Input Dana</p> <p>Kegiatan</p> <p>Sarana dan Prasarana</p> <p>Sumber Daya Manusia</p> <p>Output Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang 13 paket untuk kawasan perkotaan, pedesaan dan kawasan khusus kecamatan Lingga yang representati layak dan memadai</p> <p>Tersedianya dokumen data dan benda-benda peninggalan sejarah dan kepurbakalaan</p>	1.28	0.04	0.04	

						<p>Impact Meningkatkan kualitas ekonomi dan sosial budaya penduduk</p> <p>Input Dana Kegiatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Manusia</p> <p>Output Terlaksananya kegiatan pendaftaran/registrasi penduduk 1 paket</p> <p>Outcome Tersedianya data jumlah dan mutasi penduduk 1 paket</p> <p>Benefit Akuratnya data kependudukan 1 paket</p> <p>Impact Penataan dan penyebaran penduduk terencana dan terkendali dengan baik</p>			
						<p>Input Dana Kegiatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Manusia</p> <p>Output Terlaksananya kegiatan pemberian modal kerja secara bergulir berkesinambungan 1 paket Terlaksananya perbaikan sarana dan prasarana desa</p> <p>Outcome Meningkatnya produktifitas masyarakat desa eks. Transmigrasi dan desa sekitarnya</p> <p>Benefit Meningkatnya pendapatan masyarakat desa eks transmigrasi dan sekitarnya</p> <p>Impact Meningkatkan kesejahteraan masyarakat</p>			
	Keluarga berencana	<p>Mendukung pendataan keluarga sejahtera sepropinsi Riau</p> <p>Penyuluhan keluarga berkualita menuju keluarga sejahtera</p> <p>Pelatihan kader bina keluarga balita seprop. Riau</p>	<p>Mendukung pendataan keluarga sejahtera sepropinsi Riau</p> <p>Sosialisasi pemahaman BKB kemas untuk dinas instansi, LSM, organisasi seprop. Riau</p> <p>Penyuluhan keluarga berkualita menuju keluarga sejahtera</p>	<p>Mendukung pendataan keluarga sejahtera sepropinsi Riau</p> <p>Sosialisasi pemahaman BKB kemas untuk dinas instansi, LSM, organisasi seprop. Riau</p> <p>Penyuluhan keluarga berkualita menuju keluarga sejahtera</p>	<p>Input Dana Kegiatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Manusia</p> <p>Output Pendataan keluarga sejahtera Penyuluhan program KB Penetapan pedoman kampanye peny. KB Sosialisasi program pembinaan KB</p> <p>Outcome Terpenuhinya data demografi Laju pertumbuhan penduduk terkendali Perencanaan pengendalian KB semakin terarah</p> <p>Benefit Penyebaran penduduk selaras serasi dan seimbang antar wilayah, kawasan pusat pertumbuhan dengan daya tampung lingkungan Meningkat dan meluasnya penerimaan program KB keseluruhan lapisan masyarakat</p> <p>Impact Terciptanya keluarga yang mandiri dan berkualitas</p>	0.06	0.06	0.06	
	Program pembinaan daerah pantai	<p>Rehabilitasi/pemeliharaan hutan pantai/bakau 210 hektar dengan 250.000 batang bibit</p> <p>Pelatihan penanaman pemeliharaan huatan bakau 30 orang</p> <p>Program peningkatan pendapatan nelayan melalui pembangunan mata pencarian alternatif (MPA)</p> <p>Peningkatan sumber daya nelayan</p> <p>Pelaksanaan program pantai lestari dengan kegiatan penyuluhan dan pembinaan</p>	<p>Rehabilitasi/pemeliharaan hutan pantai/bakau 60 hektar dengan 80.000 batang bibit</p>	<p>Pembinaan rehabilitasi hutan pantai (hutan bakau)</p> <p>Pembinaan dan penyuluhan pantai lestari</p>	<p>Input Dana Kegiatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Manusia</p> <p>Output Rehabilitasi/pemeliharaan hutan pantai/bakau 270 Ha dengan 330.000 bibit bakau Pelatihan penanaman pemeliharaan huatan bakau 30 orang Pembinaan rehabilitasi hutan pantai Pembinaan dan penyuluhan pantai lestari</p> <p>Outcome Terehabilitasi dan terpeliharanya 270 Ha hutan dan tersedianya 330.000 bibit bakau Terlatihnya 30 orang penanam dan pemelihara bakkau</p>	0.17	0.04	0.04	

						Benefit Masyarakat/swasta turut serta berpartisipasi dalam pembangunan Memudahkan dalam melaksanakan pengawasan pembangunan			
	Program pembinaan dan pengembangan LH	Pembinaan dan peningkatan peran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup Penyusunan neraca kualitas LH daerah (NKLH) Riau tahun 2003 urutan ke-16	Pembinaan dan peningkatan peran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup Penyusunan neraca kualitas LH daerah (NKLH) Riau tahun 2003 urutan ke-16 Peningkatan kapasitas dan pengembangan kemampuan kelembagaan lingkungan hidup	Pembinaan dan peningkatan peran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup Penyusunan neraca kualitas LH daerah (NKLH) Riau tahun 2003 urutan ke-16 Peningkatan kapasitas dan pengembangan kemampuan kelembagaan lingkungan hidup	Pembinaan dan peningkatan peran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup Penyusunan neraca kualitas LH daerah (NKLH) Riau tahun 2003 urutan ke-16 Peningkatan kapasitas dan pengembangan kemampuan kelembagaan lingkungan hidup	Input Dana Kegiatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Manusia Output Penyusunan dokumen neraca kualitas lingkungan hidup Outcome Tersedianya pedoman neraca lingkungan hidup Benefit Masyarakat/swasta turut berpartisipasi dalam pembangunan Memudahkan dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan Impact Menciptakan keluarga yang kondusif	0.27	0.36	0.36
	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	pembinaan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan LH - Monitoring kualitas limbah dan pengelolaan AMDAL/RKL/RPL perusahaan - Pembinaan AMDAL Perusahaan Pelaksanaan perencanaan program kali bersih (PROKASIH) sungai siak Penelitian limbah pada 34 industri Penyusunan evaluasi rencana kerja	pembinaan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan LH - Monitoring kualitas limbah dan pengelolaan AMDAL/RKL/RPL perusahaan - Pembinaan AMDAL Perusahaan Pelaksanaan perencanaan program kali bersih (PROKASIH) sungai siak dengan pelaksanaan program penanggulangan pencemaran kawasan sungai siak Pembinaan dan pengendalian kerusakan lingkungan, koordinasi pengendalian kebakaran hutan Penilaian kegiatan penyebab kerusakan lingkungan Pengendalian kerusakan ekosistem Pengendalian izin limbah cair Penyuluhan dan pelatihan pengendalian pencemaran lingkungan Penyusunan pedoman/petunjuk pelaksanaan lingkungan hidup Inventarisasi potensi kerusakan Penyusunan program dan profil kerusakan ekosistem pantai dan laut Perencanaan pengendalian lingkungan hidup	pembinaan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan LH - Monitoring kualitas limbah dan pengelolaan AMDAL/RKL/RPL perusahaan - Pembinaan AMDAL Perusahaan Pelaksanaan perencanaan program kali bersih (PROKASIH) sungai siak dengan pelaksanaan program penanggulangan pencemaran kawasan sungai siak Pembinaan dan pengendalian kerusakan lingkungan, koordinasi pengendalian kebakaran hutan Penilaian kegiatan penyebab kerusakan lingkungan Pengendalian kerusakan ekosistem Pengendalian izin limbah cair Penyuluhan dan pelatihan pengendalian pencemaran lingkungan Penyusunan pedoman/petunjuk pelaksanaan lingkungan hidup Inventarisasi potensi kerusakan Penyusunan program dan profil kerusakan ekosistem pantai dan laut Perencanaan pengendalian lingkungan hidup	pembinaan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan LH - Monitoring kualitas limbah dan pengelolaan AMDAL/RKL/RPL perusahaan - Pembinaan AMDAL Perusahaan Pelaksanaan perencanaan program kali bersih (PROKASIH) sungai siak dengan pelaksanaan program penanggulangan pencemaran kawasan sungai siak Pembinaan dan pengendalian kerusakan lingkungan, koordinasi pengendalian kebakaran hutan Penilaian kegiatan penyebab kerusakan lingkungan Pengendalian kerusakan ekosistem Pengendalian izin limbah cair Penyuluhan dan pelatihan pengendalian pencemaran lingkungan Penyusunan pedoman/petunjuk pelaksanaan lingkungan hidup Inventarisasi potensi kerusakan Penyusunan program dan profil kerusakan ekosistem pantai dan laut Perencanaan pengendalian lingkungan hidup	Input Dana Kegiatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Manusia Output Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Penanggulangan kebersihan sungai siak Pengendalian kebakaran hutan Pengendalian limbah cair Outcome Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan Terkendalinya sungai siak dari pencemaran Terkoordinasinya penanggulangan kebakaran hutan Terkendalinya limbah cair Benefit Masyarakat/swasta turut serta berpartisipasi dalam pembangunan Memudahkan dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan Impact Menciptakan keluarga yang kondusif	0.08	0.13	0.13
	Program pengendalian kerusakan hutan, tanah dan air	Pembinaan pelestarian hutan dan pengelolaan kawasan lindung Pembinaan pelestarian dan pengamanan tatabas kawasan hutan dan pelatihan aparat pengamanan hutan serta pemetaan hutan 150 km	Pembinaan pelestarian hutan dan pengelolaan kawasan lindung Pembinaan pelestarian dan pengamanan tatabas kawasan hutan dan pelatihan aparat pengamanan hutan serta pemetaan hutan 150 km	Pembinaan pelestarian hutan dan pengelolaan kawasan lindung Pembinaan pelestarian dan pengamanan tatabas kawasan hutan dan pelatihan aparat pengamanan hutan serta pemetaan hutan 150 km	Pembinaan pelestarian hutan dan pengelolaan kawasan lindung Pembinaan pelestarian dan pengamanan tatabas kawasan hutan dan pelatihan aparat pengamanan hutan serta pemetaan hutan 150 km	Input Dana Kegiatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Manusia Output Pembinaan pelestarian hutan dan pengelolaan kawasan lindung Tatabatas dan pemetaan hutan 722.5 km Outcome Terbinanya kelestarian hutan Tertatanya batas hutan Benefit Masyarakat/swasta turut serta berpartisipasi dalam pembangunan Memudahkan dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan Impact Menciptakan keluarga yang kondusif	0.34	0.10	0.10
	Program penyelamatan hutan, tanah dan iar	Pembinaan pengelolaan gajah liar dan pengelolaan kawasan konservasi gajah Operasionalisasi dan pelatihan penanggulangan kebakaran hutan	Pembinaan pengelolaan gajah liar dan pengelolaan kawasan konservasi gajah Operasionalisasi dan pelatihan penanggulangan kebakaran hutan	Pembinaan pengelolaan gajah liar dan pengelolaan kawasan konservasi gajah Operasionalisasi dan pelatihan penanggulangan kebakaran hutan	Pembinaan pengelolaan gajah liar dan pengelolaan kawasan konservasi gajah Operasionalisasi dan pelatihan penanggulangan kebakaran hutan	Input Dana Kegiatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Manusia	0.08	0.15	0.15

					hutan	<p>Output Pengelolaan gajah liar melalui konservasi Penanggulangan kebakaran hutan</p> <p>Outcome Terkelolanya gajah liar Tertanggulangnya kebakaran hutan</p> <p>Benefit Masyarakat/swasta turut serta berpartisipasi dalam pembangunan Memudahkan dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan</p> <p>Impact Menciptakan keluarga yang kondusif</p>			
		Pembinaan kesejahteraan sosial	<p>Peningkatan pembinaan kesejahteraan keluarga pada 15 kab/kota</p> <p>Pembinaan kelompok masyarakat tertinggal di Kab. Inhil: - Pengadaan 2 unit sarana rumah ibadah + balai sosial - Penanggulangan kemiskinan 189 paket</p> <p>Peningkatan pemberdayaan masyarakat</p> <p>Pengembangan kawasan tertinggal dan pulau terpencil</p>	<p>Pembinaan dan pemberian bantuan kepada 10 organisasi sosial masyarakat</p> <p>Peningkatan sarana dan prasarana bagi komunitas adat terpencil 1 paket - Bantuan obat, bibit untuk 7.500 kk - Bantuan santunan hidup fakir miskin 1.050 kk</p> <p>Pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa Peningkatan keterampilan masyarakat</p>	<p>Pembinaan dan pemberian bantuan kepada 13 organisasi sosial masyarakat</p> <p>Peningkatan sarana dan prasarana bagi komunitas adat terpencil 1 paket - Bantuan santunan hidup fakir miskin 1.050 kk</p> <p>Pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa Peningkatan keterampilan masyarakat</p>	<p>Input Dana Kegiatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Manusia</p> <p>Output Pembinaan kelompok kemasyarakatan Peningkatan pelayanan sosial Pemberian bantuan bagi 2.289 kk tidak mampu Peningkatan prasarana komunitas adat terpencil melalui bantuan obat, bibit untuk 7.500 kk</p> <p>Outcome Terbinanya kelompok kemasyarakatan dan meningkatnya pelayanan sosial Meningkatkan taraf hidup komunitas adat terpencil</p> <p>Benefit Meningkatnya pelayanan sosial masyarakat</p> <p>Impact Meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan rakyat</p>	0.16	0.28	0.28
		Pelayanan dan rehabilitasi ayanan	<p>Rehabilitasi anak cacat dan tuna sosial dan anak bermasalah melalui : - Santunan penyandang cacat 20 kelompok - Pengadaan sarana dan prasarana rehabilitasi tuna sosial 5 paket - Pembinaan 75 orang anak bermasalah - Pelatihan keterampilan anak nakal korban narkoba (ANKN) 1 paket</p>	<p>Rehabilitasi anak cacat dan tuna sosial dan anak bermasalah melalui : - Santunan penyandang cacat 20 kelompok - Pengadaan sarana dan prasarana rehabilitasi tuna sosial 1 paket - Pembinaan 75 orang anak bermasalah - Pelatihan keterampilan anak nakal korban narkoba (ANKN) 1 paket</p>	<p>Rehabilitasi anak cacat dan tuna sosial dan anak bermasalah melalui : - Santunan penyandang cacat 20 kelompok - Pengadaan sarana dan prasarana rehabilitasi tuna sosial 1 paket - Pembinaan 75 orang anak bermasalah - Pelatihan keterampilan anak nakal korban narkoba (ANKN) 1 paket</p>	<p>Input Dana Kegiatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Manusia</p> <p>Output Berkembangnya pelayanan sosial kemasyarakatan (60 kelompok anak cacat) Pelaksanaan penempatan sosial profesional dan fungsional panti sosial Meningkatkan penanggulangan masalah-masalah sosial (225 anak bermasalah)</p> <p>Outcome Memecahkan masalah-masalah sosial dikalangan masyarakat Meningkatnya kemampuan profesional para pekerja sosial, tersedianya wadah penampungan dan pusat-pusat rehabilitasi tuna sosial, orang jompo, anak-anak cacat dan masyarakat tidak mampu yang memadai</p> <p>Benefit Meningkatnya kualitas pelayanan sosial masyarakat Meningkatnya kesadaran dan tanggung jawab warga masyarakat untuk menjadi pekerja sosial Tersedianya dana jaminan sosial untuk setiap usaha sosial seperti yatim piatu dan fakir miskin</p> <p>Impact Meningkatnya kesejahteraan rakyat</p>	0.12	0.13	0.14
7	Pembinaan dan pengendalian supermasi hukum, aparatu, politik, keamanan dan ketertiban masyarakat	Peningkatan kesadaran hukum	<p>Penertiban angkutan barang/kayu pada ruas jalan Propinsi, berdasarkan SK Gubernur Riau Nomor: 08 Tgl 11 Mei 1999, 1 paket</p> <p>Penertiban kegiatan eksplorasi Gallan C tentang perizinan, redistribusi dan sanksi hukum 1 paket</p> <p>Penertiban kegiatan pengelolaan sumber daya hutan 1 paket</p>	<p>Pembinaan dan pengembangan SJDI hukum 1 paket</p> <p>Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan yang membutuhkan</p> <p>Merevisi berbagai perda Prop. Riau Menyusun berbagai perda Prop. Riau</p>	<p>Pembinaan dan pengembangan SJDI hukum 1 paket</p> <p>Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan yang membutuhkan</p> <p>Merevisi berbagai perda Prop. Riau Menyusun berbagai perda Prop. Riau</p>	<p>Input Dana Kegiatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Manusia</p> <p>Output Berkembangnya SJDI di Prop. Riau Terselenggaranya bantuan hukum kepada masyarakat Terbentuknya berbagai perda Prop. Riau Pelaksanaan otonomi daerah</p> <p>Outcome Terselenggaranya sistem legislasi yang baik</p> <p>Benefit Meningkatnya pelayanan hukum terhadap masyarakat Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum</p>	0.07	0.05	0.04

						Impact	Meningkatnya Pendapatan asli daerah			
	Peningkatan penyuluhan hukum		Sosialisasi produk hukum 1 kegiatan Penyuluhan hukum 1 kegiatan Pelatihan kepengacaraan 1 kegiatan	Sosialisasi produk hukum 1 kegiatan Penyuluhan hukum 1 kegiatan		Input	Dana Kegiatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Manusia	-	0.04	0.03
						Output	Terselenggaranya produk hukum kepada masyarakat			
						Outcome	Tersedianya produk hukum yang dapat dipahami masyarakat			
						Benefit	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum			
						Impact	masyarakat dapat memahami produk hukum Propinsi Riau			
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur pemerintah	Pembangunan gedung kantor dilingkungan pemda Prop. Riau	Pembangunan gedung kantor dilingkungan pemda Prop. Riau Rehabilitasi, renovasi gedung kantor dilingkungan pemda prop. Riau Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dilingkungan pemda Prop. Riau Pengadaan sarana mobilitas pemda Prop. Riau	Pembangunan gedung kantor dilingkungan pemda Prop. Riau Rehabilitasi, renovasi gedung kantor dilingkungan pemda prop. Riau Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dilingkungan pemda Prop. Riau Pengadaan sarana mobilitas pemda Prop. Riau		Input	Dana Kegiatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Manusia	6.50	6.41	5.45
						Output	Perbaikan sarana dan prasarana pemerintahan Propinsi Peningkatan kualitas aparatur pemerintah Propinsi Perbaikan/rehabilitasi, renovasi gedung kantor dilingkungan pemda Prop. Riau Pengadaan sarana mobilitas pemda Riau Pengadaan lahan untuk dikat pada Prop. Riau			
						Outcome	Meningkatnya kinerja aparatur Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat			
						Benefit	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Meningkatnya kemampuan aparatur dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat Meningkatnya efisiensi kerja aparatur pemerintah Prop. Riau			
						Impact	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja Terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih dan berbibawabebas dari KKN			
	Pengembangan SDM aparatur	Peningkatan kualitas SDM aparatur melalui pelatihan dan pendidikan	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepegawaian Studi kooperatif pengembangan SDM	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepegawaian Studi kooperatif pengembangan SDM		Input	Dana Kegiatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Manusia	0.17	1.08	0.92
						Output	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur Tersedianya aparatur yang handal dan profesional Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penjenjangan serta teknis fungsional tertentu yang mencakup wilayah Propinsi Penyediaan dukungan administrasi dan karir pegawai			
						Outcome	SDM aparatur pemerintah daerah menjadi berkualitas dan profesional			
						Benefit	Meningkatnya profesional aparatur pemda Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat			
						Impact	Meningkatnya kualitas aparatur dalam memanfaatkan potensi SDA, pelayanan terhadap masyarakat secara profesional serta bisa merebut peluang pasar dan peluang usaha			
	Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta mekanisme perencanaan pembangunan		Pengendalian administrasi manajemen pemerintahan dan pembangunan Pembinaan dan pemantapan kelembagaan organisasi politik (pemda)	Pengendalian administrasi manajemen pemerintahan dan pembangunan Pembinaan dan pemantapan kelembagaan organisasi politik (pemda)		Input	Dana Kegiatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Manusia	-	0.58	0.49
						Output	Penyusunan juknis Penyusunan standarisasi			

			Penyusunan perencanaan program pembangunan daerah	Penyusunan perencanaan program pembangunan daerah	Sosialisasi Penyempurnaan struktur dan ketatalaksanaan serta kinerja organisasi Tersedianya data dan informasi pembangunan			
					Outcome Terciptanya sistem birokrasi yang efisien Terbentuknya kelembagaan yang efisien dan efektif Optimalnya sistem dan mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan daerah			
					Benefit Terciptanya aparatur yang profesional Meningkatnya kinerja aparatur daerah Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah			
					Impact Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur daerah terhadap publik Terwujudnya penyusunan perencanaan pembangunan daerah			
	Pendayagunaan sistem dan pelaksanaan pengawasan	Pengendalian dan monitoring program pembangunan daerah Evaluasi dan pelaporan program pembangunan daerah	Pengendalian dan monitoring program pembangunan daerah Evaluasi dan pelaporan program pembangunan daerah	Pengendalian dan monitoring program pembangunan daerah Evaluasi dan pelaporan program pembangunan daerah	Input Dana Kegiatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Manusia	2.08	0.25	0.21
		pengawasan pelaksanaan pembangunan	pengawasan pelaksanaan pembangunan	pengawasan pelaksanaan pembangunan	Output Peningkatan peran aparatur pengawasan Meningkatnya aparatur pengawasan daerah Tersedianya data dan informasi program pembangunan daerah			
					Outcome Terciptanya sistem yang efektif/efisien Terciptanya aparatur yang berkualitas Tersedianya bahan kebijaksanaan untuk pengambilan keputusan			
					Benefit Sistem pengawasan efisien dan efektif Berjalannya sistem perencanaan pembangunan secara efisien			
					Impact Meningkatnya profesionalisme pengawasan Berjalannya sistem yang efektif/efisien Meningkatnya kualitas pelaporan pembangunan pemerintah daerah			
	Peningkatan Pembinaan dan politik masyarakat		Verifikasi partai politik di Prop. Riau 1 paket	Verifikasi partai politik di Prop. Riau 1 paket	Input Dana Kegiatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Manusia	-	0.02	0.02
			Peningkatan dan pengembangan infrastruktur sosial politik 1paket	Pengumpulan data kesiapan pelaksanaan pemilu Peningkatan dan pengembangan infrastruktur sosial politik 1paket	Output Tersedianya data partai politik			
					Outcome Tersedianya infrastruktur sosial politik			
					Benefit Tegaknya sistem demokrasi pada masyarakat			
					Impact Masyarakat dapat ikut dalam organisasi sosial politik dalam pelaksanaan demokrasi			
	Peningkatan pembinaan organisasi masyarakat		Pemantauan dan pengumpulan data Ormas, 15 kab/kora	Pembinaan kepada organisasi masyarakat, 1paket	Input Dana Kegiatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Manusia	-	0.02	0.02
			Pembinaan kepada organisasi masyarakat, 1paket		Output Tersedianya data partai politik			
					Outcome Terbinanya organisasi sosial masyarakat di Prop. Riau			
					Benefit Tegaknya sistem demokrasi pada masyarakat			
					Impact Masyarakat dapat ikut dalam organisasi sosial politik dalam pelaksanaan demokrasi			
	Peningkatan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat		Pembinaan dan pengembangan SATPOL-PP Propinsi Riau, 50 orang	Pembinaan dan pengembangan SATPOL-PP Propinsi Riau, 50 orang	Input Dana Kegiatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Manusia		0.12	0.10
			Pelatihan keterampilan penyelamatan SAR, 20 orang	Pelatihan keterampilan penyelamatan SAR, 20 orang				

8	Pembinaan dan pengembangan komunikasi, informasi dimedia massa	Pengembangan sistem informasi		<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan paket pembangunan Propinsi Riau melalui media televisi, 1 paket - Pelatihan kehumasan Prop. Riau, 1 kegiatan - Sosialisasilima pilar utama pemacu pembangunan Prop. Riau dan Visi Misi Riau 2020, 1 kegiatan - Penerbitan jurnal info Prop. Riau, 1 paket - Penerbitan Buletin infokom, 1 paket 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan paket pembangunan Propinsi Riau melalui media televisi, 1 paket - Pelatihan kehumasan Prop. Riau, 1 kegiatan - Penerbitan jurnal info Prop. Riau, 1 paket - Penerbitan Buletin infokom, 1 paket 	<ul style="list-style-type: none"> Output Tersedianya anggota satpol PP di prop. Riau Tersedianya tenaga penyelamatan SAR Outcome Terjaminnya ketentraman dan ketertiban umum Benefit Terjalannya antar lembaga dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum Impact Masyarakat dapat berpartisipasi dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum 	0.58	0.15	0.15	
		<ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi relay mini TVRI di natuna, 1 unit - Pembangunan pemancar FM RRI pekanbaru radius 350 km, 1 unit - Pengadaan camera beta dalam peliputanTVRI pekanbaru, 1 unit 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan darana dan prasarana TVRI dan RRI 1 paket 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan darana dan prasarana TVRI dan RRI 1 paket 	<ul style="list-style-type: none"> Input Dana Kegiatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Manusia Output Tersedianya tenaga kehumasan di Prop. Riau Tersedianya informasipembanguna Propinsi Riau kepada masyarakat Outcome Tersebar nya informasi pembangunan daerah propinsi Riau pada masyarakat Benefit Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap informasi pembangunan di Propinsi Riau Impact Masyarakat dapat ikut dalam meningkatkan pembanguna Propinsi Riau 					
Jumlah Prosentase bobot program dan kegiatan								100	100	100

Penjelasan Program pada APBD Riau Tahun 2001 merupakan aplikasi operasional sesuai dengan Perda Propinsi Riau No. 1 Tahun 2001 (Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Riau TA 2001)

Pada Renstra, Program Tahun 2001 menyesuaikan dengan program Tahun 2002 dan 2003

BAB VII PENUTUP

pembangunan daerah propinsi riau, merupakan upaya untuk memperberdayakan pemerintahan daerah serta masyarakat diseluruh daerah, sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk memperluas pilihannya dalam mengembangkan kehidupan sosial ekonominya secara lebih baik dan maju.

pembangunan Daerah Propinsi Riau dilaksanakan secara senengis oleh seluruh komponen di daerah riau dengan berlandaskan pada azas keseimbangan, pemerataan pembangunan antar kabupaten/kota, kemitraan antar pemerintah, masyarakat dan dunia uaha, interaksi lintas pelakusecara terbuka, manajemen publik yang efektif, efesien dan akuntable.

Rencana Strategis Propinsi Riau yang merupakan penjabaran dari Propeda Propinsi Riau, pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah, yang untuk selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) dan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2001 -2003.

Rencana stratehis Propinsi Riau merupakan dokume perencanaan taktis strategi, yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah Riau, serta daftar program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan masalah di maksud, secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD propinsi Riau dengan mengutamakan kewenangan wajib Pemerintah Propinsi Riau, disusul dengan bidang-bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Rencan Strategis Propinsi Riau juga merupakan alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Gubernur pada setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan Gubernur Riau tahun 2003.

Berhasilnya usaha-usaha pembangunan di Propinsi Riau yang tersusun melalui Rencana Strategis Propinsi Riau, sangat tergantung kepada peran serta dan partisipasi aktif Pemerintah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bersama dengan seluruh masyarakat Riau.

Dalam rangkah itu pula terus dikembangkan kemitraan dan sinergi antara Pemerintah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat, secara jujur, transparan, adil, demokratis dan penuh tanggung jawab, sehingga hasil-hasil pembangunan daerah dapat benar-benar dinikmati oleh seluruh masyarakat Riau sebagai wujud dari kesejahteraan lahir maupun batin dan untuk menuju visi Riau tahun 2020.